

**KETIDAKPERCAYAAN TOKOH MASYARAKAT KEPADA PARTAI
POLITIK (STUDI KOTA BANDAR LAMPUNG)**

(Skripsi)

Oleh

DEFRI FAHLEPI AMIN

1746021019



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

KETIDAKPERCAYAAN TOKOH MASYARAKAT KEPADA PARTAI POLITIK (STUDI KOTA BANDAR LAMPUNG)

Oleh

DEFRI FAHLEPI AMIN

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya fenomena terjadinya ketidakpercayaan tokoh masyarakat terhadap partai politik yang ada di Kota Bandar Lampung. Partai politik dinegara Indonesia merupakan wadah bagi masyarakat, jembatan bagi semua kalangan masyarakat kepada pemerintahan, namun pada kenyataanya bahwa ilangnya ideologi masyarakat yang hilang kepada partai politik membuat reputasi partai politik kian hari menurun dimata masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai persepsi tokoh masyarakat terhadap ketidakpercayaan masyarakat kepada partai politik serta membahas mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi masyarakat sehingga masyarakat mengalami krisis kepercayaan kepada partai politik dengan menggunakan teori pemikiran Atkinson. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan melakukan wawancara langsung bersama narasumber informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa edukasi dari partai politik untuk masyarakat belum maksimal bahkan belum ada sama sekali dari partai politik kepada masyarakat. Ketidakpercayaan tokoh masyarakat kepada partai politik dikarena tidak adanya edukasi politik dari partai politik dalam memberikan sosialisasi politik kepada masyarakat, karena politik dan demokrasi seperti mata uang, keduanya memiliki nilai yang sama dan saling menguatkan. Sedangkan sikap masyarakat kepada partai politik yaitu masyarakat menilai bahwa rata-rata partai politik saat ini memiliki sikap pragmatis kepada masyarakat, yang dimana masyarakat dianggap mudah dan praktis oleh partai politik terutama oleh para kader-kader partai politik. Sifat seperti yang membuat masyarakat terkadang ragu dengan partai politik untuk dapat bekerja sama memberikan aspirasinya. Faktor yang membuat masyarakat merasa tidak percaya dengan partai politik, tidak adanya komunikasi, interaksi edukasi politik, dan inovasi politik dari para partai politik kepada masyarakat.

Kata kunci : pengetahuan, ketidakpercayaan, sikap kepercayaan, .

ABSTRACT

DISPOSAL OF COMMUNITY FIGURES IN POLITICAL PARTIES (STUDY OF BANDAR LAMPUNG CITY)

By

DEFRI FAHLEPI AMIN

This research is motivated by the phenomenon of distrust of public figures towards political parties in Bandar Lampung City. Political parties in the Indonesian state are a forum for the community, a bridge for all levels of society to the government, but the fact is that the loss of community ideology that is lost to political parties makes the reputation of political parties increasingly decline in the eyes of the public. This study aims to discuss the perception of public figures on public distrust of political parties and discuss what factors influence society so that people experience a crisis of trust in political parties using Atkinson's theory of thought. This study uses a descriptive method by conducting direct interviews with informants. The results of the study indicate that education from political parties for the community has not been maximized and there is not even any education from political parties to the community. The distrust of public figures to political parties is due to the absence of political education from political parties in providing political socialization to the public, because politics and democracy are like currency, both of which have the same value and are mutually reinforcing. Meanwhile, the attitude of the community towards political parties is that the public considers that the average political party currently has a pragmatic attitude to the community, which is considered easy and practical by the political parties, especially by the cadres of political parties. Such traits make people sometimes doubt political parties to be able to work together to provide their aspirations. Factors that make people feel distrustful of political parties, lack of communication, interaction of political education, and political innovation from political parties to the community..

Keywords: knowledge, distrust, attitude of trust,

**KETIDAKPERCAYAAN TOKOH MASYARAKAT KEPADA PARTAI
POLITIK (STUDI KOTA BANDAR LAMPUNG)**

Oleh

DEFRI FAHLEPI AMIN

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

**Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

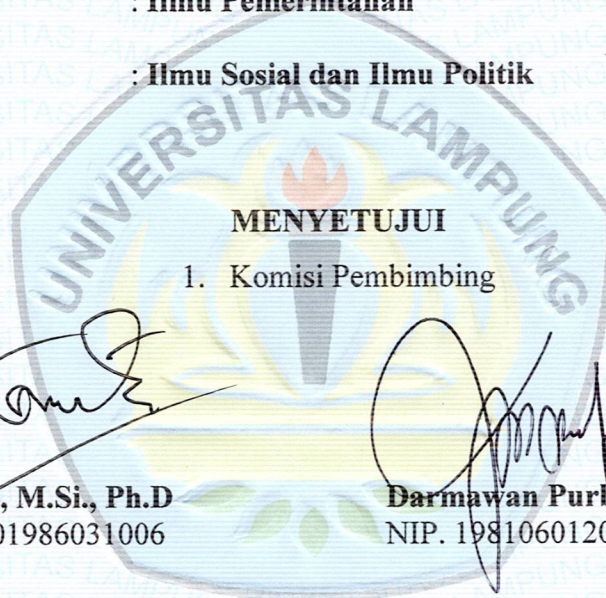
Judul Skripsi : **KETIDAKPERCAYAAN TOKOH MASYARAKAT
KEPADA PARTAI POLITIK (STUDI KOTA
BANDAR LAMPUNG)**

Nama : **Defri Fahlepi Amin**

No. Pokok Mahasiswa : **1746021019**

Jurusan : **Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



MENYETUJUI

1. **Komisi Pembimbing**

Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D
NIP. 196010101986031006

Darmawan Purba, S.IP., M.IP
NIP. 198106012010121003

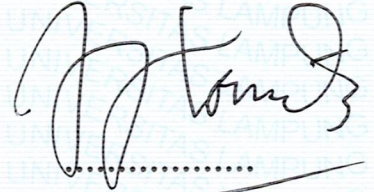
2. **Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan**

Drs. R. Sigit Kribintoro, M.IP
NIP. 196112181989021001

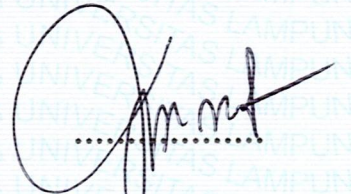
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Drs. Hertanto, M.SI., Ph.D**



Sekretaris : **Darmawan Purba, S.IP., M.IP**



Penguji : **Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP. 19610807 198703 2 001

Tanggal Lulus skripsi : **9 Maret 2022**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 4 Maret 2022

buat Pernyataan



Catatan :

Pernyataan ini diletakan pada halaman setelah Abstrak

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Defri Fahlepi Amin, anak ke tiga dari 3 (tiga) bersaudara. Dilahirkan di Kotabumi, Lampung Utara pada tanggal 12 Oktober 1998 dari pasangan Bapak Fahri Ruslan dan Ibu Dina Artati. Jenjang Pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar Negeri 4 Kotabumi, Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara pada tahun 2005 dan lulus pada tahun 2011. Pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama penulis diselesaikan di SMP Xaverius Kotabumi, Lampung Utara pada tahun 2011 dan lulus pada tahun 2014. Pendidikan Sekolah Menengah Atas diselesaikan di SMA Negeri 9 Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung pada tahun 2014 dan lulus pada tahun 2017.

Tahun 2017 penulis dinyatakan lulus pada Jalur Ujian Mandiri masuk Universitas (UM) dan dinyatakan diterima sebagai mahasiswa pada Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Penulis semasa kuliah pernah mengikuti organisasi UKM-F Cendekia pada tahun 2017 dan juga mengikuti organisasi eksternal kampus seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Sosial Politik Universitas Lampung. Demikian sekilas kegiatan penulis selama kuliah dari tahun 2017-2022.

MOTTO

“Jadikan Pengalaman Sebagai Pembelajaran Untuk Ilmu”

(Papah/ayah)

“Semua peningkatan dan dan pertumbuhan pribadi muncul berkat adanya kesadaran sederhana. Kesadaran itu adalah bahwasanya, kita secara pribadi bertanggung jawab atas segala hal dalam hidup kita dan menerima tanggung jawab atas masalah yang kita hadapi menjadi langkah pertama untuk menyelesaikannya”

(Mark Manson)

“Perjalanan hidup akan terus mengalir dan terus akan mengalami sebuah proses yang terus menerus panjang, pembelajaran ilmu paling berharga didapatkan dari pengalaman perih yang sudah terlewat ”

(Defri Fahlepi Amin)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamiin terimakasih banyak ya allah engkau telah memberikan kesempurnaan akal dan juga fisik yang sehat sehingga pada akhirnya mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Shalawat teriring salam, selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang selalu dinantikan syafa'atnya di Yaumul Akhir.

Dan

Ku persembahkan karya ini untuk sosok yang amat kusayangi
Mamak dan Papah tercinta
Dina Artati dan Fahri Ruslan

Abang dan Ajeng ku tersayang

Terimakasih atas semua yang telah mendoakan dan mendukung penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini, semoga segala kebaikannya mendapat balasan dari allah SWT

Almamater Tercinta Universitas Lampung.

UCAPAN TERIMAKASIH

Segala puji bagi Allah SWT atas nikmat dan karunian-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Ketidakpercayaan Tokoh Organisasi Masyarakat Kepada Partai Politik (Studi Kota Bandar Lampung)”. Sholawat teriring salam selalu tercur kepada Nabi Muhammad SAW, semoga kita semua mendapatkan syafaatnya.

Skripsi ini merupakan karya ilmiah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Penulis menyadari akan kelemahan dan kekurangan akan keterbatasan pengetahuan dalam Menyusun skripsi ini mustahil dapat terwujud dengan baik. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan sripsi ini. Antara lain :

1. Terima kasih untuk kedua orang tuaku tercinta, mamak dan papah, pencapaian ini aku persembahkan untuk kalian, tak satu hal pun dapat membalas ketulusan dan kasih sayang yang kalian berikan, amat sangatlah beruntung aku terlahir dan dibesarkan oleh kalian, terima kasih banyak mamak dan papah mungkin aku bisa menjadi apa yang kalian inginkan akan tetapi terima kasih banyak sudah menjadi ayah dan ibu hebat buat adek. Sekali lagi terima kasih banyak.
2. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung dan juga selaku dosen penguji. Terima Kasih atas segala bimbingan sehingga peneliti mampu menyelesaikan sampai tahap akhir skripsi.
3. Bapak Himawan Indrajat, S.IP.,M.Si selaku dosen Pembimbing Akademik Peneliti.

4. Bapak Darmawan Purba., S.IP.,M.IP. selaku pembimbing kedua penulis. Terimakasih atas segala bimbingannya sehingga peneliti mampu menyelesaikan sampai tahap akhir skripsi.
5. Bapak Drs. Hertanto, M.Si.,Ph.D selaku pembimbing utama penulis yang telah banyak memberikan kritik dan saran maupun masukan terutama penulis berterima karena Bapak penulis dapat bertemu dengan petinggi-petinggi Organisasi Masyarakat di Kota Bandar Lampung sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan sebaik-baiknya.
6. Seluruh dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
7. Terima kasih kepada Abang Dimas Afran Tanjung yang aku sayangi sudah membimbing aku dengan baik, menjadi abang yang selalu menjadikan keluarga prioritas nomor satu.
8. Terima kasih banyak untuk untuk Ajeng Indah Putri Anggraini yang sudah selalu ada buat aku sebagai adikmu satu-satunya, menemani aku sampai ketitik yang sekarang ini, aku sangat beruntung bisa dilahirkan dari satu Rahim yang sama yaitu Ibu/ Mamak kita Dina Artati, terima kasih sudah menjadi wanita kuat nomor dua dikeluarga kita.
9. Terima kasih sahabatku, Ahmad Lutfi Sanusi, M. Jefri Syaiful, Muhammad Zulfa, Galang Dwi Putra dan Petrus Roy Sirmamata Saragih walau beda kota beda wilayah kita selalu berkomunikasi dengan baik. Kalian berlima kawan terbaik yang aku temui selama hidup yang telah aku lalui.
10. Terima kasih untuk Imelta Lena, Putri Shinta Utami, dan Elisa Fitriani, telah menemani dan memberikan selalu semangat pada saat proses penulisan skripsi selama ini.
11. Terima kasih untuk kawan seperjuanganku dikampus, Reynaldo Maulana, Hayatami, Alek, Bangkit Agung semoga ini adalah langkah kita untuk menemukan langkah selanjutnya untuk menjalani hidup.
12. Terima kasih untuk keluarga besar HMI Komisariat Sosial Politik Universitas Lampung telah memberikan banyak ilmu, dan pengalaman organisasi yang tidak ternilai.

13. Terima kasih untuk seluruh kawan-kawan yang mungkin tidak sempat saya sebutkan satu-satu telah memberikan pengalaman pribadi yang sangat berharga.

Bandar Lampung, Maret 2022

Defri Fahlepi Amin

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR SINGKATAN	vii
1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	15
1.3 Tujuan Penelitian	15
1.4 Kegunaan Penelitian	16
II. TINJAUAN PUSTAKA	17
2.1 Konsep Persepsi.....	17
2.1.1 Pengertian persepsi.....	17
2.1.2 Proses Terjadinya Persepsi	19
2.2 Konsep Sikap.....	22
2.2.1 Pengertian Sikap	22
2.2.2 Tindakan.....	23
2.2.3 Ciri-ciri Sikap	24
2.2.4 Fungsi Sikap	25
2.2.5 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Sikap.....	26
2.3 Konsep Perilaku.....	27
2.3.1 Pengertian Perilaku	27
2.3.2 Perilaku Pemilih.....	28
2.4 Partai Politik	31
2.4.1 Pengertian Partai Politik.....	31
2.4.2 Tata Kelola Partai Politik	34
2.4.3 Fungsi dan Tujuan Partai Politik.....	38
2.4.4 Partai Semu.....	41

2.5	Kerangka Pikir	43
III.	METODOLOGI PENELITIAN	45
3.1	Metode Penelitian	45
3.2	Fokus Penelitian.....	47
3.3	Lokasi Penelitian.....	49
3.4	Jenis dan Sumber Data	50
3.5	Teknik Pengumpulan Data	50
3.6	Teknik Pengolaan Data	52
3.7	Teknik Analisis Data.....	52
IV.	GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	56
4.1	Gambaran Umum Kota Bandar Lampung.....	56
4.1.1	Sejarah Kota Bandar Lampung	56
4.1.2	Visi dan Misi Kota Bandar Lampung.....	57
4.1.3	Geografis Kota Bandar Lampung	58
4.1.4	Topografi Kota Bandar Lampung	60
4.1.5	Pertumbuhan Penduduk.....	61
4.2	Partai Politik dan Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung.....	62
4.2.1	Partai Peserta Pemilu Kota Bandar Lampung Tahun 2019	62
4.2.2	Data Partisipasi Pemilu Kota Bandar Lampung Tahun 2020	63
4.3	Latar Belakang Organisasi Masyarakat Kota Bandar Lampung	65
4.3.1	Muhammadiyah Kota Bandar Lampung	65
4.3.2	Pengurus Cabang Nadhatul Ulama Kota Bandar Lampung	68
4.3.3	Korp Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Provinsi Lampung	70
4.3.4	Komite Nasioal Pemuda Indonesia Kota Bandar Lampung	75
4.3.5	Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Kota Bandar Lampung	78
4.3.6	Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kota Bandar Lampung	82
4.3.7	Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Provinsi Lampung.....	86
4.3.8	Aliansi Jurnalis Independen.....	88
4.3.9	Persatuan Wartawan Indonesia	91
4.3.10.	Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat	94
4.3.11.	Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia	94
4.3.12.	Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia	97
4.3.13.	Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia	100

4.3.14 Pergerakan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia	104
4.3.15 Tokoh Adat Lampung Saibatin	108
4.3.16 Tokoh Adat Lampung Pepadun	110
V. HASIL DAN PEMBAHASAN	113
5.1 Hasil Penelitian	113
5.1.1 Persepsi Tokoh Masyarakat Kepada Partai Politik	114
5.1.2 Sikap Partai Politik Kepada Masyarakat	122
5.1.3 Perilaku Partai Politik Kepada Masyarakat	128
5.2 Pembahasan	136
5.2.1 Persepsi Tokoh Masyarakat Terhadap Partai Politik.....	138
5.2.2 Sikap Tokoh Masyarakat Kepada Partai Politik	141
5.2.3 Perilaku Tokoh Masyarakat Kepada Partai Politik	147
5.2.4 Langkah-Langkah Memperbaiki Parpol Oleh Organisasi Masyarakat	150
VI. SIMPULAN DAN SARAN.....	153
6.1 Simpulan	153
6.2. Saran	154
DAFTAR PUSTAKA	156
L A M P I R A N	159

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Hasil survey tentang kepercayaan masyarakat kepada partai politik.....	9
2. Presentase Suara Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Umum.....	10
3. Daftar Informan Penelitian.....	55
4. Wilayah Administrasi Kota Bandar Lampung.....	59
5. Jumlah Penduduk Kota Bandar Lampung 2020.....	62
6. Partai Politik dan Jumlah Kursi Yang diduduki.....	63
7. Daftar Pemilih Tetap Kota Bandar Lampung Tahun 2020.....	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Pikir.....	44
2. Peta Administrasi Kota Bandar Lampung.....	60
3. Struktur Organisasi Pengurus Muhammadiyah Bandar Lampung.....	66
4. Lambang Muhammadiyah.....	67
5. Struktur Organisasi PCNU Kota Bandar Lampung.....	69
6. Lambang Nadhatul Ulama.....	69
7. Struktur Presidium Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Provinsi Lampung.....	73
8. Lambang Himpunan Mahasiswa Islam.....	74
9. Struktur Organisasi KNPI Kota Bandar Lampung.....	76
10. Lambang Komite Nasional Pemuda Indonesia.....	77
11. Struktur Organisasi Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Kota Bandar Lampung.....	81
12. Lambang Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia.....	81
13. Struktur Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kota Bandar Lampung....	84
14. Lambang Himpunan Pengusaha Muda Indonesia.....	85
15. Struktur Organisasi WALHI Lampung.....	87
16. Lambang Wahana Lingkungan Hidup Indonesia.....	88
17. Struktur Aliansi Jurnalis Independen.....	90
18. Lambang Alian Jurnalis Independen.....	90
19. Struktur Persatuan Wartawan Indonesia.....	92
20. Lambang Persatuan Wartawan Indonesia.....	93
21. Struktur Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Bandar Lampung.....	96
22. Lambang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia.....	96

23. Struktur Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia PD Kota Bandar Lampung.....	98
24. Lambang Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia.....	99
25. Struktur Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Bandar Lampung .	102
26. Lambang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia	102
27. Struktur Organisasi Pergerakan Mahasiswa Katolik.....	105
28. Lambang Pergerakan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia	106
29. Lambang Siger Lampung Saibatin.....	119
30. Lambang Siger Lampung Pepadun.....	111

DAFTAR SINGKATAN

AJI	: Aliansi Jurnalis Independen
BPC	: Badan Pengurus Cabang
DPW	: Dewan Perwakilan Daerah
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
GMKI	: Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia
GMNI	: Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia
KAMMI	: Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia
HIPMI	: Himpunan Pengusaha Muda Indonesia
JPPR	: Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat atau disingkat
NU	: Nadhatul Ulama
KAHMI	: Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam
KNPI	: Komite Nasional Pemuda Indonesia
KPUD	: Komisi Pemilihan Umum Daerah
NASDEM	: Nasional Demokrat
ORMAS	: Organisasi Masyarakat
PAN	: Partai Amanat Nasional
PC	: Pengurus Cabang
PCNU	: Pengurus Cabang Nadhatul Ulama
PDIP	: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
PMII	: Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia
PMKRI	: Pengurus Pergerakan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia
PWI	: Persatuan Wartawan Indonesia
WALHI	: Wahana Lingkungan Hidup

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan sebuah negara yang menganut sistem politik demokrasi, yang dimana sistem pemerintahannya dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Ciri sebuah negara demokrasi adalah seberapa besar keterkaitan masyarakat dalam perencanaan maupun pelaksanaan pemilihan umum. Sebab partisipasi politik masyarakat (pemilih) merupakan landasan yang sangat penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi. Dalam hubungan dengan demokrasi, partisipasi politik berpengaruh terhadap jalannya suatu pemerintahan.

Semua golongan masyarakat berhak untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum. Pemilihan umum dapat terlaksana apabila terdapat organisasi-organisasi terbentuk. Organisasi politik inilah yang disebut sebagai partai politik yang merupakan sebuah jembatan antara negara dengan masyarakat. Negara pasti sangat memerlukan masyarakat agar tau bagaimana kebijakan yang semestinya dibuat. Masyarakat merupakan tiang utama dari sebuah terjadinya demokrasi yang baik. Masyarakat juga memerlukan Negara agar kepentingannya dapat diakomodasi.

Partai politik merupakan organisasi yang mana berfungsi sebagai sarana menyalurkan aspirasi masyarakat dan sebagai wakil rakyat didalam pemerintahan. Kegiatan partai politik yaitu berkerja sama dengan masyarakat dalam mengawasi sistem pemerintahan yang berjalan. Hal ini sejalan dengan pendapat Sigmund Neumann (dalam (Budiarjo, 2008) yang mendefinisikan Partai Politik sebagai organisasi dari aktivis-aktivis politik

yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda.

Dengan begitu maka peran dan partisipasi masyarakat sangatlah penting guna memajukan kehidupan pemerintahan dan kehidupan bangsa. Partai politik dapat dikatakan berhasil apabila partai politik dapat dekat dengan masyarakat sekaligus memiliki kemampuan untuk berada dalam lingkaran kekuasaan agar dapat mengarahkan kebijakan negara sesuai dengan kehendak masyarakat. Jadi keberhasilan partai politik semata tidak hanya memenangkan pemilihan umum, namun juga mampu menjalin kedekatan dengan masyarakat.

Tapi pada orientasinya ideologisnya, partai politik yang sejatinya membawa sebuah perubahan yang bermakna melainkan sekarang menjadi cerminan yang tidak baik bagi masyarakat. Sekarang ini, keberadaan masyarakat tidak sepenuhnya didukung oleh masyarakat. Banyak sebuah bukti pemberitaan mengenai kinerja birokrasi ataupun lembaga perwakilan rakyat serta penelitian, yang berkaitan dengan krisis kepercayaan masyarakat terhadap partai politik. Dengan demikian bahwa hal ini dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik, serta membawa pengaruh yang cukup signifikan pada sudut pandang masyarakat terhadap partai politik.

Namun saat ini kita rasakan partai politik telah mulai kehilangan arah dan tujuannya. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa tujuan sederhana dari setiap partai politik adalah untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan seperti yang dikatakan oleh Carl J. Friedrich ataupun pendapat dari La Palombara dan Anderson. Pada intinya mereka mengatakan bahwa partai politik merupakan sarana untuk menempatkan wakil-wakilnya di pemerintahan melalui mekanisme pemilu. Namun, realitas yang kita temui adalah terkadang partai politik lupa akan fungsinya karena terlalu asik dengan tujuan pragmatismenya tersebut. Menurut Kuskridho, Politik kartel

adalah politik di mana partai dan aktivitasnya tidak lagi mengusung kepentingan konstituen atau kepentingan publik, tetapi mengurus diri sendiri dan politik menjadi profesi dalam dirinya.

Kaburnya ideologi partai diakibatkan kuatnya iklim kompetisi antarpartai sehingga membuat para aktor politik begitu mudahnya untuk terjebak dalam politik kartel. Adanya pragmatisme politik yang merupakan salah satu ciri dari politik kartel membuat partai bersedia untuk menghalalkan segala cara untuk memperoleh kekuasaan. Pragmatisme sebagai orientasi jangka pendek dari para aktor politik untuk dapat memenangkan persaingan politik.

Politik kartel yang jamak dilakukan oleh partai politik dewasa ini mengakibatkan munculnya berbagai macam problem, di antaranya:

1. Lemahnya ideologi partai politik.

Ideologi dalam arti fungsional, mempunyai dua tipologi dengan yakni ideologi yang doktriner dan ideologi yang pragmaris. Suatu ideologi digolongkan sebagai doktriner apabila ajaran-ajaran yang terkandung di dalamnya itu dirumuskan secara sistematis dan terinci dengan jelas, didoktrinasikan kepada warga masyarakat, dan pelaksanaannya diawasi secara ketat oleh aparat partai atau oleh aparat pemerintah. Dan contoh dari ideologi doktriner ini adalah ideologi Islam dan ideologi Komunisme.

Sedangkan ideologi digolongkan sebagai ideologi pragmaris jika ajaran-ajaran yang terkandung dalam ideologi tersebut tidak dirumuskan secara sistematis dan terinci, melainkan dirumuskan secara umum (prinsip-prinsipnya saja). Dalam hal ini, ideologi itu tidak didoktrinasikan, tetapi disosialisasikan secara fungsional melalui kehidupan keluarga, sistem pendidikan, sistem ekonomi, kehidupan agama dan sistem sosial.

2. Lemahnya sistem rekrutmen dan pola kaderisasi anggota partai politik.

Lemahnya sistem rekrutmen dan pola kaderisasi anggota partai politik memang tak pernah berhenti menjadi isu yang selalu hangat diperbincangkan di tengah maraknya fenomena "naturalisasi" kader partai politik dari satu partai ke partai lain. Ini menandakan bahwa lemahnya sistem rekrutmen dan pola kaderisasi tersebut masih cukup memprihatinkan.

Jika ditelusuri lebih dalam, maka kita akan menemukan garis merah antarluntarnya ideologi partai politik dengan permasalahan ini. Idealnya, jika sistem rekrutmen dan pola kaderisasi kader dilakukan dengan baik oleh setiap partai politik maka kita tidak akan menemukan lagi fenomena "berkhianat" dari partai politik asalnya. Karena partai politik yang berfungsi sebagai wadah candradimuka yang digunakan untuk menempa dan menggembleng para kadernya untuk kemudian diproyeksikan sebagai pengisi jabatan-jabatan politik di pemerintahan telah mempunyai keterikatan emosional dan ideologi dengan para kadernya tersebut.

Sehingga dapat dikatakan bahwa fenomena "naturalisasi" tersebut telah menunjukkan bahwa partai politik kita telah mengalami apa yang disebut dengan disfungsi dalam rekrutmen politik dan pola kaderisasi dan gagal dalam menanamkan ideologi partai kepada para kadernya.

3. Krisis fundraising (pengumpulan dana) partai politik.

Uang dalam politik adalah sebuah keharusan. Ibarat makhluk hidup, uang merupakan nadinya politik. Ia merupakan suatu keniscayaan karena tanpa uang politik tidak akan berkembang dan pada akhirnya mati. Tetapi politik uang (money politics) adalah suatu yang harus dijauhi dari dunia politik karena hal tersebut bisa menyebabkan pengaruh yang tidak wajar (undue influence) bagi kehidupan bernegara

dan membahayakan dan merusak citra dari demokrasi yang telah dibangun dengan susah payah.

Akan tetapi, dalam kenyataannya dua aspek ini sering tidak dipahami dan disalahartikan oleh elite dan pengurus partai politik. Akibatnya cara penggalangan dan pengelolaan keuangan di partai politik sering terlihat tidak wajar, tertutup, dan diwarnai berbagai macam penyimpangan di sana-sini. Permasalahan yang menyangkut fundraising (pengumpulan dana) merupakan salah satu penyebab munculnya berbagai macam permasalahan yang dihadapi oleh partai politik.

Pada sebuah partai politik, tersedianya sumber dana yang banyak dan lancar merupakan suatu keharusan yang tidak dapat ditawar-tawar. Tidak dapat dipungkiri bahwa partai politik membutuhkan dana untuk tetap survive di arena politik. Ketika sebuah partai menghadapi krisis dalam hal pendanaan maka kemungkinan segala macam cara akan dilakukan termasuk dengan menggadaikan ideologi partai sehingga berubah menjadi partai yang pragmatis.

Dengan adanya kelemahan partai politik yang kian hari semakin tidak memiliki arah dan tujuan, membuat menimbulkan fenomena baru yang dimana masyarakat akhirnya memilih untuk tidak mempercayai partai politik, dikarenakan banyaknya para elite politik yang hanya mencari keuntungan pribadi untuk diri sendiri ataupun untuk kepentingan partai politik. Dalam hal ini bahwa kepercayaan partai politik saat ini menjadi keraguan dari beberapa masyarakat saat ini, pada dasarnya jika masyarakat dapat memberikan kepercayaan kepada partai politik di negara Indonesia maka sistem negara demokrasi akan terus berjalan dengan baik tanpa adanya kesenjangan masyarakat dengan partai politik.

Partai politik dinegara Indonesia merupakan wadah bagi masyarakat ,jembatan bagi semua kalangan masyarakat kepada pemerintahan, namun pada kenyataannya bahwa ilangnya ideologi masyarakat yang hilang kepada

partai politik membuat reputasi partai politik kian hari menurun dimata masyarakat. Lampung salah satunya merupakan tempat yang banyak mengalami penurunan tingkat kepercayaan masyarakat kepada partai politik, ini merupakan salah satu permasalahan yang sedang dihadapi partai politik saat ini. Kelemahan dari ketidakpercayaan masyarakat di Provinsi Lampung merupakan sudah menjadi permasalahan yang sudah lama yang ada sampai saat ini karena mungkin masyarakat Lampung pastinya memiliki landasan mengapa tidak memiliki kepercayaan kepada partai politi.

Fenomena ini pun akhirnya terjadi di Provinsi Lampung yang sebagian masyarakat ada yang tidak percaya dengan partai politik saat ini Apalagi dengan daya ingatan masyarakat kepada partai politik yang sebagian besar partai dianggap buruk oleh masyarakat dikarenakan kinerja yang kian hari kian menurun. Ini merupakan beberapa fenomena kasus tindak korupsi kepala daerah yang terjadi di Provinsi Lampung. Seperti kebanyakan kasus korupsi yang dilakukan elite politik sampai saat ini, ada beberapa kasus korupsi yang melibatkan beberapa kader partai politik sebagai berikut. Beberapa contoh mengapa sebagian masyarakat Provinsi Lampung akhirnya tidak percaya kepada partai politik dikarenakan adanya beberapa elite politik seperti kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. seperti :

1. Operasi Tangkap Tangan Zainudin Hasan yang merupakan kepala daerah Lampung Selatan dengan nilai kasus sebanyak lima ratus lima puluh juta rupiah yang merupakan keanggotaan partai politik amanat nasional (PAN).
2. Operasi Tangkap Tangan Agung Mangku Ilmu Negara yang merupakan kepala daerah Lampung Utara dengan nilai kasus sebanyak enam ratus juta rupiah yang merupakan keanggotaan partai politik nasional demokrat (NASDEM).
3. Operasi Tangkap Tangan Mustofa yang merupakan kepala daerah Lampung Selatan dengan nilai kasus satu milyar seratus enam puluh juta rupiah yang merupakan keanggotan partai politik nasional demokrat (NASDEM).

4. Operasi Tangkap Tangan Khamami yang merupakan kepala daerah Mesuji Lampung dengan nilai dua miliar empat ratus tiga puluh juta rupiah yang merupakan keanggotaan partai politik Demokrat.
5. Suap Dana Bambang Kurniawan yang merupakan kepala daerah Tanggamus Lampung dengan nilai sembilan ratus empat puluh tiga juta rupiah yang merupakan keanggotaan partai demokrasi Indonesia perjuangan (PDIP)

Melihat data kasus korupsi kepala daerah di Provinsi Lampung bahwa tingkat korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah, tentu masyarakat pasti menilai bagaimana kinerja para elite tersebut dan menyakutkan partai politik sebagai wadah kesalahan partai politik yang menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat kepada partai politik yang mendukung kepala-kepala daerah tersebut. Dengan begitu lembaga-lembaga diluar pemerintah sudah memprediksi apa yang menjadi faktor utama dalam ketidakpercayaan masyarakat kian semakin meninggi dikarenakan kinerja para petinggi legislatif kian menurun.

Apalagi dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin canggih dan terbuka akan mempermudah masyarakat untuk mendapatkan keseluruhan informasi. Kondisi ini akan sangat membuat masyarakat lebih mudah memengaruhi pandangan masyarakat terhadap partai politik, dikarenakan semakin cepat dan terbukanya masyarakat terhadap akses informasi publik seperti internet dan media sosial maka semakin mempengaruhi cara berfikir masyarakat.

Demokrasi suatu negara akan semakin terlihat jika pada setiap pemilihan umum terjadi, setiap golongan masyarakat berperan penuh dalam pemilihan umum. Dengan berkembangnya jaman membuat jalannya pemilu dari tahun ketahun kian berubah, karena dukungan teknologi yang dari ketahun memberi efek yang sangat baik bagi kemajuan masyarakat. Dan semakin berkembangnya zaman maka pemikiran masyarakat pula akan terus-menerus berkembang. Masyarakat tentu menyadari bahwa tujuan utama dari

setiap partai politik yaitu untuk mempereoleh dan mempertahankan suatu kekuasaan.

Partai politik pula kan melakukan berbagai cara untuk memenangkan pemilihan umum. Padahal, disamping itu masyarakat juga akan menilai bagaimana kinerja partai politik dan juga menilai dari anggota legislatif yang telah terpilih menang sebagai perwakilan rakyat dilembaga pemerintahan apakah telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, atau malah sebaliknya yaitu dengan menyengsarakan masyarakatnya dan tidak berpihak kepada masyarakat melainkan mementingkan kepentingan pribadi yang mengatasnamakan rakyat. Hal itu tentu mempengaruhi persepsi dan partisipasi masyarakat pada pemilihan umum yang terjadi.

Banyaknya cara-cara yang dilakukan oleh partai politik dalam memenangkan pemilihan umum tentu tidak akan selalu berdampak positif, bahkan akan menimbulkan banyak dampak negatif yang timbul dapat membuat masyarakat malah akan mengalami bertambahnya sebuah krisis kepercayaan kepada partai politik. Hal ini membuat setiap pemilihan umum diberbagai tempat angka golongan putih (GOLPUT) selalu mendapatkan angka yang cukup tinggi, padahal seharusnya angka golongan putih harus bias ditekan seminimal mungkin. Adapun hasil dari lembaga-lembaga survey dalam menilai tingkat kepercayaan masyarakat kepada partai politik saat ini.

Berikut merupakan hasil survey tentang kepercayaan masyarakat terhadap partai politik.

Tabel 1. Hasil survey tentang kepercayaan masyarakat kepada partai politik tahun 2018 dan 2021

No	Nama Lembaga	Hasil Survey	
		P	T.P
1.	Lembaga Survey Indonesia	47%	53%
2.	Poltracking Indonesia	48%	52%

3.	Indonesia Research And survey	25%	75%
4.	Lembaga Riset Pusat Polling	55.2%	46.8%
5.	Indikator Politik Indonesia	65%	35%
6.	Jaringan Suara Indonesia	35.3%	64.7%
7.	Media Survey Nasional	56.9%	43.1%
8.	Pusat Riset Indonesia	47.8%	42.2%
9.	Citra Publik	45.8%	32.5%
10.	Indo data	50.1%	49.9%

Sumber : Ikatan Surveyor Indonesia, Survei LSI Soal Kepercayaan Publik: DPR dan Parpol Urutan Paling Buncit

Ini merupakan beberapa survey dari lembaga yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Indonesia yang memberikan survey dalam kepercayaan masyarakat kepada partai politik. Dengan begitu bisa dilihat bahwa partai politik masih menjadi pusat perhatian bagi para lembaga-lembaga non pemerintahan dalam partisipasi masyarakat yang kian hari menurun dalam kepercayaannya kepada partai politik. Adapun presentasi suara masyarakat dalam keikutsertaannya dalam memberikan aspirasi suaranya dalam Pemilihan umum. Karena masyarakat merupakan suara partisipasi paling penting dalam berjalannya pemilihan Umum.

Berikut merupakan presentase suara partisipasi masyarakat dalam Pemilu dari Tahun 2004-2019.

Tabel 2. Presentase Suara Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Umum Tahun 2004-2019

No	Periode	Presentase Suara Partisipasi	Presentase Suara Golput
1.	2004	78.2 %	21.8 %
2.	2009	76.6 %	23.4 %
3.	2014	71.7 %	28.3 %
4.	2019	65.0 %	35.0 %

Sumber : Lembaga survei: Jumlah golput di Pilpres 2019 paling rendah sejak 2004

Dilihat dari pemilihan umum tahun 2004-2019. Bahwa pada tahun 2004 tingkat kepercayaan masyarakat dilihat dari suara partisipasi yaitu 78.2 persen. Pada pemilihan umum tahun 2009 yaitu 76.6 persen. Pada pemilihan umum 2014 yaitu 71.7 persen. Dan pada tahun 2019 menurun hingga 65 persen. Ini menunjukan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat kepada partai politik semakin hari semakin menurun yang berarti pengguna angka golongan putih kian semakin meninggi. Masyarakat tidak menggunakan hak pilih menjadi sebuah fenomena baru dan bentuk pelepasan atas penat nya persoalan politik yang tidak sanggup diatasi oleh pemerintah serta, daya ingat masyarakat tentang persoalan politik yang kian hari kian tidak sesuai yang diinginkan oleh masyarakat.

Adapun penelian sejenis yang membahas tentang fenomena partai politik saat ini sebagai berikut:

1. "Pemiludan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Pada Pemilihan Anggota Legislatif Dan Pemilihan Presiden Dan Calon Wakil Presiden Di Kabupaten Minahasa Tahun 2014)". Hubungan nya bahwa masyarakat memiliki partisipasi yang besar dalam pemilihan umum yang terjadi namun fenomena yang terjadi yaitu melihat partisipasi masyarakat dalam mengikuti pemilihan umum yang terjadi, Kerangka konsep menggunakankesempatan bagi partai oposisi dan rakyat untuk menjalankan mekanisme check and balances terhadap partai yang berkuasa (ruling party). Metodologi yang di pakai ada dua yaitu (1). Desk study untuk mengkaji terhadap berbagai published material (berita media massa dan literatur) yang terkait dengan proses penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilu presiden serta wakil presiden 2014. Baik yang berupa teori pustaka, statistik, hasil pengawasan, dokumen resmi dari lembaga lain, hasil penelitian lembaga lain, dan lain-lain. Metode ini penting untuk memberikan perspektif serta datadata sekunder dalam memahami partisipasi masyarakat dalam pemilu.

Selain itu metode ini bisa memberikan peta dasar tentang partisipasi poltik masyarakat dalam pemilu di Kabupaten Minahasa. Hasil desk

study ini akan dikaji dengan menggunakan analisa framing dan analisa isi. (2).Field Study dimaksudkan untuk mengumpulkan data primer melalui wawancara mendalam (indepth interview) dengan institusi dan stakeholders yang relevan. Metode ini memiliki kelebihan yaitu pada kemampuannya untuk menggali detail persoalan yang tidak terangkum dalam ataupun mengingat jalinan kompleksitas persoalan yang ada dalam pemilu, maka hampir tidak memungkinkan bagi studi ini untuk mengcover secara detail aspek-aspek partisipasi masyarakat dalam pemilu.(Liando, D. M., (2017). Ada persamaan dengan penelitian ini yaitu adalah mengetahui bagaimana persepsi masyarakat kepada partai politik saat ini. Perbedaannya yaitu dimana disini yaitu penelitian ini lebih dalam mengetahui apa faktor-faktor yang membuat masyarakat memiliki persepsi berbeda-beda kepada partai politik.

2. “Persepsi Masyarakat Mengenai Partai Politik di Kelurahan Penyengat Kota Tanjung Pinang.” Hubungan penelitian ini membahas tentang Persepsi buruk publik terhadap politisi disebabkan makin terbukanya masyarakat terhadap akses informasi politik seiring maraknya Internet dan media sosial. Kerangka Konsep yang digunakan yaitu Proses seleksi terjadi pada saat seseorang memperoleh informasi, maka akan berlangsung proses penyeleksian pesan tentang mana pesan yang dianggap penting dan tidak penting. Metodologi yang dipakai yaitu konsep, defenisi, dan proporsi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep.

Hasil Penelitian bahwa saat ini terjadinya krisis kepercayaan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan disebabkan lemahnya moral dan etika elite politik yang berdasarkan pancasila (Said, Riduan 2017). Kelebihan dari metode ini yaitu memberikan segala informasi yang diperlukan sesuai konsep yang telah diterapkan. Kelemahan dari metode ini yaitu tidak dapat mendapatkan data yang konkrit dalam

bentuk angka presentase. Persamaan dengan penelitian ini yaitu berkaitan dengan bagaimana persepsi masyarakat kepada partai politik secara fisik dengan masyarakat. Perbedaannya yaitu penelitian ini membahas bagaimana tanggapan para ketua lembaga-lembaga diluar pemerintah tentang persepsi masyarakat saat ini kepada partai politik.

3. “Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten Sitaro”. Bahwa dalam hubungannya menjelaskan tentang pengetahuan politik dan bagaimana partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum kepala daerah. Kerangka konsep menggunakan berbagai persoalan politik dengan pihak lain, ikut serta melakukan berbagai aksi dan gerakan, bergabung dengan partai-partai atau organisasi-organisasi independent, ikut serta dalam kampanye penyadaran, memberikan penyadaran, memberikan pelayanan terhadap lingkungan dengan kemampuannya sendiri. Metodologi yang dipakai pendekatan kualitatif menguji konteks secara keseluruhan, interaksi bagaimana masyarakat menanggapi partisipasi politik dalam pemilihan umum yang sedang berlangsung.

Hasil penelitian yaitu Peran media massa pada elemen dari sebuah tahapan demokrasi yaitu disaat media menempatkan perannya dalam memberikan pendidikan politik bagi masyarakat. Isi media dalam memberikan informasi secara luas mengenai Pilkada juga mendorong terciptanya kesadaran orang untuk menentukan pilihannya. Rendahnya intensitas mengenai kampanye peristiwa politik dan penyelenggaraan Pilkada mendorong menurunnya informasi yang diterima sehingga berakibat pada rendahnya keterlibatan masyarakat didalam pilkada. (Muhaling Arther, 2014). Kelebihannya yaitu bagaimana mengajak masyarakat untuk sadar dalam berpartisipasi politik dalam pemilihan umum kepala daerah. Persamaan penelitian yaitu membahas secara umum tentang membahas bagaimana keadaan partai politik saat ini. Perbedaannya penelitian yaitu membahas tentang faktor pendukung tingginya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum kepala daerah.

4. “Variabel-variabel yang Mempengaruhi Rendahnya Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2008 .” Menjelaskan rangkaian fenomena rendahnya partisipasi politik masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya di Kota Padang, rendahnya keikutsertaan masyarakat Padang dalam mencoblos dalam pemilu Kepala Daerah Wali Kota Padang tahun 2008. Metodologi yang digunakan menganalisis data penelitian ini proses awal menganalisa data dilakukan dengan menyusun secara sistematis data mentah (yang ada dalam kuisioner) dengan kode angka yang telah dibuat, kemudian dilanjutkan pemindahan data ke komputer dengan menggunakan analisis statistik dengan program komputer “Statistical Package For Social Science 15.0” atau SPSS 15.0. Analisis terhadap hasil pengolahan data (data output) berbentuk analisis deskriptif.

Kesimpulannya bahwa rendahnya sosialisasi politik merupakan variabel yang kuantitas pelaksanaannya terkecil dilakukan oleh KPUD kota Padang. Sementara kesadaran politik, merupakan variabel yang berada pada posisi sedang tetapi cenderung mendekati lemah. (Hendrick Doni, 2008). Kelebihan dari penelitian ini yaitu menganalisa data menggunakan kuisioner sesuai deskripsi yang akan ditanyakan kepada masyarakat. Kekurangan dari penelitian ini yaitu tidak membahas tentang perilaku masyarakat secara jelas. Persamaan penelitian ini yaitu fenomena krisis kepercayaan masyarakat kepada partai politik. Perbedaan penelitian ini yaitu penelitian ini menggunakan data menyusun secara sistematis dengan kode angka atau Statistical Package For Social Science.

5. “Uji Validitas dan Reliabilitas Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Kota Padang.” Menjelaskan rangkaian fenomena kontrol masyarakat terhadap pemimpin atau pemerintahan dan tinggi rendahnya partisipasi politik dapat diamati dari beberapa faktor seperti tingkat kepercayaan masyarakat dengan para kandidat pejabat maupun dengan partai

politiknya, kesadaran masyarakat tentang kewajibannya dalam memberikan suara, dan pengetahuan politik masyarakat. Kerangka konsep yang digunakan Tinggi rendahnya partisipasi warga negara yang ikut serta dalam proses politik dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain adalah kesadaran politik dan kepercayaan terhadap pemerintah. Metodologi yang digunakan adalah dengan merumuskan pengetahuan politik dalam bentuk partisipasi politik yang melibatkan seluruh lapisan penduduk kota padang dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif dalam bentuk kuisoner.

Kesimpulan yang dapat diambil kuisoner adalah salah satu teknik pengumpulan data untuk menganalisis sikap, kepercayaan, pengetahuan dan karakteristik beberapa orang di dalam suatu lingkungan yang mempengaruhi suatu sistem yang sudah ada. Kuisoner berupa daftar pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada orang yang disebut responden. (Amanda Livia, Yanuar Ferra, Devianto Dodi., 2019). Kelebihan dari penelitian ini membahas tentang faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam proses politik. Persamaan dari penelitian ini yaitu menentukan sikap masyarakat dalam kesadaran berpolitik. Perbedaan dari penelitian ini adalah tidak membahas tentang kepercayaan masyarakat kepada partai politik.

Melihat fenomena tersebut, peneliti tertarik untuk menganalisis serta mengungkapkan apakah benar masyarakat sekarang ini masih mengalami krisis kepercayaan kepada partai politik dan para elite politik. Peneliti ingin mengungkap fenomena tersebut dengan melihat sejauh manakah kepercayaan masyarakat terhadap fungsi-fungsi para elite politik yang hampir tidak dipercayai oleh masyarakat dikarenakan banyaknya kasus yang menjerat para elite politik yang kian hari semakin membuat masyarakat ragu akan elite politik. Ini merupakan fenomena yang sudah sering terjadi di Lampung sebagai permasalahan yang terus berkembang dalam dunia politik sampai saat ini. Topik ini sangat penting karena dapat menjadi bahan acuan masyarakat dalam menilai bagaimana keadaan partai politik dan juga

sebagai revisi partai politik untuk dapat memperbaiki tingkat kepercayaan masyarakat kepada partai politik.

Pentingnya penelitian ini bagi ilmu pemerintahan yaitu sebagai bahan acuan pemerintah dalam menganalisa kembali faktor-faktor apa saja yang membuat masyarakat mengalami krisis kepercayaan kepada partai politik dan para elite politik saat ini. Karena masyarakat tidak menggunakan hak pilih menjadi sebuah fenomena yang sudah sering terjadi dan bentuk pelepasan atas penatnya persoalan politik yang tidak sanggup diatasi oleh pemerintah serta, daya ingat masyarakat tentang persoalan politik yang kian hari kian tidak sesuai yang diinginkan oleh masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengetahuan tokoh masyarakat terhadap partai politik di Kota Bandar Lampung?
2. Mengapa tokoh masyarakat tidak percaya kepada partai politik?
3. Apa faktor penyebabnya?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Pengetahuan tokoh masyarakat terhadap partai politik di Kota Bandar Lampung.
2. Mengetahui kepercayaan tokoh masyarakat terhadap partai politik di Kota Bandar Lampung.
3. Melihat faktor-faktor penyebab kepercayaan tokoh masyarakat terhadap partai politik di Kota Bandar Lampung.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis penelitian ini dibuat bertujuan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya, dalam bidang pengetahuan masyarakat, persepsi kelebihan, persepsi kelemahan masyarakat terhadap partai politik di Kota Bandar Lampung dan juga mengetahui kepercayaan tokoh masyarakat kepada partai politik
2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan Bagi partai politik, untuk melakukan perubahan dalam tujuan mengenai partai politik dan mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada partai politik.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Persepsi

2.1.1 Pengertian persepsi

Menurut Atkinson (1998:276) dalam Sari, C. D. P. (2017), Persepsi adalah penelitian bagaimana kita mengintegrasikan sensasi ke dalam *percepts* objek, dan bagaimana kita selanjutnya menggunakan *percepts* itu untuk mengenali dunia (*percepts* adalah hasil dari proses perseptual). Persepsi itu merupakan pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus yang diinderanya sehingga merupakan sesuatu yang berarti dan merupakan respon yang integrated dalam diri individu.

Menurut Rakhmat (2004:51) dalam (Hanif, A., Yusanto, F., & Aprianti, A. 2016) persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi memberikan makna pada stimulus inderawi, jadi hubungan sensasi dengan persepsi sudah jelas, sensasi adalah bagian dari persepsi.

Alat indra pada manusia terdiri dari lima indra, yaitu penglihatan, pendengaran, peraba, perasa dan penciuman. Masing-masing pancaindra dengan kegunaannya mempunyai fungsi sendiri-sendiri dan saling melengkapi. Alat indra membuat manusia untuk mudah dan cepat memahami lingkungan dan cepat untuk memberikan penilaian yang disebut dengan persepsi. Karena itu proses persepsi

tidak dapat lepas dari proses penginderaan, dan proses penginderaan merupakan proses pendahulu dari proses persepsi (Walgito. 2010:99) dalam Wijaya, J. P., Yanzi, H., & Nuralisa, Y. (2017)

Masyarakat hampir setiap hari pasti menonton berita di televisi, dengan adanya indra penglihatan, tentu masyarakat dapat melihat berbagai pemberitaan mengenai partai politik, yang kemudian akan menimbulkan suatu persepsi dalam setiap individu mengenai partai politik. Tidak hanya itu saja, dalam kegiatan kampanye yang dilakukan partai politik, masyarakat pasti mendengar apa saja janji-janji yang diucapkan partai politik kepada masyarakat, hal ini tentu saja membuat masyarakat dapat mendengar dan kemudian memberikan persepsi mengenai partai politik tersebut. Dalam persepsi, stimulus dapat datang dari luar dan dari diri individu itu sendiri.

Namun demikian sebagian besar stimulus datang dari luar individu yang bersangkutan. Karena persepsi merupakan aktivitas yang integrated dalam diri individu, maka apa yang ada dalam diri individu akan ikut aktif dalam persepsi. Dikarenakan dalam persepsi dapat dikemukakan karena perasaan, kemampuan berfikir, pengalaman-pengalaman individu tidak sama, maka dalam memersepsi sesuatu stimulus, hasil persepsi mungkin akan berbeda antara individu satu dengan individu lain. (Walgito. 2010:100) dalam Febrianto, A., Kamid, K., & Rohati, R. (2015)

Menurut Atkinson (1998:333) dalam Sari, C. D. P. (2017), penelitian tentang persepsi mengurus dua fungsi utama persepsi, yaitu lokalisasi, atau menentukan dimana letak suatu objek, dan pengenalan, menentukan apa objek tersebut. Untuk melokalisasi (menentukan lokasi) objek, kita terlebih dahulu harus mensegregasikan objek dan kemudian mengorganisasikan objek menjadi kelompok. Sedangkan fungsi pengenalan terdapat dua

proses, yaitu proses pengenalan *bottom up* didorong hanya oleh manusia dan proses pengenalan *top-down* didorong oleh pengetahuan dan harapan seseorang. Proses top down terletak dibalik efek konteks dalam persepsi karena konteks menentukan harapan perseptual, dan jika harapan ini dipenuhi, lebih sedikit informasi dari biasanya yang diperlukan untuk pengenalan (Atkinson, 1998:335) dalam Atkinson, R. G., Habibis, D., Easthope, H., & Goss, D. N. (2007)

Makna persepsi sosial juga sama dengan makna persepsi lainnya. Banyak hal yang dapat dimaknakan dari apa yang telah terlihat oleh mata, karena persepsi sosial tergantung dari mata orang yang mengamati, bahkan stimulus yang sederhana dapat mengejutkan dua orang dengan cara yang cukup berbeda. Hilton & von Hippel, 1990 (Myers, 2012:105) dalam Myers, V. H., (2012). Mengatakan bahwa pada saat informasi sosial dihadapkan pada berbagai interpretasi, maka prasangka menjadi penting. Proses menafsirkan juga mewarnai persepsi orang terhadap kita.

Ketika kita mengatakan sesuatu yang baik atau buruk mengenai orang lain, orang secara spontan cenderung mengasosiasikan trait tersebut. Situasi ini dapat kita lihat saat kita memberikan kesan terhadap satu sama lain. Kesan itu membawa kita untuk memberikan persepsi yang mana seringkali benar daripada salah. Semakin baik kita mengenal seseorang, semakin akurat kita membaca pikiran dan perasannya serta semakin kuat kita dalam memberikan persepsi terhadap orang itu. Bila kita sudah menyenangi seseorang, maka kita cenderung melihat sifat-sifat baik pada orang itu dan sebaliknya

2.1.2 Proses Terjadinya Persepsi

Bimo Walgito dalam bukunya Pengantar Psikologi Umum

(2010:102) dalam Walgito, B. (2004). Pengantar psikologi umum. menjelaskan proses terjadinya persepsi melalui tiga tahap sebagai berikut :

1. Tahap Kealaman (fisik)

Tahap kealaman disebut juga sebagai tahap fisik. Tahap kealaman adalah proses adanya objek yang menimbulkan stimulus dan rangsangan yang mengenai alat indera. Stimulus yang diterima oleh alat indera diteruskan oleh syaraf sensoris ke otak. Sebagai contoh, jika kita bertemu dengan orang yang berpenampilan rapi, maka kita cenderung memersepsikan orang tersebut sebagai orang baik, sopan dan menyenangkan.

2. Tahap Fisiologis

Pada tahap fisiologis, stimulus yang diterima oleh alat indera diteruskan oleh syaraf sensoris ke otak. Seperti timbulnya pertanyaan-pertanyaan. Tentang suatu hal karena adanya penangkapan dari indera yang menimbulkan rasa ingin tahu. Tahap ini berupa stimulus. Dalam hal ini stimulus memengaruhi seseorang dalam mencari tahu tentang hal-hal yang belum diketahuinya.

3. Tahap Psikologis

Tahap psikologis adalah proses di otak sebagai pusat kesadaran, sehingga individu menyadari apa yang dilihat, atau apa yang didengar, atau apa yang diraba. Dengan begitu berarti taraf terakhir dari proses persepsi ialah individu menyadari tentang misalnya apa yang dilihat, atau apa yang didengar, atau apa yang diraba, yaitu stimulus yang diterima melalui alat indera. Adanya tahap alam dan fisiologis menimbulkan kecenderungan psikologis dalam diri individu untuk tahu lebih dalam tentang apa yang

dipersepsikan.

2.1.3 Asesmen Metode Alternatif Penilaian

Pengukuran diperlukan untuk pengembangan keterampilan komunikasi antarpribadi. Informasi terkait keterampilan komunikasi dihimpun melalui pengukuran yang dilakukan secara presisi. Adanya evaluasi atas kompetensi komunikasi antarpribadi menjadi landasan diri memahami sejauh mana menguasai keterampilan komunikasi untuk kemudian melakukan pengembangan di area yang masih dinilai kurang. Menilik sejarahnya, pengukuran keterampilan sosial dapat diklasifikasikan pada observasi perilaku secara langsung (*direct behavioral observation*), skala peringkat perilaku (*behavior rating scales*), wawancara, metode sosiometri, laporan pribadi secara obyektif (*objective self-reports*), bermain peran (*role play*), dll (Merrel, 1994) dalam Rakhmawati, F. Y.(2020)

Asesmen personal dapat menjadi alternatif dalam melakukan pengukuran kualitas komunikasi antarpribadi. Istilah asesmen personal dapat dimaknai sebagai proses pengumpulan informasi diri, meliputi halhal yang disukai atau tidak disukai, hal yang dilakukan dengan baik, atau bagaimana diri bereaksi terhadap situasi tertentu. Asesmen personal mengandung refleksi pribadi atas level pengetahuan, keterampilan dan pemahaman diri pada bidang tertentu (Trujillo, 2009) dalam Rakhmawati, F. Y.(2020). Asesmen personal atas keterampilan diri telah digunakan dalam keseharian untuk mendasari proses pengambilan keputusan.

Misalnya seseorang memutuskan mendalami kursus bermain biola karena merasa ahli dalam bermain musik; seseorang memilih untuk tidak berkarir di jurusan ilmu sains karena merasa tidak ahli di bidang matematika; seorang perwira militer merasa yakin

memimpin misi berbahaya karena memiliki kepercayaan pada keberanian dan kepemimpinan diri; seorang pasien lansia menolak saran dokter karena berpikir paling tahu yang terbaik tentang kesehatannya. Asesmen personal memainkan peran yang cukup besar di sepanjang keputusan dalam hidup (Setterlund & Niedenthal dalam Rakhmawati, F. Y.2020)

2.2 Konsep Sikap

2.2.1 Pengertian Sikap

Pengertian sikap secara umum adalah suatu pikiran, kecenderungan dan perasaan seseorang untuk mengenal aspek-aspek tertentu pada lingkungan yang seringnya bersifat permanen karena sulit diubah. Komponen yang dimaksud adalah pengetahuan yang selama ini diperoleh semasa hidup, dimana sangat mempengaruhi perilaku saat bertindak. Pengertian sikap dijelaskan oleh Saifudin Azwar (2010: 3) dalam Seno, R. B. persepsi dan sikap (2020) sikap diartikan sebagai suatu reaksi atau respon yang muncul dari seorang individu terhadap objek yang kemudian memunculkan perilaku individu terhadap objek tersebut dengan cara-cara tertentu.

Gerungan (2004: 160) dalam Wicaksono, F., Nazaruddin, K., & Fuad, M. (2013) juga menguraikan pengertian sikap atau *attitude* sebagai suatu reaksi pandangan atau perasaan seorang individu terhadap objek tertentu. Walaupun objeknya sama, namun tidak semua individu mempunyai sikap yang sama, hal itu dapat dipengaruhi oleh keadaan individu, pengalaman, informasi dan kebutuhan masing-masing individu berbeda. Sikap seseorang terhadap objek akan membentuk perilaku individu terhadap objek. Sikap didefinisikan sebagai kecenderungan suka tidak suka kepada suatu objek sosial tertentu. Definisi sikap yang dikembangkan oleh menurut Noeng Muhadjir (1992: 80) dalam Hakim, L. (2012) bahwa

sikap ditinjau dari unsur-unsur pembentuknya dapat dibedakan menjadi tiga hal yaitu sikap yang transformatif, transaktif dan transinternal. Sikap yang transformatif merupakan sikap yang lebih bersifat psikomotorik atau kurang disadaribahwa sikap merupakan ekspresi seseorang pada sosial objek tertentu yang mempunyai kemungkinan rentangan dari suka sampai tak suka.

Menurut Mohadjir (1992:80) sikap ditinjau dari unsur-unsur pembentukannya dapat di bedakan menjadi tiga hal yaitu sikap transformatif, transaktif, transinternal. Sikap transformatif merupakan sikap yang lebih psikomotorik atau kurang disadari. Sikap transaksional merupakan sikap yang lebih mendasar pada kenyataan obyektif, sedangkan sikap transinternal merupakan sikap yang lebih pedomani oleh nilai-nilai hidup dalam (Hakim, 2012).

Ditinjau dari kategori sikap diatas, maka sikap setiap seseorang terhadap sesuatu objek tertentu dapat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dianut atau yang melatarbelakangi seseorang tersebut sebagai pengalaman hidupnya. Orang yang telah tertanam dan terkristal nilai-nilai tertentu dalam mental dan kepribadiannya, tentunya menghadapi respon sesuatu tersebut akan mewarnai oleh nilai-nilai yang diyakininya.

2.2.2 Tindakan

Suatu sikap belum otomatis terwujud dalam suatu tindakan. Untuk terwujudnya sikap agar menjadi suatu perbuatan nyata diperlukan faktor pendukung atau kondisi yang memungkinkan. Terbentuknya perilaku baru terutama pada orang dewasa yang dimulai pada domain kognitif. Dalam arti subjek dahulu tahu terhadap stimulus berupa materi atau objek diluarnya, sehingga menimbulkan pengetahuan baru pada subjek tersebut dan selanjutnya menimbulkan respon batin dalam membentuk sikap terhadap objek

yang diketahuinya.

Akhirnya objek atau rangsangan yang telah diketahui atau disadari sepenuhnya tersebut akan menimbulkan respon yang lebih jauh lagi berupa tindakan. Namun seseorang pula bertindak tanpa disadari oleh pengetahuan dan sikap, atau seseorang dapat bertindak langsung tanpa memakai stimulus terlebih dahulu. Baron dan Byrne (2002) dalam (Hakim, 2012) mendefinisikan sikap sebagai penilaian subyektif seseorang terhadap suatu objek.

Sikap adalah respons evaluative yang diarahkan seseorang terhadap orang, benda, peristiwa dan perilaku sebagai objek sikap. Sikap melibatkan kecenderungan respon yang bersifat preferensial. Sikap sebagai bentuk respon untuk menunjukkan ekspresi suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju, mendekati atau menghindari dan tertarik atau tidak tertarik terhadap objek sikap.

2.2.3 Ciri-ciri Sikap

Ciri-ciri sikap menurut Heri Purwanto (1998) dalam Dwiyanu, N. (2020)

1. Sikap bukan dibawa sejak lahir melainkan dibentuk atau dipelajari sepanjang perkembangan itu dalam hubungannya dengan obyeknya.
2. Sikap dapat berubah-ubah karena itu sikap dapat dipelajari dan sikap dapat berubah pada orang-orang bila terdapat keadaan-keadaan dan syarat-syarat tertentu yang mempermudah sikap pada orang itu.
3. Sikap tidak berdiri sendiri, tetapi senantiasa mempunyai hubungan tertentu terhadap suatu obyek. Dengan kata lain sikap itu terbentuk, dipelajari, atau berubah senantiasa berkenaan dengan suatu obyek tertentu yang dapat

dirumuskan dengan jelas.

4. Obyek sikap itu merupakan suatu hal tertentu tetapi dapat juga merupakan kumpulan dari hal-hal tersebut.

Sikap mempunyai segi-segi motivasi dan segi-segi perasaan, sifat alamiah yang membedakan sikap dan kecakapan- kecakapan atau pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki orang.

2.2.4 Fungsi Sikap

Menurut Katz (1964) dalam Dwiyana, N. (2020) sikap mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

1. Fungsi instrumental atau fungsi penyesuaian atau fungsi manfaat

Fungsi ini berkaitan dengan sarana dan tujuan. Orang memandang sejauh mana obyek sikap dapat digunakan sebagai sarana atau alat dalam rangka mencapai tujuan. Bila obyek sikap dapat membantu seseorang dalam mencapai tujuannya, maka orang akan bersifat positif terhadap obyek tersebut. Demikian sebaliknya bila obyek sikap menghambat pencapaian tujuan, maka orang akan bersikap negatif terhadap obyek sikap yang bersangkutan.

2. Fungsi pertahanan ego

Ini merupakan sikap yang diambil oleh seseorang demi untuk mempertahankan ego atau akunya. Sikap ini diambil oleh seseorang pada waktu orang yang bersangkutan terancam keadaan dirinya atau egonya.

3. Fungsi ekspresi nilai

Sikap yang ada pada diri seseorang merupakan jalan bagi individu untuk mengekspresikan nilai yang ada pada dirinya. Dengan mengekspresikan diri seseorang akan mendapatkan kepuasan dapat menunjukkan kepada dirinya.

Dengan individu mengambil sikap tertentu akan menggambarkan keadaan sistem nilai yang ada pada individu yang bersangkutan.

4. Fungsi pengetahuan

Individu mempunyai dorongan untuk ingin mengerti dengan pengalaman-pengalamannya. Ini berarti bila seseorang mempunyai sikap tertentu terhadap suatu obyek, menunjukkan tentang pengetahuan orang terhadap obyek sikap yang bersangkutan.

2.2.5 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Sikap

Menurut Azwar S (2011, p.30) dalam Filus, M., & Indrawati, E. S. (2013) faktor-faktor yang mempengaruhi sikap yaitu:

1. Pengalaman pribadi

Pengalaman pribadi dapat menjadi dasar pembentukan sikap apabila pengalaman tersebut meninggalkan kesan yang kuat. Sikap akan lebih mudah terbentuk apabila pengalaman pribadi tersebut terjadi dalam situasi yang melibatkan faktor emosional.

2. Pengaruh orang lain yang dianggap penting

Individu pada umumnya cenderung untuk memiliki sikap yang konformis atau searah dengan sikap seseorang yang dianggap penting. Kecenderungan ini antara lain dimotivasi oleh keinginan untuk berafiliasi dan untuk menghindari konflik dengan orang yang dianggap penting tersebut.

3. Pengaruh kebudayaan

Kebudayaan dapat memberi corak pengalaman individu-individu masyarakat asuhannya. Sebagai akibatnya, tanpa disadari kebudayaan telah menanamkan garis pengaruh sikap kita terhadap berbagai masalah.

4. Media massa

Dalam pemberitaan surat kabar maupun radio atau media komunikasi lainnya, berita yang seharusnya faktual disampaikan secara obyektif berpengaruh terhadap sikap konsumennya.

5. Lembaga pendidikan dan lembaga agama

Konsep moral dan ajaran dari lembaga pendidikan dan lembaga agama sangat menentukan sistem kepercayaan. Tidaklah mengherankan apabila pada gilirannya konsep tersebut mempengaruhi sikap.

6. Faktor emosional

Kadang kala, suatu bentuk sikap merupakan pernyataan yang didasari emosi yang berfungsi sebagai sebagai semacam penyaluran frustrasi atau pengalihan bentuk mekanisme pertahanan ego.

2.3 Konsep Perilaku

2.3.1 Pengertian Perilaku

Perilaku politik pada umumnya ditentukan oleh faktor internal dari individu itu sendiri seperti idealisme. Tingkat kecerdasan, kehendak hati dan oleh faktor eksternal (kondisi lingkungan) seperti kehidupan beragama, sosial, politik, ekonomi, dan sebagainya yang mengelilinginya. Menurut Ramlan Surbakti (2010: 167) bahwa perilaku politik dalam Syafrudin, I. (2021) adalah kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan keputusan politik. Perilaku politik merupakan salah unsur atau aspek perilaku secara umum, disamping perilaku politik, masih terdapat perilaku lain seperti perilaku organisasi, perilaku budaya, perilaku konsumen/ekonomi, perilaku keagamaan dan lain sebagainya.

Perilaku politik meliputi tanggapan internal seperti persepsi, sikap, orientasi dan keyakinan serta tindakan-tindakan nyata seperti pemberian suara, protes, lobi dan sebagainya. Persepsi politik berkaitan dengan gambaran suatu obyek tertentu, baik mengenai keterangan, informasi dari sesuatu hal, maupun gambaran tentang obyek atau situasi politik dengan cara tertentu (Fadillah Putra, 2003 : 200) dalam Rismawati, S. (2022) sikap politik adalah merupakan hubungan atau pertalian diantara keyakinan yang telah melekat dan mendorong seseorang untuk menanggapi suatu obyek atau situasi politik dengan cara tertentu.

Sikap dan perilaku masyarakat dipengaruhi oleh proses dan peristiwa historis masa lalu dan merupakan kesinambungan yang dinamis. Peristiwa atau kejadian politik secara umum maupun yang menimpa pada individu atau kelompok masyarakat, baik yang menyangkut sistem politik atau ketidak stabilan politik, janji politik dari calon pemimpin atau calon wakil rakyat yang tidak pernah ditepati dapat mempengaruhi perilaku politik masyarakat.

Menurut (Syafrudin, 2011) dalam Effendi, M. R., & Syafrudin, I. (2020) Salah satu unsur dari perilaku adalah gerak sosial yang terikat oleh empat syarat, yakni:

1. Diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu;
2. Terjadi pada situasi tertentu;
3. Diatur oleh kaidah-kaidah tertentu; dan
4. Terdorong oleh motivasi-motivasi tertentu.

2.3.2 Perilaku Pemilih

Perilaku memilih berkaitan dengan tingkah laku individu dalam hubungannya dengan proses pemilu. Menurut Jack Plano, perilaku memilih adalah salah satu bentuk perilaku politik yang terbuka.

(Jack Plano, 1985:161) dalam Yudi, A. G. (2015) Sementara itu, Huntington dan Nelson menyebutkan perilaku memilih sebagai *electoral activity*, yakni termasuk pemberian suara (*votes*), bantuan untuk kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan, menarik masuk atas nama calon, atau tindakan lain yang direncanakan untuk mempengaruhi proses pemilihan umum.

Selanjutnya perilaku memilih disini dikaitkan dengan proses pemungutan atau pemberian suara (*Voting*) dalam suatu pemilihan umum (pemilu). *Voting* merupakan kegiatan pengambilan keputusan dengan satu orang satu suara dalam pemilu yang diselenggarakan. Sedangkan menurut Haryanto, *Voting* adalah kegiatan warga negara yang mempunyai hak untuk memilih dan terdaftar sebagai seorang pemilih, memberikan suaranya untuk memilih atau menentukan wakil-wakilnya (Haryanto, 1984:110) dalam Yudi, A. G. (2015)

Perilaku pemilih erat kaitannya dengan bagaimana individu berperilaku dan berinteraksi dalam sebuah pemilihan umum, terutama terkait dengan ketertarikan dan pilihan politik mereka terhadap suatu partai politik yang akan dipilihnya. Dalam berperilaku secara umum dapat dibagi menjadi dua macam perilaku, yaitu perilaku yang baik atau yang normal dan perilaku yang tidak baik atau menyimpang.

Dalam kaitannya dengan pemilihan umum, perilaku normal adalah perilaku politik yang mengikuti tata cara dan aturan main dalam berpolitik, sementara perilaku politik menyimpang adalah pola perilaku politik yang tidak mengikuti aturan main. Bahkan dalam hal ini mungkin mereka melakukan berbagai perilaku yang membuat pihak atau orang lain terganggu dan terintimidasi.

Menurut Kartini Kartono (2010:3) dalam Yudi, A. G. (2015) , perilaku normal adalah perilaku yang dapat diterima oleh

masyarakat umum atau sesuai dengan pola kelompok masyarakat setempat, sehingga tercapai relasi personal dan interpersonal yang memuaskan. Sedangkan perilaku menyimpang (abnormal) adalah perilaku yang tidak sesuai atau tidak dapat diterima oleh masyarakat umum dan tidak sesuai dengan norma masyarakat. Menurut pendapat Ramlan Surbakti (1992:12) dalam Yudi, A. G. (2015) , perilaku politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat, diantara lembaga-lembaga pemerintah dan diantarakelembaga dan individu dalam masyarakat, dalam rangka proses pembuatan pelaksanaan dan penegakan keputusan politik.

Tidak semua individu atau kelompok masyarakat itu mengerjakan kegiatan politik. Karena ada pihak yang memerintah dan ada pula yang mentaati perintah, yang satu mempengaruhi dan yang lain menentang dan hasilnya berkompromi. Yang lain menjanjikan, yang lain kecewa karena janji tidak dipenuhi, berunding dan tawar-menawar, yang satu memaksakan keputusan berhadapan dengan pihak lain yang mewakili kepentingan rakyat yang berusaha membebaskan.

Yang satu menutupi kenyataan yang sebenarnya (yang merugikan masyarakat), sementara pihak lain berusaha memaparkan kenyataan yang sebenarnya dan mengajukan tuntutan, memperjuangkan kepentingan, mencemaskan apa yang terjadi. Salah satu perilaku politik yang dilakukan masyarakat adalah dalam bentuk pemilihan umum. Dalam pemilihan umum masyarakat berpartisipasi untuk memilih para wakil rakyat yang akan memperjuangkan kepentingan mereka.

2.4 Partai Politik

2.4.1 Pengertian Partai Politik

Dalam suatu negara dengan bentuk pemerintahan demokrasi maka terdapat organisasi politik. Organisasi ini disebut partai politik yang mana sebagai penyalur aspirasi rakyat kepada pemerintah. Partai politik memainkan peran yang menentukan dalam sebuah sistem demokrasi modern dan merupakan pilar utama dalam pranata sistem politik (Mayer, 2012:30) dalam Sari, C. D. P. (2017) . Secara etimologis kata partai berasal dari bahasa Latin, yaitu *partire*, yang bermakna ‘membagi’ atau ‘memilah’ atau juga bias disejajarkan dengan kata benda *part* dalam bahasa Inggris bermakna bagian. Apabila *part* dikembangkan menjadi kata kerja berubah menjadi *participate* yang berarti turut ambil bagian. Dengan begitu partai bisa dipahami sebagai bagian dari masyarakat yang turut ambil bagian dalam kegiatan bertujuan.

Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama (Budiardjo, 2007:403) dalam buku Djuyandi, Y., & IP, S. pengantar ilmu politik: suatu dasar Bagi pemula rajawali. Yang mana tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk dapat melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.

Sigmund Neumann mendefinisikan partai politik sebagai organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda. Beda halnya dengan Carl Fredrich yang memberi batasan partai politik sebagai kelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan untuk merebut atau

mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan bagi pemimpin materil dan ideall kepada anggotanya.

Suatu organisasi yang memiliki tujuan untuk memperoleh kekuasaan politik dalam pemerintahan, maka organisasi tersebut dapat dikatakan sebagai partai politik. Sedangkan untuk mempertahankan kekuasaannya partai politik harus memiliki massa pendukung sebanyak mungkin. Jadi ada satu hal yang membedakan antara partai politik dengan organisasi lainnya, yaitu adanya tujuan untuk memperoleh kekuasaan di pemerintahan. Dalam upaya mencapai tujuan politiknya, maka partai politik itu harus merebut pengaruh dalam masyarakat melalui pencitraan dan pembentukan opini publik serta memenangkan pemilihan umum. (Arifin, 2011:31) dalam Sari, C. D. P. (2017)

Menurut Sigit Pamungkas bahwa untuk mempermudah memahami partai yang kompleks tersebut, beberapa ilmuwan membuat simplifikasi/ penyederhanaan terhadap berbagai jenis partai yang ada ke dalam suatu tipologi tertentu. Tipologi tersebut mengacu pada karakter khusus dari suatu partai, yang dari karakter ciri tersebut. Suatu partai dapat dikategorisasikan ke dalam suatu tipe tertentu. Jadi, tipologi kepartaian adalah penggolongan partai politik ke dalam suatu tipe tertentu berdasarkan suatu karakter tertentu dengan tujuan untuk menyederhanakan pemahaman terhadap realitas partai yang kompleks.

Selama ini paling tidak di kenal tiga metode dasar tipologi partai *pertama*, dengan mendaftar tipe-tipe partai dan tampilkan karakter masing-masing partai metode ini dilakukan misalnya oleh Katz & Mair (1995), yang membagi tipe partai ke dalam empat jenis, yaitu: elit, mass, catch-all, dan kartel. *Kedua*, dengan mengidentifikasi tipe awal (genus) partai dan spesies yg dihasilkan perkembangan partai tersebut. Metode ini dilakukan oleh Gunther & Diamond (2003) dalam Aminuddin, M. F., & Ramadlan, M. F. S. (2015), yang membagi

partai ke dalam lima genus (tipe) partai yg kemudian berkembang menjadi lima belas spesies. Kelima jenis partai tersebut: partai berbasis *elit based*; partai berbasis massa; partai berbasis etnis; partai elektoralis; dan partai pergerakan. *Ketiga*, berdasarkan pada dimensi-dimensi yang abstrak dari partai untuk bedakan jenis partai. Wolinetz (1992), misalnya menggunakan dimensi berupa perbedaan orientasi partai sebagai sarana bedakan jenis partai, meliputi, *vote-seeking*, *office-seeking*, dan *policy seeking*. Dari dimensi tsb Wolinetz menyampaikan ada enam tipe partai, meliputi: *catch all*, *programmatic*, *new party*, *mass-integration*, *cartel party*, dan *patronage party*.

Kelemahan tipologi partai dalam upaya membuat tipologi partai, upaya para ilmuwan tersebut belum berhasil terakumulasi ke dalam suatu teori yang lebih general tentang asal mula, perkembangan, dan transformasi partai politik. Hal ini dikarenakan terutama oleh *pertama*, fakta bahwa kebanyakan model kepartaian mengalami bias yang serius. Penyebab biasanya partai dikarenakan kebanyakan model partai dikembangkan dalam konteks Eropa Barat dan Amerika Serikat, kebanyakan model kepartaian sangat unidimensional dalam pendekatannya, misalnya hanya berbasis pada aspek struktur organisasi partai saja atau ideologi saja.

Kedua, kebanyakan model-model yang diajukan tidak memiliki indikator-indikator jelas dan empirik yang akan memudahkan kita untuk tentukan suatu partai masuk ke dalam *typologi* atau model kepartaian apa dan akhirnya, hal itu membuat kita kesulitan menentukan cara efektif untuk klasifikasikan tipe-tipe partai yang berbeda tersebut.

Dari beberapa definisi partai politik menurut para ahli di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa di dalam partai politik terdapat kumpulan orang-orang yang terorganisir yang memiliki tugas dan fungsi, visi dan misi, program, dan tujuan bersama, yang pada akhirnya akan

menguasai pemerintahan, dengan cara menduduki posisi jabatan tertentu. Partai politik juga merupakan perpanjangan tangan rakyat. Aspirasi rakyat berupa tuntutan dan kepentingan yang beragam disampaikan dalam berbagai cara, ditampung oleh partai politik, kemudian diolah dan dirumuskan sehingga bisa diteruskan kepada pemerintah dan pembuat kebijakan publik lainnya, dalam bentuk tuntutan atau usul kebijakan umum. (Arifin, 2011:29) dalam Sari, C. D. P. (2017)

Seperti dikemukakan Handoyo (2008:143) dalam Sari, C. D. P. (2017) Etika Politik dan Pembangunan, bahwa terdapat tiga alasan mengapa partai politik dibutuhkan dalam konteks pelembagaan dirinya. Pertama, partai politik adalah kendaraan utama bagi terwujudnya perwakilan politik. Kedua, partai politik adalah mekanisme utama bagi penyelenggaraan pemerintahan. Ketiga, partai politik adalah saluran utama untuk memelihara akuntabilitas demokrasi

2.4.2 Tata Kelola Partai Politik

Tata kelola berupaya memahami cara membangun pengambilan keputusan kolektif. Tata kelola adalah tentang sejumlah peraturan pengambilan keputusan kolektif dalam situasi di mana terdapat sejumlah aktor atau organisasi dan dimana tidak ada sistem kontrol formal yang dapat menentukan syarat-syarat hubungan antara aktor dan organisasi ini. Ada empat elemen tentang definisi ini yang lebih layak dipikirkan lebih lanjut. Pertama, kita harus mengklarifikasi apa yang kita maksud dengan aturan.

Aturan yang tertanam dalam sistem tata kelola dapat merentang dari formal ke- informal. Prosedur pengambilan keputusan umumnya menemukan ekspresi dari bentuk kelembagaan dan dapat relatif stabil dari waktu ke waktu, meskipun tidak selalu tidak berubah. Memang salah satu alasan untuk menumbuhkan ketertarikan pada pemerintahan

adalah karena bentuk-bentuk kelembagaan pemerintahan yang mapan muncul di bawah tantangan, dan bentuk-bentuk baru tata kelola tampaknya sedang muncul.

Dalam mempelajari tata kelola kita tertarik pada pengaturan formal yang ada untuk struktur pengambilan keputusan dan *themore* praktik informal, konvensi dan kebiasaan. Singkatnya, kita seringkali tidak tertarik ketika datang ke tata kelola dalam apa yang, kombinasi spesifik dari formal dan lembaga-lembaga informal yang memengaruhi cara sekelompok orang menentukan apa yang harus diputuskan, bagaimana memutuskan, dan siapa yang akan memutuskan masalah tata kelola klasik.

Pengaturan tata kelola umumnya melibatkan hak bagi beberapa orang. Kita harus memikirkan apa yang kita maksud dengan pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan bisa strategis tetapi juga dapat dimasukkan dalam praktik implementasi atau sistem setiap hari. Memutuskan sesuatu secara kolektif membutuhkan aturan tentang siapa yang dapat memutuskan apa, dan bagaimana keputusan pabrikan harus bertanggung jawab.

Kerangka kerja tata kelola dapat fokus pada pengambilan keputusan kolektif dalam sistem sosial atau proses internal dalam organisasi. Tata kelola dapat menjadi perhatian tentang pengambilan keputusan kolektif tentang isu-isu global, dan memerhatikan tentang aturan yang mengatur eksekutif lokal atau administrasi. Penting untuk mengenali unsur-unsur makro dan mikro dari perdebatan tata kelola ini dan membedakan di antara mereka.

Elemen terakhir dalam definisi tata kelola kami yang perlu diperhatikan lebih lanjut, adalah gagasan bahwa dalam tata kelola tidak ada sistem kontrol formal yang menentukan hubungan dan hasil. Atau dengan kata lain: pemerintahan adalah dunia di mana 'tidak ada yang bertanggung jawab'. Pemerintahan monokratis pemerintahan

oleh satu orang adalah kebalikan dari pemerintahan, yang adalah tentang pemerintahan kolektif.

Otoritas dan paksaan adalah sumber daya yang tersedia bagi sebagian orang dalam pengaturan tata kelola tetapi tidak pernah dalam jumlah atau kualitas yang cukup untuk berarti mereka dapat mengendalikan proses pengambilan keputusan. Bentuk-bentuk khas interaksi sosial dalam pemerintahan bergantung pada negosiasi, sinyal, komunikasi dan pengaruh hegemonik. Alih-alih pengawasan dan pengawasan langsung. Teori pemerintahan tertarik bukan hanya dalam menawarkan penjelasan, tetapi juga berupaya memberikan nasihat.

Studi tata kelola difokuskan tidak hanya pada membantu pemahaman yang lebih baik tentang bagian dari dunia kita, tetapi juga memiliki kepedulian dengan bagaimana fungsi dan operasi dunia dapat menjadi lebih baik. Dengan semua mekanisme tata kelola ada tantangan input dan output yang harus dipenuhi. Apakah pengaturan tata kelola membantu penyampaian hasil Proses-proses tata kelola kemudian menuntut untuk dipahami secara analitik dan empiris sebagai seperangkat praktik, dan bukannya melalui prinsip-prinsip ‘daftar keinginan’ yang harus diikuti.

Kami tidak menetapkan seperangkat prinsip tata kelola yang diturunkan secara normatif untuk semua sistem atau organisasi sosial. Meskipun daftar prinsip-prinsip tata kelola tersebut dapat ditemukan di tempat lain dan memang menyediakan beberapa makanan berharga untuk dipikirkan (Hyden et al., 2004; Kaufmann dan Kraay, 2007) dalam Grindle, M. S. (2011). Tetapi tata kelola bukanlah ilmu dengan jalur sebab-akibat yang jelas untuk diidentifikasi, juga tidak dapat secara memadai ditangkap oleh undang-undang, undang undang atau konstitusi formal pemerintahan adalah praktik.

Kita memeriksa isu-isu ini menerjemahkan tata kelola menjadi praktik ketika kita melihat bagaimana teori tata kelola telah mengarah pada

pengembangan dalam praktik tata kelola perusahaan, partisipatif, dan lingkungan. Pemerintahan adalah praktik. Kita memeriksa isu-isu ini menerjemahkan tata kelola menjadi praktik ketika kita melihat bagaimana teori tata kelola telah mengarah pada pengembangan dalam praktik tata kelola perusahaan, partisipatif, dan lingkungan. Terlebih lagi, ini adalah aktivitas manusia yang intens dan tidak dilakukan oleh makhluk super yang serba tahu dan serba tahu. Pemerintahan dilakukan oleh yang didefinisikan oleh rasionalitas terikat dibatasi oleh kapasitas pemrosesan informasi mereka dan dibatasi oleh posisi dan persepsi kekuasaan yang saling bertentangan.

Dua hal mengalir dari pernyataan ini. Pertama, tata kelola adalah kegiatan politik; ini tentang koordinasi dan pengambilan keputusan dalam konteks pluralitas pandangan dan kepentingan. Konflik dan perbedaan pendapat memberikan unsur-unsur penting pada proses tata kelola. Mengingat masyarakat manusia, seperti yang telah terjadi dan mungkin diharapkan di masa depan, orang akan membuat penilaian tentang apa yang benar untuk diri mereka sendiri dan orang lain, dan bahwa tidak ada alasan untuk mengasumsikan bahwa penilaian tersebut akan dibagikan.

Sama jelasnya bahwa sebagai manusia kita perlu menemukan cara untuk bertindak bersama, untuk terlibat dalam aksi kolektif, untuk menyelesaikan masalah dan tantangan hidup bersama. Politik sebagai “perjuangan yang dihasilkan dari tabrakan antara tujuan manusia: paling jelas ketika tabrakan ini melibatkan sejumlah besar manusia”. Politik menginformasikan tata kelola dalam hal menyediakan bahan baku untuk membangun pengaturan tata kelola dan fokus kegiatan tata kelola banyak ketika beroperasi (Vasudha Chhotray dan Gerry Stoker, 2009) dalam Haryaningsih, S. (2015) .

2.4.3 Fungsi dan Tujuan Partai Politik

Suatu negara mendukung keberadaan partai politik tentu dengan suatu tujuan atau maksud tertentu. Negara yang sistem pemerintahannya demokrasi tentu mendukung adanya partai politik sebagai wujud terciptanya demokrasi. Tanpa adanya partai politik tentu demokrasi tidak dapat terwujud. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Partai Politik pasal 10, menyatakan bahwa di Indonesia terdapat tujuan partai politik yang meliputi tujuan umum dan tujuan khusus.

Tujuan Umum Partai Politik :

1. Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD 1995;
2. Menjaga dan memelihara keutuhan NKRI;
3. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam NKRI;
4. Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tujuan Khusus Partai Politik :

1. Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintah.
2. Memperjuangkan cita-cita Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3. Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Suatu negara menyetujui adanya partai politik tidak hanya dengan tujuan tertentu saja namun juga adanya fungsi yang diharapkan. Fungsi dasar dari sebuah partai politik adalah untuk mengagresikan kepentingan masyarakat, mengarahkannya pada kepentingan

bersama dan merancangnya dalam bentuk legislasi dan kebijakan, sehingga menjadi sebuah agenda yang bisa mendapatkan dukungan rakyat disaat pemilihan umum (Mayer, 2012:26) Fungsi partai politik di negara demokrasi menurut Miriam Budiardjo dalam bukunya Dasar-Dasar Ilmu Politik (2008:405), adalah :

1. Sebagai sarana komunikasi politik

Fungsi partai politik sebagai sarana komunikasi politik disebut juga fungsi Aggregation. Partai politik menjalankan proses penggabungan kepentingan atau agregasi dari aspirasi masyarakat yang telah dikumpulkan dan ditampung kemudian dilakukan proses perumusan kepentingan atau artikulasi. Dan terakhir partai politik merumuskannya menjadi usul kebijakan yang akan disampaikan parlemen kepada pemerintah agar menjadi kebijakan umum. Partai politik juga berfungsi untuk memperbincangkan dan menyebarluaskan rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan pemerintah. Sehingga partai politik memainkan peran sebagai penghubung antara yang memerintah dan yang diperintah. Dimana partai politik bagi pemerintah bertindak sebagai alat pendengar, sedangkan bagi warga masyarakat sebagai pengeras suara.

2. Sebagai sarana sosialisasi politik

Ahli sosiologi politik M. Rush (Budiardjo, 2008) mendefinisikan sosiologi politik adalah proses yang melaluinya orang dalam masyarakat tertentu belajar mengenali sistem politiknya. Proses ini sedikit banyak menentukan persepsi dan reaksi mereka terhadap fenomena politik. Sosialisasi politik menjadi penghubung yang mensosialisasikan nilai-nilai politik generasi yang satu ke generasi lainnya. Fungsi lain dari sosialisasi politik adalah upaya menciptakan citra partai politik, karena partai harus memperoleh dukungan seluas mungkin. Partai politik juga

harus mampu mendidik anggotanya agar menjadi manusia yang sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga negara dan menempatkan kepentingan sendiri di bawah kepentingan nasional.

3. Sebagai sarana rekrutmen politik Fungsi ini berkaitan dengan masalah seleksi kepemimpinan baik dalam internal partai maupun kepemimpinan nasional. Disamping itu, partai politik juga berkepentingan untuk memperluas atau memperbanyak keanggotannya. Sehingga partai politik akan berusaha menarik sebanyak-banyaknya orang untuk menjadi anggotanya, karena rekrutmen politik akan menjamin kontinuitas dan kelestarian partai serta salah satu cara untuk menjaring dan melatih calon-calon pemimpin.

Janda (dalam Handoyo, 2008:148) dalam (Delvia & Sari, 2017) mengatakan partai politik setidaknya memiliki empat fungsi, yaitu: (1) menominasikan kandidat melalui pemilihan umum untuk masuk dalam jabatan publik, (2) melakukan strukturisasi pilihan suara dalam pemilihan umum, (3) mengajukan alternatif program pemerintah dan (4) mengkoordinasikan tindakan-tindakan pejabat-pejabat pemerintah. Fungsi Partai Politik menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Partai Politik pasal 11, adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat.
3. Penyerapan, penghimpunan, dan penyaluran aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara,
4. Partisipasi politik warga negara Indonesia, dan

5. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan.

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa partai politik dapat menjadi penghubung psikologis dan organisasional antar warga negara dengan pemerintahnya. Partai politik juga melakukan konsolidasi dan artikulasi tuntutan-tuntutan yang beragam dan berkembang di berbagai kelompok masyarakat. Partai juga merekrut orang-orang untuk diikuti sertakan dalam konteks pemilihan wakil-wakil rakyat dan menemukan orang-orang yang cakap untuk menduduki posisi-posisi eksekutif. Pelaksanaan fungsi-fungsi ini dapat dijadikan instrument untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan partai politik di negara demokrasi (Budiarjo, 2008).

Dalam partai politik terdapat anggota-anggota partai politik yang hadir dalam pemerintahan guna mewakili dan mewujudkan aspirasi rakyat, orang inilah yang biasa disebut sebagai Politikus. Menurut Firmanzah (2008:38) dalam Karya, B. Perilaku pemilih pemula dalam Pemilu pada Kota Palangka Raya 2018. politikus adalah orang-orang yang menjalankan fungsi tertentu dalam masyarakat, yaitu mengatur kehidupan sosial bermasyarakat. Dengan begitu, keberadaan politikus harus dapat mewakili orang-orang yang bersedia memercayainya dan menuangkan keinginan masyarakat dalam peraturan perundang-undangan.

2.4.4 Partai Semu

Partai semu merupakan kondisi konsensitas pemilu legislatif yang dibayang-bayangi oleh individualisasi pencalonan yang makin kuat. Partai semu atau *pseudo party* menggambarkan partai politik yang diorganisasi dari pusat partai hingga ke daerah atau cabang-cabang partai tenggelam oleh sosok individu tokohnya, calegnya atau

aktor partai yang ‘dikeramatkan’ demi kepentingan elektoral. Dalam kondisi demikian, bagaimana partai bekerja berdampak terhadap kondisi sistem partai. Kelangkaan studi-studi empirik mengenai *systemness* partai di Indonesia di era multipartai menjadi pintu masuk untuk memperkuat penegasan potensi kemerosotan *systemness* partai. Kalaupun terdapat sejumlah literatur mengenai partai politik, fokus kajiannya belum mengeksplorasi studi *systemness* partai secara mikro.

Kesisteman dari beberapa jaringan terjadi biasanya melalui peran-peran tokoh utama yang berperan dalam jalannya pemerintahan seperti, Relasi yang erat antara pemimpin agama dalam hal ini kiai dengan masyarakat yang menjadi pengikut dan meneladani tokoh kiai merupakan landasan bagi munculnya pola kepengikutan patronase. Sebagaimana telah dibahas terdahulu, bahwa peran kiai menjadi dominan bukan semata karena aspek atau penilaian yang bersifat ekonomi. Walaupun ekonomi penting atau setidaknya kemampuan kiai untuk memiliki dan mengakumulasi aset tanah dan rumah bukan suatu hal yang sulit, namun penilaian ketokohan terhadap kiai juga ditentukan oleh pandangan masyarakat terhadap sosok kiai. Misalnya, seorang kiai dari pondok pesantren terkenal di Jrenguan, Omben, mampu bersikap netral selama pemilihan kepala daerah tahun 2007 pada saat ketika para kiai yang lain sibuk menggalang dukungan baik langsung maupun tak langsung pada kandidat kepala daerah.

Kenetralan sikap politik ini justru menunjukkan otonomi politiknya dan bahkan pada akhirnya kiai tersebut disegani oleh kiai-kiai yang lain. Sesungguhnya, keterlibatan sebuah tokoh dalam kepengurusan partai menunjukkan betapa tipisnya kaitan antara ketokohan yang melambangkan kekuatan politik informal dengan politik formal kepartaian disamping. Masuknya ketokohan tersebut juga menyebabkan pola kepengikutan partai lebih bergerak ke arah patronase politik di mana kepengurusan partai akan sangat menggantung kan diri pada ketokohan.

Jika ketokohan tersebut berubah menjadi dominan, maka tidaklah mengejutkan bahwa hal ini akan menimbulkan degradasi institusi partai politik pada suatu titik di mana pribadi ketokohan lebih dihargai daripada otoritas institusi partai. Dampak lebih lanjut, kerja institusi partai akan sangat bergantung pada sosok daripada mengandalkan jaringan formal organisasi partai. Maka tak mengherankan calon anggota legislatif berupaya menumpang ketenaran tokoh dan jaringan politik tokoh agar terpilih daripada menggunakan atau memanfaatkan mesin partai.

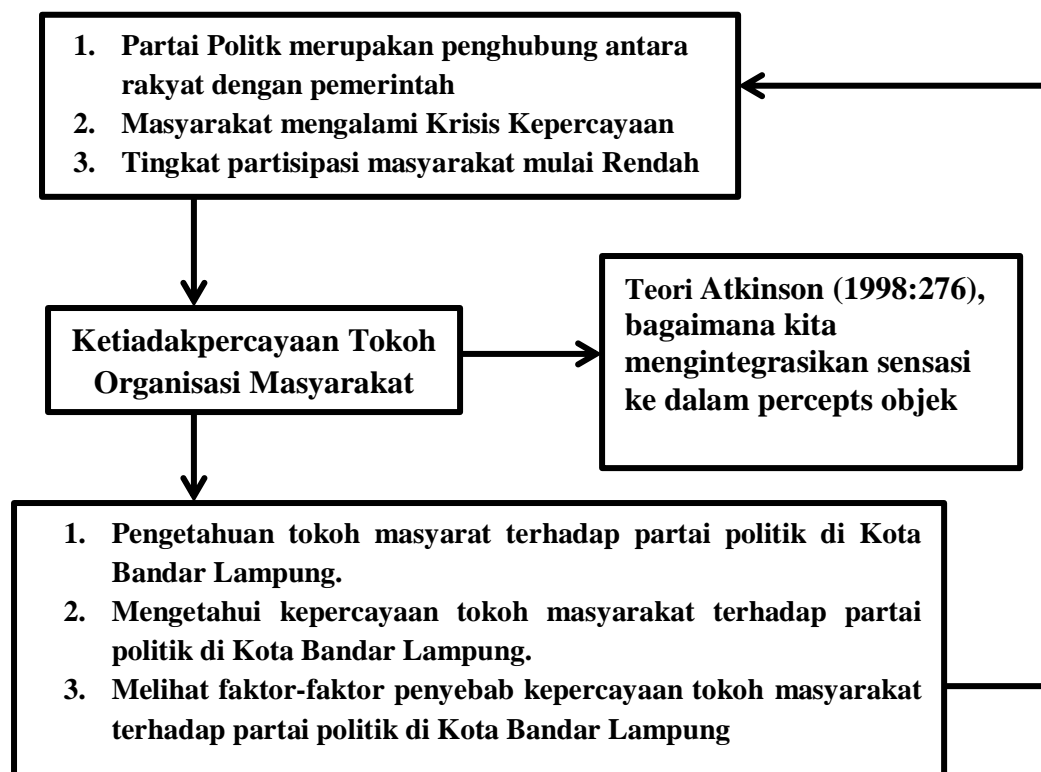
2.5 Kerangka Pikir

Kerangka berpikir adalah kerangka konseptual penulis yang membantu penulis dalam melakukan penelitian. Kerangka berpikir ini berisi konsep-konsep atau variabel-variabel yang terkait dengan masalah penelitian. Maraknya berbagai pemberitaan mengenai partai politik baik yang positif maupun yang negatif, tentu saja akan memengaruhi pandangan masyarakat. Namun, dikarenakan banyaknya pemberitaan yang negatif daripada pemberitaan yang positif maka masyarakat kini mengalami perubahan persepsi terhadap partai politik.

Perubahan persepsi ini sepertinya mengakibatkan krisis kepercayaan terhadap partai politik. Tentu saja kondisi ini harus menjadi perhatian partai politik, dimana partai politik seharusnya mampu mendekati diri dengan masyarakat untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat terutama saat pemilihan umum, bukan malah membuat masyarakat menjauhi partai politik. Hal ini membuat peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana persepsi lembaga-lembaga diluar pemerintahan terkait identifikasi faktor ketidakpercayaan masyarakat kepada partai politik.

Dengan bagaimana memahami bagaimana persepsi masyarakat kepada partai politik saat ini, dan mengkaji mengapa masyarakat kian hari semakin

tidak mempercayai partai politik, serta mengetahui apa harapan lembaga-lembaga diluar pemerintahan dan masyarakat kepada partai politik. Untuk mengetahui bagaimana persepsi lembaga-lembaga terkait identifikasi faktor ketidakpercayaan masyarakat terhadap partai politik. Pengharapan ini memiliki risiko yang mengarahkan pada munculnya sebuah konsekuensi negatif ketika harapan yang dimiliki tidak dapat dipenuhi oleh pihak yang dipercaya sehingga memunculkan perasaan dikhianati, kecewa, dan marah. Atkinson (1998:276) dalam (Delvia & Sari, 2017) Persepsi adalah penelitian bagaimana kita mengintegrasikan sensasi ke dalam *percepts objek*, dan bagaimana kita selanjutnya menggunakan *percepts* itu untuk mengenali dunia (*percepts* adalah hasil dari proses perseptual). Untuk mengetahui **Ketidakpercayaan Tokoh Masyarakat Kepada Partai Politik Di Kota Bandar Lampung** maka akan dijelaskan dengan menggunakan kerangka pikir sebagai berikut.



Gambar 1. Kerangka pikir

Sumber : Diolah peneliti tahun 2021

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dimana penelitian kualitatif sebagai metode ilmiah sering digunakan dan dilaksanakan oleh sekelompok peneliti dalam bidang ilmu sosial, termasuk juga ilmu pendidikan. Sejumlah alasan juga dikemukakan yang intinya bahwa penelitian kualitatif memperkaya hasil penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif dilaksanakan untuk membangun pengetahuan melalui pemahaman dan penemuan sebuah masalah. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.

Pada penelitian ini peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden dan melakukan studi yang dialami. Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah instrument kunci. Oleh karena itu peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas jadi bias bertanya, menganalisis dan mengkonstruksi objek yang diteliti menjadi lebih jelas. Penelitian ini lebih menekankan pada makna dan terikat nilai.

Hakikat penelitian kualitatif adalah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya, mendekati dan berinteraksi dengan orang-orang yang berhubungan dengan fokus penelitian dengan

tujuan memahami, menggali pandangan dan pengalaman untuk mendapatkan informasi atau data yang diperlukan.

Penelitian kualitatif dimana peran peneliti adalah sebagai instrument kunci dalam mengumpulkan data, dan menafsirkan data. Alat pengumpulan data biasanya menggunakan pengamatan langsung, wawancara, studi dokumen. Sedangkan kesahihan dan keterandalan menggunakan triangulasi dengan metoden induktif, hasil penelitian kualitatif lebih digunakan jika masalah belum jelas, untuk mengetahui makna yang tersembunyi, untuk memahami interaksi sosial, untuk mengembangkan teori, untuk memastikan kebenaran data dan meneliti sejarah perkembangan.

Mengingat bahwa penelitian ini bertujuan untuk memahami dan memaknai berbagai fenomena yang ada atau yang terjadi dalam kenyataan sebagai ciri khas penelitian kualitatif, dalam hal ini bagaimana persepsi lembaga-lembaga non pemerintah terkait identifikasi faktor ketidakperayaan masyarakat kepada partai politik maka peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Selain itu seperti yang dinyatakan moleong, metode kualitatif dilakukan dengan beberapa pertimbangan, pertama menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda ; kedua, metode ini menyajikan secara langsung hubungan antara peneliti dengan responden ; ketiga, metode ini lebih peka dan lebih menyesuaikan diri dengan banyak penajaman bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

Bogdan dan Taylor menjelaskan bahwa metodologi penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dalam penelitian kualitatif seorang peneliti berbicara langsung dan mengobservasi beberapa orang, dan melakukan interaksi selama beberapa bulan untuk mempelajari latar, kebiasaan. Perilaku dan ciri-ciri fisik dan mental orang yang diteliti. Bogdan dan biklen mengemukakan bahwa karakteristik dari penelitian kualitatif adalah (1) alamiah, (2) data bersifat

deskriptif bukan angka-angka, (3) analisis data dengan induktif, dan (4) makna sangat penting dalam penelitian kualitatif.

Penelitian tentang persepsi lembaga-lembaga non pemerintah terkait identifikasi faktor ketidakpercayaan masyarakat kepada partai politik relevan dengan menggunakan penelitian kualitatif karena memenuhi karakteristik penelitian kualitatif, terutama dalam hal pengungkapan data secara mendalam melalui wawancara, observasi dan kajian dokumen terhadap apa yang dilakukan para informan, bagaimana mereka melakukan kajian-kajian tentang identifikasi faktor ketidakpercayaan masyarakat kepada partai politik, dan bagaimana sikap lembaga-lembaga non pemerintah dalam melihat situasi masyarakat yang saat ini tidak percaya kepada partai politik sesuai dengan realitas sesungguhnya.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana yang tidak relevan (Moleong, 2010) dalam Harahap, R. (2018) Pembatasan dalam penelitian kualitatif ini lebih didasarkan pada tingkat kepentingan/urgensi dari masalah yang dihadapi dalam penelitian ini. Penelitian ini akan difokuskan pada “Ketidakpercayaan Tokoh Masyarakat Kepada Partai Politik Di Kota Bandar Lampung” yang objek utamanya Tokoh-tokoh organisasi masyarakat (ORMAS) di Kota Bandar Lampung. Adapun penelitian ini berpedoman pada :

1. Persepsi adalah penelitian bagaimana kita mengintegrasikan sensasi ke dalam *percepts* objek, dan bagaimana kita selanjutnya menggunakan *percepts* itu untuk mengenali dunia. pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi memberikan makna pada stimulus inderawi, jadi hubungan sensasi dengan persepsi sudah jelas, sensasi adalah bagian dari persepsi

(*percepts* adalah hasil dari proses perseptual) Atkinson (1998:276) dalam (Delvia & Sari, 2017).

2. Sikap masyarakat tentang keadaan parkir liar bahwa sikap diartikan sebagai suatu reaksi atau respon yang muncul dari seorang individu terhadap objek yang kemudian memunculkan perilaku individu terhadap objek tersebut dengan cara-cara tertentu dalam Seno, R. B. persepsi dan sikap (2020).
3. Perilaku politik merupakan salah unsur atau aspek perilaku secara umum, disamping perilaku politik, masih terdapat perilaku lain seperti perilaku organisasi, perilaku budaya, perilaku konsumen/ekonomi, perilaku keagamaan dan lain sebagainya.

Adapun Fokus penelitian ini menjelaskan indikator ketidakpercayaan masyarakat kepada partai politik, serta fungsi-fungsi partai politik. Faktor-faktor penyebab yang dapat menurunkan kepercayaan terhadap elit politik sebagai berikut :

1. Bohong
2. Korupsi
3. Mementingkan diri sendiri
4. Tidak kompeten
5. Berkasus
6. Tidak bertanggung jawab
7. Malas
8. Kurang transparan
9. Tidak adanya ketegasan

Selanjutnya dalam fokus penelitian ini ada fungsi-fungsi partai politik yang bisa menjadi acuan dalam menentukan kepercayaan masyarakat kepada partai politik di Kota Bandar Lampung sebagai berikut :

Fungsi partai politik di negara demokrasi menurut Miriam Budiardjo dalam bukunya Dasar-Dasar Ilmu Politik (2008:405), adalah :

1. Sebagai sarana komunikasi politik

Fungsi partai politik sebagai sarana komunikasi politik disebut juga fungsi Aggregation. Partai politik menjalankan proses penggabungan kepentingan atau agregasi dari aspirasi masyarakat yang telah dikumpulkan dan ditampung kemudian dilakukan proses perumusan kepentingan atau artikulasi.

2. Sebagai sarana sosialisasi politik

Ahli sosiologi politik M. Rush (Budiarjo, 2008) mendefinisikan sosiologi politik adalah proses yang melaluinya orang dalam masyarakat tertentu belajar mengenali sistem politiknya. Proses ini sedikit banyak menentukan persepsi dan reaksi mereka terhadap fenomena politik. Fungsi lain dari sosialisasi politik adalah upaya menciptakan citra partai politik, karena partai harus memperoleh dukungan seluas mungkin. Partai politik juga harus mampu mendidik anggotanya agar menjadi manusia yang sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga negara dan menempatkan kepentingan sendiri di bawah kepentingan nasional.

3. Sebagai sarana rekrutmen politik fungsi ini berkaitan dengan masalah seleksi kepemimpinan baik dalam internal partai maupun kepemimpinan nasional. Disamping itu, partai politik juga berkepentingan untuk memperluas atau memperbanyak keanggotannya. Sehingga partai politik akan berusaha menarik sebanyak-banyaknya orang untuk menjadi anggotanya, karena rekrutmen politik akan menjamin kontinuitas dan kelestarian partai serta salah satu cara untuk menjaring dan melatih calon-calon pemimpin.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat peneliti melakukan penelitian, dalam penelitian lokasi menjadi sumber informasi yang diperlukan untuk menjawab permasalahan penelitian mengenai “Persepsi Tokoh Organisasi

Masyarakat Terhadap Ketidakpercayaan Masyarakat Kepada Partai Politik Di Kota Bandar Lampung” Studi dilakukan di Kota Bandar Lampung sebagai Kota pemerintahan utama di Provinsi Lampung.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah:

1. Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan atau informan di tempat penelitian berlangsung. Jenis datanya disebut sebagai data primer

2. Sekunder

Yakni data yang diperoleh dari arsip-arsip, dokumentasi, literatur-literatur lain yang berkenaan dengan peranan-peranan gender dalam keluarga. Jenis data yang diperoleh disebut sebagai data sekunder.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2018:224) dalam (Irwansyah, Dodi., Fitri, Handayani., & Johaidah, 2021) Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber, dan berbagai cara. Pada penelitian ini peneliti pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik wawancara, dokumentasi, observasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah :

1. Wawancara

Menurut Sugiyono (2018: 138-140) dalam (Irwansyah, Dodi., Fitri, Handayani., & Johaidah, 2021) wawancara dapat dilakukan secara

terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) maupun dengan menggunakan telepon. Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Sedangkan wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Tujuan wawancara dari jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang di ajak diminta pendapat, dan ide-idenya. Jika melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang di kemukakan informan yaitu lembaga-lembaga non pemerintah terkait, apa yang menjadi faktor ketidakpercayaan masyarakat kepada partai politik.

2. Dokumentasi

Dokumentasi dari asal katanya dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Akhir-akhir ini orang membedakan dokumen dan record. Guba dan Lincoln (Lexy J. Maleong, 2002) dalam Sulaiman, S. (2018) mendefinisikan dokumen adalah setiap bahan tertulis ataupun film.

3. Observasi

Menurut (Sugiyono, 2018:145) dalam (Irwansyah, Dodi., Fitri, Handayani., & Johaidah, 2021) Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuisisioner. Sutrisno Hadi (1986) dalam Rahman, T. (2021) mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.

3.6 Teknik Pengolaan Data

Tahap selanjutnya yaitu setelah data terkumpul, peneliti mengolah data tersebut. Teknik pengolahan data menurut (Efendi dkk dalam Singarimbun, 2008:240) dalam Andriansyah, F., & Suharto, E. (2020) terdiri dari:

1. Editing

Editing adalah kegiatan dalam penelitian yang dilaksanakan dengan menentukan kembali data yang berhasil diperoleh dalam rangka menjamin validitasnya serta dapat untuk segera dipersiapkan pada proses selanjutnya. Dalam proses ini, peneliti mengolah data hasil wawancara dengan disesuaikan pada pertanyaan-pertanyaan pada fokus pedoman wawancara dan memilih serta menentukan data-data yang diperlukan untuk penulisan. Mengolah kegiatan observasi yaitu peneliti mengumpulkan data-data yang menarik dari hasil pengamatan sehingga dapat ditampilkan dengan baik.

2. Interpretasi Data

Pada tahapan ini data penelitian yang telah dideskripsikan baik melalui narasi maupun tabel selanjutnya diinterpretasikan sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai hasil penelitian. Interpretasi penulisan juga dilakukan dalam menampilkan data yang diperoleh dari cerita- cerita yang bersifat rahasia, peneliti memilih kata-kata terbaik sehingga tidak menimbulkan kesan yang dapat merugikan banyak pihak. Hasil penelitian dijabarkan dengan lengkap pada lampiran. Lampiran juga ditentukan agar relevan dengan hasil penelitian.

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif. Model ini ada 4 komponen analisis yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Menurut Moleong

(2004:280- 281), “Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan tempat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data”. Langkah-langkah analisis data menurut Miles dan Huberman (1992:15-19) dalam Gantiningrum, N., & Zabda, S. S. (2014) , adalah sebagai berikut:

1. Reduksi data, yaitu sebagai proses seleksi, pemfokusan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang ada di lapangan langsung, dan diteruskan pada waktu pengumpulan data, dengan demikian reduksi data dimulai sejak peneliti memfokuskan wilayah penelitian. Reduksi data berlangsung secara terus menerus selama pengumpulan data berlangsung. Reduksi data merupakan bagian dari analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga simpulan-simpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Pada penelitian ini data yang diperoleh, dipilih, diseleksi, dan dirangkum difokuskan pada hal-hal yang berkaitan dengan beberapa identifikasi faktor ketidakpercayaan masyarakat kepada partai politik.
2. Penyajian data, yaitu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan penelitian dilakukan. Penyajian data diperoleh berbagai jenis, jaringan kerja, keterkaitan kegiatan atau tabel. Penyajian yang paling sering digunakan pada data kualitatif pada masa yang lalu adalah bentuk teks naratif. Teks tersebut terpencar-pencar, bagian demi bagian dan bukan simultan, tersusun kurang baik, dan sangat berlebihan. Dalam penelitian kualitatif data bisa dilakukan dengan uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan peristiwa apa yang sedang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. Adapun data yang disajikan dalam penelitian ini yaitu identifikasi faktor ketidakpercayaan masyarakat kepada partai politik.
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi , yaitu dalam pengumpulan data, peneliti harus mengerti dan tanggap terhadap sesuatu yang diteliti

langsung di lapangan dengan menyusun pola-pola pengarah dan sebab akibat. Menurut Miles dan Huberman adalah penarikan simpulan dan verifikasi. Simpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Dalam pembuatan simpulan proses analisis data ini dilanjutkan dengan mencari hubungan antara apa yang dilakukan (*what*), bagaimana melakukan (*how*), mengapa dilakukan seperti itu (*why*), dan bagaimana hasilnya (*how is the effect*).

3.8 Keabsahan Data

Kegiatan ini dilakukan guna menguji data yang diperoleh dan untuk membuktikan apakah hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

3.9 Informan Penelitian

Informan penelitian ini adalah orang yang memberikan informasi yang berkaitan dengan objek penelitian. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik ini menggunakan teknik pengambilan sampel dan sumber data yang menggunakan pertimbangan bahwa sampel harus dekat dan mengetahui objek atau fokus penelitian seperti Tokoh Masyarakat di Kota Bandar Lampung

Tabel 3. Daftar Informan Penelitian

NO	Status Informan	Nama
1.	Ketua PD Muhammadiyah	Drs. H.M Ujang Suparman, M.A.Ph.D
2.	Ketua PC Nadhatul Ulama	Ichwan Adji Wibowo, S.Pt. M.M
3.	Ketua Presidium KAHMI	Abi Hasan Muan S.H.,M.H

4.	Ketua KNPI	Iqbal Ardiansyah S.SI.,M.M
5.	Ketua GMKI	Hemat Situmorang
6.	Ketua BPC HIPMI	Deri Febogi S.H
7.	Direktur WALHI Lampung	Irfan Tri Musri
8.	Ketua Pengurus AJI	Hendry Sihaloho
9.	Anggota PWI	Herman Aprigal
10.	Anggota JPPR	Erfan Zein
11.	Ketua Umum GMNI	Rendy Budianto
12.	Ketua Umum KAMMI	Edi Wiyono
13.	Ketua PC PMII	Raden Yusron
14.	Ketua PMKRI Cabang	Rendy Sianipar
15.	Tenaga Akademisi	Dr. Dedy Hernawan M.Si
16.	Tokoh Adat Saibatin	Khadin Pelita Alvis
17.	Tokoh Adat Pepadun	Kiyay Ingguan Ansarudin

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kota Bandar Lampung

4.1.1 Sejarah Kota Bandar Lampung

- a. Zaman Pra Kemerdekaan Indonesia Wilayah Kota Bandar Lampung pada zaman kolonial Hindia Belanda termasuk wilayah *Onder Afdeling* Telokbetong yang dibentuk berdasarkan *Staatsbalat* 1912 Nomor : 462 yang terdiri dari Ibukota Telokbetong sendiri dan daerah-daerah disekitarnya. Sebelum tahun 1912, Ibukota Telok betong ini meliputi juga Tanjungkarang yang terletak sekitar 5 km di sebelah utara Kota Telokbetong (*Encyclopedie Van Nedderland Indie*, D.C.STIBBE bagian IV).

Ibukota *Onder Afdeling* Telok betong adalah Tanjung karang, sementara Kota Telokbetong sendiri berkedudukan sebagai Ibukota Keresidenan Lampung. Kedua kota tersebut tidak termasuk ke dalam Marga Verband, melainkan berdiri sendiri dan dikepalai oleh seorang Asisten Demang yang tunduk kepada *Hoof Van Plaatsleyk Bestuur* selaku Kepala *Onder Afdeling* Telok betong. Pada zaman pendudukan Jepang, kota Tanjung karang- Telok betong dijadikan *Si* (Kota) dibawah pimpinan seorang *Sicho* (bangsa Jepang) dan dibantu oleh seorang *Fuku Sicho* (bangsa Indonesia).

- b. zaman Kemerdekaan Republik Indonesia, Kota Tanjung karang dan Kota Teluk betong menjadi bagian dari Kabupaten Lampung Selatan hingga diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1948 yang memisahkan kedua kota tersebut dari Kabupaten Lampung Selatan dan mulai diperkenalkan dengan istilah penyebutan Kota Tanjung karang-Teluk betung. Pada perkembangannya selanjutnya, status Kota Tanjung karang dan Kota Teluk betung terus berubah dan mengalami beberapa kali perluasan hingga pada tahun 1965 setelah Keresidenan Lampung dinaikkan statusnya menjadi Provinsi Lampung (berdasarkan Undang-Undang Nomor : 18 tahun 1965), Kota Tanjung karang-Teluk betung berubah menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjung karang-Teluk betung dan sekaligus menjadi ibukota Provinsi Lampung.

4.1.2 Visi dan Misi Kota Bandar Lampung

1. Visi.

“Bandar Lampung Sehat, Cerdas, Beriman, Berbudaya, Nyaman, Unggul, dan Berdaya Saing Berbasis Ekonomi Untuk Kemakmuran Rakyat”

2. Misi.

- a. Meningkatkan kualitas dan pelayanan kesehatan masyarakat;
- b. Meningkatkan kualitas dan pelayanan pendidikan masyarakat;
- c. Meningkatkan daya dukung infrastruktur dalam skala mantap untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial;

- d. Mengembangkan dan memperkuat ekonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- e. Mengembangkan masyarakat agamis, berbudaya dan mengembangkan budaya daerah untuk membangun masyarakat yang religius;
- f. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, pemerintahan yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi;
- g. Mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup skala kota yang sehat, sejuk, bersih dan nyaman bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem lingkungan perkotaan.

4.1.3 Geografis Kota Bandar Lampung

Kota Bandar Lampung merupakan Ibukota Provinsi Lampung yang terletak pada 5°20' sampai dengan 5°30" Lintang Selatan dan 105°28' sampai dengan 105°37' Bujur Timur. Luas wilayah yang dimiliki Kota Bandar Lampung terdiri dari luas dataran 19.722 Ha (197,22 KM²) dan luas perairan kurang lebih 39,82 KM² yang terdiri dari Pulau Kubur dan Pulau Pasaran. Kota Bandar Lampung memiliki 20 Kecamatan dan 126 Kelurahan, secara administratif Kota Bandar Lampung berbatasan langsung dengan beberapa wilayah Kabupaten di Provinsi Lampung, antara lain:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan;
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran dan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan serta Teluk Lampung;

3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Gedung Tataan dan Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran;
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.

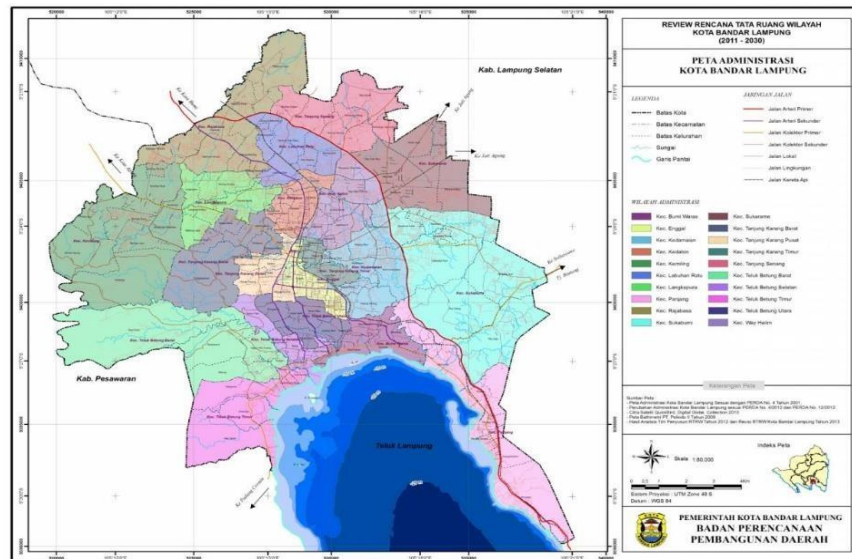
Wilayah Kota Bandar Lampung sebagian besar berada pada ketinggian antara 0-500 meter dari permukaan laut, kecuali sebagian wilayah Kecamatan Kedaton, Tanjung Karang Barat dan Kecamatan Kemiling berada pada ketinggian antara 500-700 meter dari permukaan laut.

Tabel 4. Wilayah Administrasi Kota Bandar Lampung

NO	Kecamatan	Luas (ha)
1	Kedaton	457
2	Sukarame	1.475
3	Tanjung Karang Barat	1.064
4	Panjang	1.415
5	Tanjung Karang Timur	203
6	Tanjung Karang Pusat	405
7	Teluk Betung Selatan	380
8	Teluk Betung Barat	1.102
9	Teluk Betung Utara	425
10	Rajabasa	636
11	Tanjung Senang	1.780
12	Sukabumi	2.821
13	Kemiling	2.505
14	Labuhan Ratu	864
15	Way Halim	535
16	Langkapura	736
17	Enggal	349

Tabel 4. lanjutan		1	875
19	Teluk Betung Timur		1.142
20	Bumi Waras		465
Jumlah			19,722

Sumber : RTRW Kota Bandar Lampung. 2011-2030



Gambar 2 Peta Administrasi Kota Bandar Lampung

Sumber : RTRW Kota Bandar Lampung, 2011-2030

4.1.4 Topografi Kota Bandar Lampung

Kota Bandar Lampung memiliki kondisi topografi yang beragam, mulai dari dataran pantai sampai kawasan perbukitan dan pegunungan, dengan ketinggian permukaan antara 0-500 meter, dengan topografi perbukitan hingga bergunung membentang dari arah Barat ke Timur dengan puncak tertinggi pada Gunung Betung di sebelah Barat Gunung Dibalau serta perbukitan Batu Serampok disebalah Timur. Kondisi topografi di tiap-tiap wilayah yang ada di Kota Bandar Lampung dapat dijelaskan Sebagai berikut:

- a. Wilayah pantai terdapat disekitar Teluk Betung dan Panjang dan pulau di Bagian Selatan.

- b. Wilayah landai/dataran terdapat disekitar Kedaton dan Sukarame di Bagian Utara;
- c. Wilayah perbukitn terdapat disekitar Teluk Betung Bagian Utara
- d. Wilayah dataran tinggi terdapat dan sedikit bergunung terdapat disekitar Tanjung Karang Pusat bagian barat yaitu Gunung Betung, Sukadanaham dan Gunung Dibalau serta perbukitan Batu Serampok dibagian Timur.

4.1.5 Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk Kota pada tahun 2012 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan pada tahun 2011 yang jumlahnya sekitar 895.370 jiwa. Dalam kurun waktu 10 tahun jumlah penduduk Kota Bandar Lampung mengalami pertumbuhan sekitar 1,59 % per tahunnya. Penduduk Kota Bandar Lampung berdasarkan Sensus Penduduk Nasional 2012 yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik (BPS) berjumlah 1.212.129 jiwa. Sebaran penduduk kota paling banyak berada di Kecamatan Panjang yang berjumlah 91.080 jiwa, sedangkan paling sedikit berada di Kecamatan Teluk Betung Barat dengan jumlah 34.031 jiwa. Jumlah penduduk Kota Bandar Lampung Tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 4.2 sebagai berikut.

Tabel 5. Jumlah Penduduk Kota Bandar Lampung 2020

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)
		2020
1.	Kedaton	81.704
2.	Sukarame	66.124
3.	Tanjung Karang Barat	70.327
4.	Panjang	103.331
5.	Tanjung karang Timur	57.057
6.	Tanjung Karang Pusat	76.575
7.	Teluk Betung Selatan	57.296
8.	Teluk Betung Barat	38.608
9.	Teluk Betung Utara	75.084
10.	Rajabasa	40.879
11.	Tanjung Senang	85.576
12.	Sukabumi	72.670
13.	Kemiling	87.526
14.	Labuhan Ratu	66.12
15.	Way Halim	92.330
16.	Langkapura	47.866
17.	Enggal	47.193
18.	Kedamaian	71.852
19.	Teluk Betung Timur	59.039
20.	Bumi Waras	78.011
	Jumlah	1.375.170

Sumber Cipta Karya PU, 2020

4.2 Partai Politik dan Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung

4.2.1 Partai Peserta Pemilu Kota Bandar Lampung Tahun 2019

Pada tahun 2019 diselenggarakannya pemilu kota bandar lampung, pilkada diadakan guna memilih wali kota dan wakil walikota Bandar Lampung tahun 2020, Berdasarkan hasil Pemilu 2019 terdapat 10 partai politik yang mendudukkan wakilnya di DPRD Bandar Lampung. Hasil pemilihan umum legislatif 2019 di Kota Bandar Lampung terdapat 10 Partai Politik dengan jumlah 50 Kursi di DPRD Kota Bandar Lampung, yaitu:

Tabel 6. Partai Politik dan Jumlah Kursi Yang diduduki

NO.	PARTAI POLITIK	JUMLAH KURSI
1.	PDI-P	9/50
2.	GERINDRA	7/50
3.	PKS	6/50
4.	PAN	6/50
5.	GOLKAR	6/50
6.	NASDEM	5/50
7.	DEMOKRAT	5/50
8.	PKB	3/50
9.	PERINDO	2/50
10.	PPP	1/50

Sumber: KPU Kota Bandar Lampung tahun 2019

Dengan demikian data jumlah kursi partai politik di DPR Kota Bandar Lampung berdasarkan hasil pemilu kota Bandar Lampung tahun 2019. Hasil tersebut sangatlah berpengaruh dan dapat dijadikan salah satu data pendukung mengenai tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik, dengan jumlah kursi terbanyak yang menduduki parlemen adalah partai PDI-P.

4.2.2 Data Partisipasi Pemilu Kota Bandar Lampung Tahun 2020

Berdasarkan Data Pemilih tetap Kota Bandar Lampung dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang pelaksanaan pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota.

Tabel 7. Daftar Pemilih Tetap Kota Bandar Lampung Tahun 2020

No	NAMA KECAMATAN	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH
		KELURAHA N	TPS	PEMILIH L+P
1.	Kedaton	7	87	32.620
2.	Sukarame	6	98	37.090
3.	Tanjung Karang Barat	7	93	36.648
4.	Panjang	8	123	42.564
5.	Tanjung Karang Timur	5	52	22.909
6.	Tanjung Karang Pusat	7	74	28.935
7.	Teluk Betung Selatan	6	84	30.947
8.	Teluk Betung Barat	5	59	23.128
9.	Teluk Betung Utara	6	73	29.277
10.	Rajabasa	7	76	28.486
11.	Tanjung Senang	5	87	33.212
12.	Sukabumi	7	106	42.496
13.	Kemiling	9	122	45.929
14.	Labuhan Ratu	6	81	31.008
15.	Way Halim	6	112	42.451
16.	Langkapura	5	60	24.133
17.	Enggal	6	48	17.403
18.	Kedamaian	7	86	33.403
19.	Teluk Betung Timur	6	80	29.292
20	Bumi Waras	5	99	35.347
TOTAL		126	1700	647.278

Sumber: KPU Kota Bandar Lampung tahun 2020

Daftar Pemilihan Tetap (DPT) dengan jumlah 647.278 (Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tujuh Delapan) pemilih dengan rincian laki-laki berjumlah 324.429 (Tiga Ratus Dua Puluh Empat Ratus Dua Puluh Sembilan) pemilih, dan perempuan berjumlah

322.849 (Tiga Ratus Dua Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan) pemilih, yang tersebar di 20 (Dua Puluh) kecamatan, 126 (Seratus Dua Puluh Enam) kelurahan, dan 1700 (seribu tujuh ratus) TPS, Sesuai dengan rincian sebagaimana terlampir dalam data pemilih tetap tahun 2020.

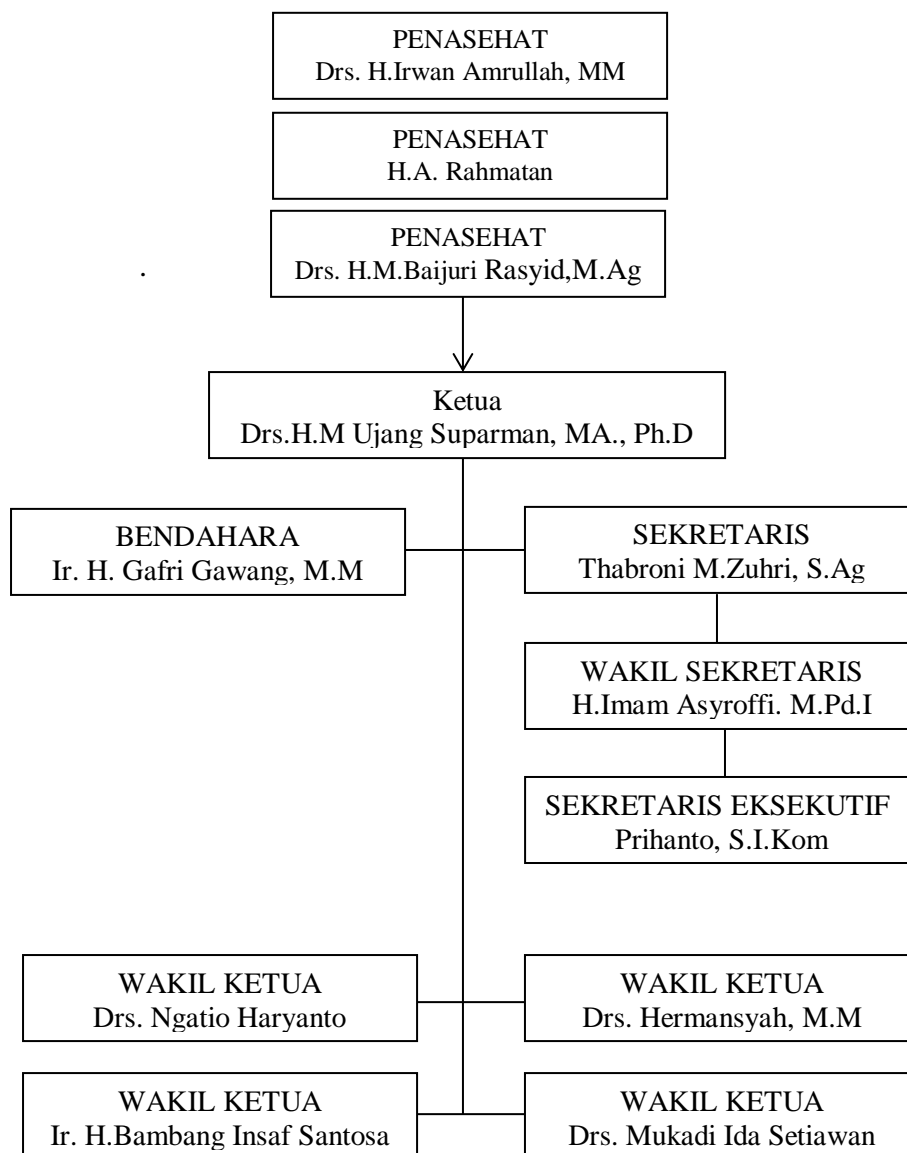
4.3 Latar Belakang Organisasi Masyarakat Kota Bandar Lampung

4.3.1 Muhammadiyah Kota Bandar Lampung

”Muhammadiyah” secara bahasa berarti ”pengikut Nabi Muhammad”. Penggunaan kata ”Muhammadiyah” dimaksudkan untuk menisbahkan (menghubungkan) dengan ajaran dan jejak perjuangan Nabi Muhammad. Penisbahan nama tersebut menurut H. Djarnawi Hadikusuma mengandung pengertian sebagai berikut: ”Dengan nama itu dia bermaksud untuk menjelaskan bahwa pendukung organisasi itu ialah umat Muhammad, dan dasarnya adalah ajaran Nabi Muhammad saw, yaitu Islam. Dan tujuannya ialah memahami dan melaksanakan agama Islam sebagai yang memang ajaran yang serta dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw, agar supaya dapat menjalani kehidupan dunia sepanjang kemauan agama Islam. Dengan demikian ajaran Islam yang suci dan benar itu dapat memberi nafas bagi kemajuan umat Islam dan bangsa Indonesia pada umumnya.”

Berdirinya Muhammadiyah Kota Bandar Lampung yaitu pada tahun 1939, Muhammadiyah sebagai organisasi yang bergerak dalam bidang pendidikan, dakwah dan kemasyarakatan dengan pola dasar perjuangan dakwah, dan setiap anggota Muhammadiyah mempunyai kewajiban perihatin dengan lingkungannya. Muhammadiyah sebagai organisasi amar ma’ruh nahi munkar tentu memiliki tujuan dalam pendiriannya, yaitu sangat menjunjung dan menegakan ajaran Islam sehingga

terciptanya masyarakat islam yang sebenar-benarnya. Nilai semangat juang yang ditunjukkan oleh tenaga pendidik Muhammadiyah dalam upaya untuk terus berusaha mencerdaskan menjadi generasi yang bermanfaat bagi agama, masyarakat dan negara. Nilai semangat juang akan mengajarkan kita bahwa usaha dengan sungguh-sungguh akan menghasilkan pencapaian yang diharapkan. Nilai kerja keras oleh para kader Muhammadiyah yang termasuk dalam tenaga pendidikan dalam menghadapi hambatan dan tantangan dalam bidang pendidikan dan lainnya yang ada menunjukkan bahwa Muhammadiyah mampu melewati segala kesulitan dan mampu untuk mengatasinya.



Gambar 3. Struktur Organisasi Pimpinan Muhammadiyah Kota Bandar Lampung

Sumber: Muhammadiyah Kota Bandar Lampung

Muhammadiyah Memiliki Lambang Tersendiri, Yang mana dari setiap simbol merprentasikan jiwa tubuh Muhammadiyah itu Sendiri :



Gambar 4. Lambang Muhammadiyah

Sumber: Muhammadiyah Online.co.id

Arti Lambang :

1. Matahari merupakan titik pusat dalam tata surya dan merupakan sumber kekuatan semua makhluk hidup yang ada di bumi. Jika matahari menjadi kekuatan cikal bakal biologis, Muhammadiyah diharapkan dapat menjadi sumber kekuatan spiritual dengan nilai-nilai Islam yang berintikan dua kalimat syahadat.
2. Duabelas sinar matahari yang memancar ke seluruh penjuru diibaratkan sebagai tekad dan semangat warga Muhammadiyah dalam memperjuangkan Islam, semangat yang pantang mundur dan pantang menyerah seperti kaum Hawari (sahabat nabi Isa yang berjumlah 12)
3. Warna Putih pada seluruh gambar matahari melambangkan kesucian dan keikhlasan

4. Warna Hijau yang menjadi warna dasar melambangkan kedamaian dan dan kesejahteraan.

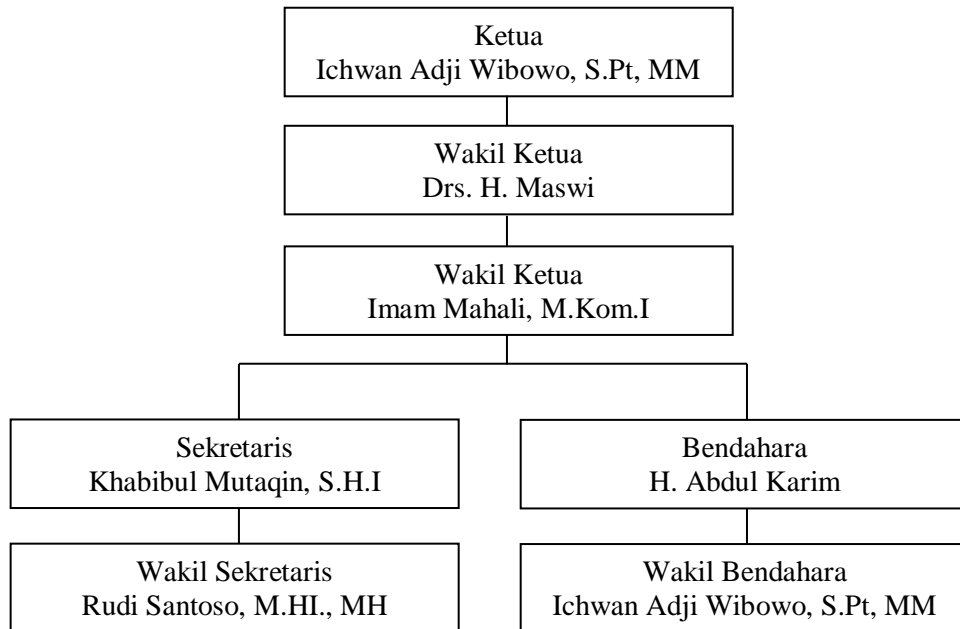
4.3.2 Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Bandar Lampung

Nahdlatul Ulama (NU) Provinsi Lampung adalah organisasi keagamaan dan kemasyarakatan yang terdapat dalam lingkup wilayah Provinsi Lampung yang berhaluan Ahlul Sunnah Wal Jama'ah (Aswaja), dan merupakan bagian dari organisasi keagamaan (Jami'yah Diniyyah Islamiyyah) Nahdlatul Ulama tingkat Nasional. Sebagaimana induknya, organisasi ini ditujukan sebagai wadah mempersatukan diri dan langkah dalam melaksanakan tugas memelihara, melestarikan, mengemban dan mengamalkan ajaran Islam 'ala ahadil madzhabil arba'ah dalam rangka mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil'alamiin.

Pada tahun 1964 Lampung menjadi provinsi memisahkan diri dari Provinsi Sumatera Selatan, PBNU membentuk mandataris menyusun Pengurus NU Wilayah Lampung yang diketuai oleh KH. Muhammad Zakri. Pada saat berdirinya, NU Wilayah Lampung pada tahun 1964 terdiri dari tujuh cabang yaitu ; Cabang Teluk Betung, Kota Bumi, Menggala, Krui, Sukarame, Kota Agung, dan Talang Padang. Kepengurusan NU.

Berdasarkan analisis obyektif tentang kondisi NU Provinsi Lampung saat ini, analisis terhadap kajian SWOT termasuk harapan sekian banyak stakeholders NU, maka Visi atau kondisi ideal yang diharapkan oleh PWNU Lampung Masa Khidmah 2012-2017 adalah "Terciptanya NU Provinsi Lampung sebagai Organisasi yang Terkonsolidasi, Mantap, dan Mandiri dalam Meningkatkan Pelayanan terhadap Hak-Hak Jama'ah secara Demokratis & Ber-Akhlakul Karimah" Adapun misi PWNU Lampung untuk mewujudkan visi tersebut di atas adalah Penataan

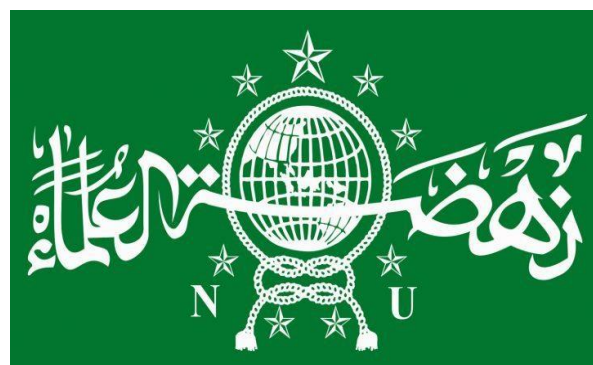
dan pengembangan manajemen organisasi, Pengembangan Keagamaan, Pengembangan dan Pelayanan Jama'ah, Pengembangan Jaringan Kerjasama Kelembagaan.



Gambar 5. Struktur Organisasi Pengurus Cabang Nadhatul Ulama Kota Bandar Lampung.

Sumber: Diolah Oleh Peneliti 2021

Nadhatul Ulama Memiliki Lambang Tersendiri, Yang mana dari setiap simbol merprentasikan jiwa tubuh Nadhatul ulama itu Sendiri :



Gambar 6. Lambang Nadhatul Ulama

Sumber: NU online.co.id

Arti lambang NU merupakan hasil istikharah Kiai Ridwan Abdullah. Ia adalah seorang kiai yang alim, tapi memiliki kelebihan yang lain, yaitu

terampil melukis. Ia hanya diberi waktu satu setengah bulan untuk menyelesaikan tugasnya itu. Ternyata dengan waktu yang ditentukan itu, dia tak mampu membuatnya

1. Bola dunia terletak ditengah-tengah berarti tempat kediaman untuk mengabdikan dan beramal guna mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.
2. Tali yang mengikat berarti agama Islam sebagai pengikat kehidupan manusia, untuk meningkatkan agar selalu tolong menolong terhadap sesama dan meningkatkan taqwa kepada Allah Swt.
3. Lima bulan bintang diatas, yang terbesar dipuncak berarti: Sunnah Rasulullah SAW yang diikuti dengan setia oleh empat sahabat besar: Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali Radhiyallah'anhum.
4. Arti seluruh bintang yang berjumlah Sembilan buah yaitu: Walisongo atau Wali Sembilan yang berarti dalam berdakwah meneladani tata cara Wali Songo, yakni cara damai dan bijaksana tanpa kekerasan.

Arti warna :

1. Putih melambangkan ketulusan dan keikhlasan.
2. Hijau melambangkan kesejukan dan kedamaian.
3. Tulisan Nahdlatul Ulama berarti: Muslimat NU bagian yang senantiasa meneruskan dan mencerminkan perjuangan ulama.

4.3.3 Korp Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Provinsi Lampung

Sebagai organisasi mahasiswa Islam, HMI bisa dikatakan fenomenal dengan melihat banyaknya kader HMI baik ditingkat daerah maupun nasional. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) telah mencatatkan sejarah bagi perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Berdiri pada tanggal 5 Februari 1947 M atau bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1366 H di Yogyakarta dengan dicetuskan oleh Lafran Pane beserta 14 mahasiswa Sekolah Tinggi Islam (Universitas Islam Indonesia).

Saat awal didirikannya, HMI memiliki tujuan, Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan mempertinggi derajat rakyat Indonesia dan Menegakkan dan mengembangkan ajaran agama Islam. Namun seiring dengan perkembangan zaman, tujuan HMI terus mengalami perubahan agar tetap relevan dalam perjuangan-perjuangannya. HMI memiliki tujuan, Terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdian, yang bernaftaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang di ridhoi Allah Subhana Wa Ta'ala

HMI masuk di Lampung pada fase Pertumbuhan dan Konsolidasi Bangsa tepatnya pada tahun 1960. Masuknya HMI di Lampung juga disebabkan dengan didirikannya sebuah perguruan tinggi baru di Lampung yang terbentuk dari Universitas Sriwijaya (UNSRI) di Sumatra Selatan. Terbentuknya Universitas di Lampung tersebut, melatar belakangi inisiasi Pengurus Besar (PB) HMI yang ingin mengembangkan proses pengkaderan hingga pelosok negeri Indonesia termasuk di Lampung yang bertempat di Ibu Kota Provinsi yang pada saat itu Ibu Kotanya Tanjung Karang. PB HMI kemudian memberikan mandat dua orang mahasiswa yang bernama Basirun Usman dan M. Zaini untuk membentuk HMI di Provinsi Lampung.

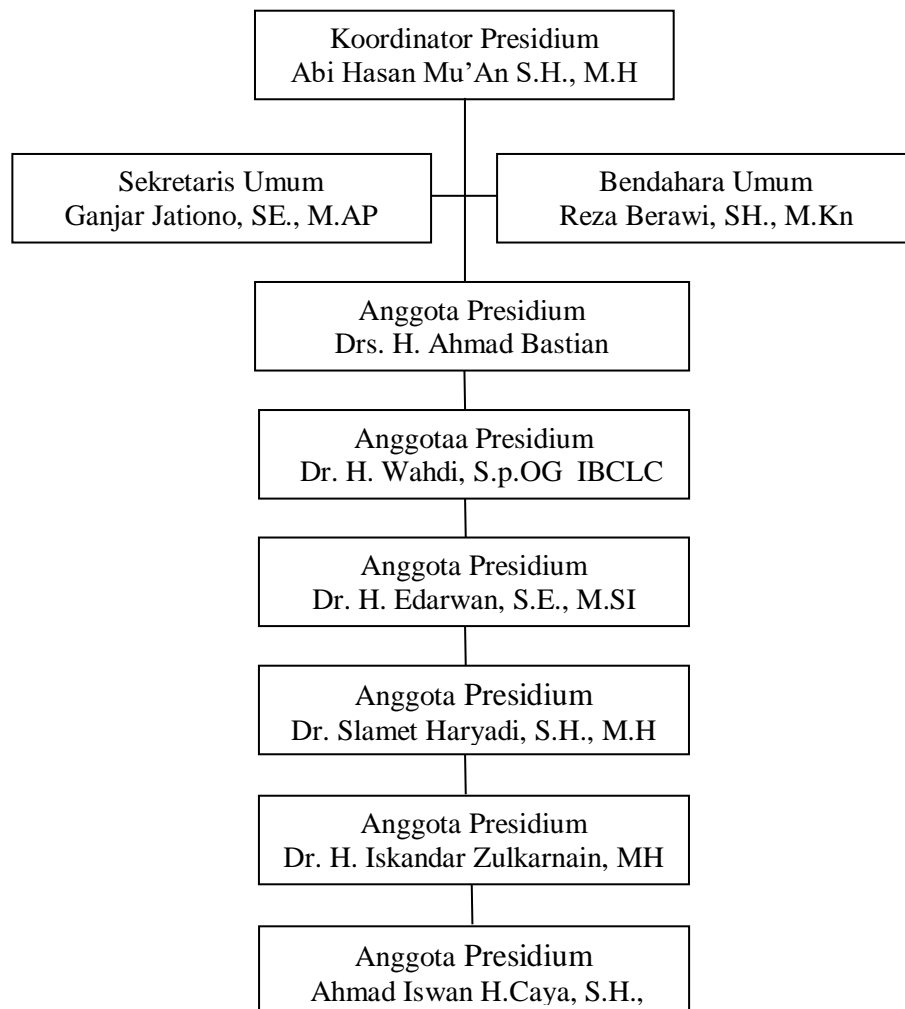
Sejak terbentuknya hingga saat ini, HMI di Lampung telah berkembang menjadi tiga cabang yakni Bandar Lampung, Metro dan Kota Bumi. Bandar Lampung menjadi Cabang terbesar saat ini diantara Metro dan Kotabumi dengan memiliki 13 Komisariat dengan jumlah kader lebih dari 3000 yang tersebar pada 4 perguruan tinggi ternama yakni Universitas Lampung (UNILA), Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, Universitas Bandar Lampung (UBL) dan Institut Bisnis dan Informatika (IBI) Darmajaya.

Lampung, sebagai miniatur Indonesia dengan keragaman yang ada didalamnya turut andil dalam proses perjuangan tersebut. Berhimpunnya para mahasiswa islam dalam satu organisasi telah membentuk pola juang, pola laku dan sikap pada wilayahnya masing-masing. Dengan catatan sejarah tersebut, Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Provinsi Lampung telah mencatatkan sejarah perjuangannya.

Pimpinan Presidium Organisasi Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Provinsi Lampung

1. Ketua Presidium : Abi Hasan Muan S.H.,M.H
2. Sekretaris Umum : Ganjar Jationo, SE., M.AP
3. Bendahara Umum : Reza Berawi, SH., M.Kn
4. Anggota Presidium : Drs. H. Ahmad Bastian
Dr. H. Wahdi, S.p.OG IBCLC
Dr. H. Edarwan, S.E., M.SI
Dr. Slamet Haryadi, S.H., M.H
Dr. H. Iskandar Zulkarnain, MH
Ahmad Iswan H.Caya, S.H., M.H

Struktur Organisasi Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Provinsi Lampung :



Gambar 7. Sturuktur Presidium Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Provinsi Lampung

Sumber : Diolah Oleh Peneliti 2021

Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Memiliki Lambang Tersendiri, Yang mana dari setiap simbol merprentasikan jiwa tubuh Korps Himpunan Mahasiswa Islam itu sendiri



Gambar 8. Lambang Himpunan Mahasiswa Islam

Sumber : PBhmi.Info.com

Arti Lambang :

1. Bentuk huruf alif: sebagai huruf hidup, melambangkan rasa optimisme bagi kelangsungan hidup HmI pada masa depan
2. Huruf alif merupakan angka 1 (satu): simbol kehidupan ber-Tauhid (perasaan ber-Ketuhanan, sebagai dasar / dan semangat HMI
3. Bentuk perisai: lambang kepeloporan HmI
4. Bentuk jantung: sebagai pusat kehidupan manusia, melambangkan fungsi perkaderan HmI
5. Bentuk pena: melambangkan HmI organisasi mahasiswa yang senantiasa haus akan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi
6. Gambar bulan bintang: lambang kejayaan umat Islam seluruh dunia
7. Warna hijau: lambang keimanan, keislaman, dan kemakmuran
8. Lambang hitam: lambang ilmu pengetahuan
9. Keseimbangan warna hijau dan hitam: lambang keseimbangan, esensi, dan kepribadian HmI

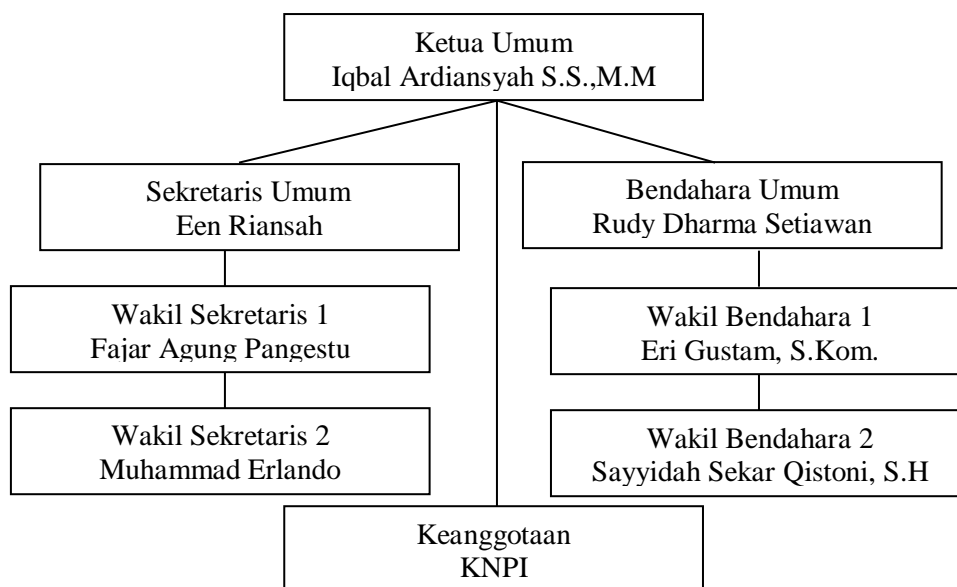
10. Warna putih: lambang kemurnian dan kesucian perjuangan Hml
11. Puncak tiga: lambang Iman, Islam, dan Ikhsan, serta wujud keterpaduan antara iman, ilmu, dan amal
12. Tulisan Hml: singkatan dari Himpunan Mahasiswa Islam

4.3.4 Komite Nasional Pemuda Indonesia Kota Bandar Lampung

Komite Nasional Pemuda Indonesia, atau lebih populer dengan singkatan KNPI, adalah organisasi kepemudaan yang awalnya merupakan gabungan dari kelompok Cipayung, binaan kader Golkar dan tentara melalui deklarasi yang dipimpin oleh David Napitulu pada tanggal 23 Juli 1973. Organisasi ini lahir melalui Deklarasi Pemuda Indonesia pada hari yang sama dengan maksud menumbuhkan, meningkatkan, dan mengembangkan kesadaran sebagai suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Organisasi ini langsung mendapat restu dari pemerintahan orde baru dan pada tahun itu pula, mereka mengikuti unjuk rasa mahasiswa dalam penentangan masuknya modal asing. Tahun berikutnya, mereka juga turut serta dalam demonstrasi Malari. Anggota KNPI banyak yang akhirnya bergabung dengan Golkar. Meskipun dianggap sebagai bagian dari Orde Baru dan sempat diusulkan untuk dibubarkan, namun KNPI tetap bertahan hingga setelah jatuhnya Suharto pada tahun 1998. Setelahnya, Idrus Marham terpilih sebagai Ketua Umum. Ia mewacanakan rejuvenasi KNPI atau penyegaran kembali peran KNPI di tengah realitas politik nasional. Rejuvenasi ini akhirnya memaksa KNPI untuk independen dan kembali memposisikan pemuda sebagai mitra kritis pemerintah.

Komite Nasional Pemuda Indonesia Kota Bandar Lampung merupakan perwakilan daerah yang merupakan lembaga independen dalam mengkritik dan memposisikan dirinya sebagai pemuda yang memberi kritis kepada pemerintahan khususnya Kota Bandar Lampung. Komite Nasional Pemuda Indonesia Kota Bandar Lampung merupakan organisasi yang bekerja dengan mahasiswa yang ada di Kota Bandar Lampung dalam mengawasi segala aktifitas Politik maupun Pemerintahan yang ada di Kota Bandar Lampung.



Gambar 9 Struktur Organisasi KNPI Kota Bandar Lampung

Sumber : Diolah Oleh Peneliti 2021

Komite Nasional Pemuda Indonesia Memiliki Lambang Tersendiri, Yang mana dari setiap simbol merprentasikan jiwa Komite Nasional Pemuda Indonesia itu sendiri :



Gambar 10 Lambang Komite Nasional Pemuda Indonesia

Sumber: knpi.Cehutura.co.id

1. Keterangan Warna :

- a. Orang : Coklat
- b. Daun dan Huruf KNPI : Kuning
- c. Dasar bagian bawah : Biru
- d. Dasar bagian atas : Putih
- e. Garis Pinggir : Hitam

2. Pengertian Lambang :

- a. Bentuk figur : Perlambang Pemuda, menatap ke masa depan dengan optimis
- b. Memegang “daun berhelai lima” perlambang akan setiap tindakan perbuatan selalu berpegang pada azas “Pancasila” dan juga simbol untuk kemakmuran.
- c. Figur yang mendorong : mengartikan maju, kedinamisan, kemauan bekerja, membangun
- d. Huruf-huruf KNPI yang “menyatu” mengartikan : Persatuan dan kegotong royongan, kesatuan tindak dalam KNPI
- e. Bentuk : mengartikan perisai : ketahanan Pemuda terhadap pengaruh luar
- f. mengartikan wadah : tempat berkumpul, bersatunya pemuda-pemuda

3. Pengertian Tata Warna :

- a. Biru : Menggambarkan lautan Indonesia yang mengelilingi Kepulauan Nusantara
- b. Coklat Muda : Manusia / Bumi Indonesia
- c. Kuning Muda / Kehijau-hijauan : Warna daun muda yang menggambarkan generasi muda harapan bangsa dan sifat pemuda itu sendiri yang penuh optimis dan harapan

4.3.5 Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Kota Bandar Lampung

Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Bandar Lampung adalah wadah bagi para mahasiswa /i Kristen di Bandar Lampung untuk menyatakan ajaran Kekristenan melalui 3 medan Layan GMKI. Berdirinya CSV tidak terpisahkan dengan peranan Ir. C.L Van Doorn, seorang ahli kehutanan yang mempelajari aspek sosial dan ekonomi khususnya ilmu pertanian dan kemudian memperoleh doktor di bidang ekonomi serta sarjana di bidang teologi. Dengan adanya mahasiswa di Indonesia dan bersamaan dengan berdirinya *School tot Opleiding van Indishe Artsen* (STOVIA) tahun 1910-1924 di Batavia.

Selain itu, berdiri juga *Nederlandsch Indische Artsen School* (NIAS) di Surabaya (1913), Sekolah Teknik di Bandung (1920), Sekolah Kedokteran Hewan di Bogor (1914) dan Sekolah Hakim Tinggi di Jakarta (1924). Pada tahun 1924 terbentuklah Batavia CSV dan inilah cabang CSV yang pertama. Kurun waktu 1925-1927 para mahasiswa di Surabaya yang tergabung dalam Jong Indie aktif melakukan penelaahan Alkitab. Kelompok ini bersama Batavia CSV mengadakan Konferensi di Kaliurang pada bulan Desember 1932. Pembicara-pembicara utama kegiatan tersebut adalah Dr. J. Leimena, Ir. C.L van Doorn dan Dr. Hendrik Kraemer. Selain itu, beberapa sumber menyebut bahwa Amir Sjarifuddin juga terlibat dalam CSV op Java.

Jumlah anggota CSV op Java dalam kurun waktu 1930-an sekitar 90 orang. Cabang-cabangnya baru ada di kota-kota perguruan tinggi di Jawa (Jakarta, Bogor, Bandung dan Surabaya). Walaupun kecil dan lemah namun keberadaan CSV op Java telah berhasil meletakkan dasar bagi pembinaan mahasiswa Kristen yang akan dilanjutkan GMKI di kemudian hari. GMKI kemudian berkembang dengan berdirinya cabang-cabang GMKI di berbagai wilayah Indonesia. Dalam transisi kepemimpinan nasional di era Ode Lama, Orde Baru, era Reformasi dan pada masa kini, GMKI mencoba memainkan perannya sebagai wujud semangat nasionalisme dan ekumenisme.

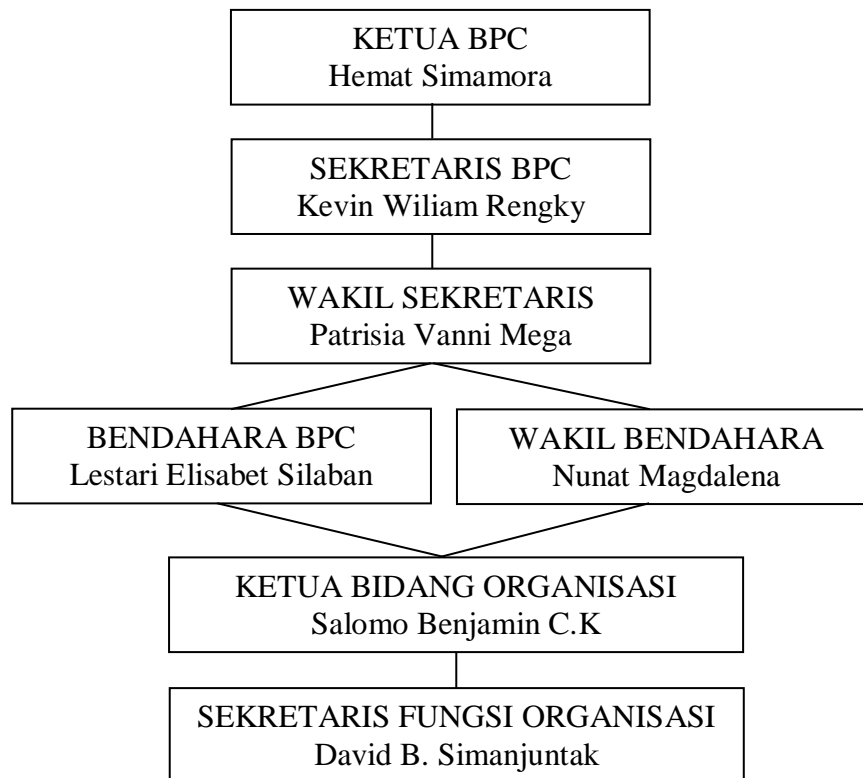
Pada dasarnya, organisasi kemahasiswaan semuanya pasti bertujuan untuk mendidik anggotanya supaya anggota siap untuk bersaing di masyarakat. GMKI tidak jauh berbeda dengan organisasi kemahasiswaan lainnya, tetapi GMKI mempunyai kelebihan yaitu memiliki jaringan diseluruh indonesia. GMKI adalah dan harus menjadi pelopor dari semua kebaktian yang akan dan mungkin harus dilakukan di Indonesia. Nilai yang menjadi kelebihan GMKI adalah berdoa, bersaksi, bersekutu, berkreasi, dan belajar. Selain nilai, GMKI juga memiliki prinsip yaitu, kemamhasiswaanya, kekristenannya, ke Indonesiannya. GMKI juga memiliki tri panji yaitu, tinggi iman, tinggi ilmu dan tinggi pengabdian. GMKI bukanlah organisasi yang bersifat politik, tetapi organisasi yang bersifat gerejawi

Perubahan-perubahan tatanan organisasi baik berupa AD/ART mengalami berbagai penyempurnaan, tantangan dan pergumulan GMKI yang tertuang dalam Tema dan Sub tema dan senantiasa berubah setiap Kongres ke Kongres sesuai kondisi dan pandangan GMKI ke depan, perbaikan dan penyempurnaan sistem pendidikan kader yang tertuang dalam Pola Dasar Sistem Pendidikan Kader (PDSPK) serta format aksi pelayanan yang

senantiasa dievaluasi sebagai wujud partisipasi GMKI dalam bidang eksternalnya.

Ketika di awalnya GMKI tumbuh dari kelompok-kelompok doa dan diskusi-diskusi hingga akhirnya membentuk suatu organisasi kemahasiswaan yang permanen. Kedua semangat diatas telah membawa sejarah GMKI menjadi salah satu kekuatan gerakan pro demokrasi dalam mewujudkan nilai-nilai demokrasi, penegakan hukum dan hak asasi manusia.

Visi : Terwujudnya kedamaian, kesejahteraan, keadilan, kebenaran, keutuhan ciptaan dan demokrasi di Indonesia berdasarkan kasih. Misi : Mengajak mahasiswa dan warga perguruan tinggi lainnya kepada pengenalan akan Yesus Kristus selaku Tuhan dan Penebus dan memperdalam iman dalam kehidupan dan pekerjaan sehari-hari. Membina kesadaran selaku warga gereja yang esa di tengah-tengah mahasiswa dan perguruan tinggi dalam kesaksian memperbaharui masyarakat, manusia dan gereja. Mempersiapkan pemimpin dan penggerak yang ahli dan bertanggungjawab dengan menjalankan panggilan di tengah-tengah masyarakat, negara, gereja, perguruan tinggi dan mahasiswa, dan menjadi sarana bagi terwujudnya kesejahteraan, perdamaian, keadilan, kebenaran dan cinta kasih ditengah-tengah manusia dan alam semesta.



Gambar 11. Struktur Organisasi Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Kota Bandar Lampung

Sumber: Diolah Oleh Peneliti 2021

Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia memiliki ambang tersendiri, Yang mana dari setiap simbol merprentasikan arti dari organisasi masyarakat itu sendiri



Gambar 12. Lambang GMKI

Sumber: gmki.co.or.id

Makna Lambang GMKI :

1. Bentuk Lencana Bersegi Lima : Panca kegiatan GMKI yaitu berdoa/beribadah, belajar, bersaksi, bersosialisasi dan berkreasi.
2. Bentuk Lencana Seperti Perisai : penghalau atau penangkis.
3. Tiga Garis Tegak Lurus : Tri Panji GMKI yaitu tinggi iman, tinggi ilmu dan tinggi pengamatan.
4. Salib : Perjuangan dan pengorbanan
5. Warna Putih Salib : kesucian, ketulusan dan kesungguh-sungguhan
6. Warna biru : Pengharapan dan Warna abu-abu : Tantangan

4.3.6 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kota Bandar Lampung

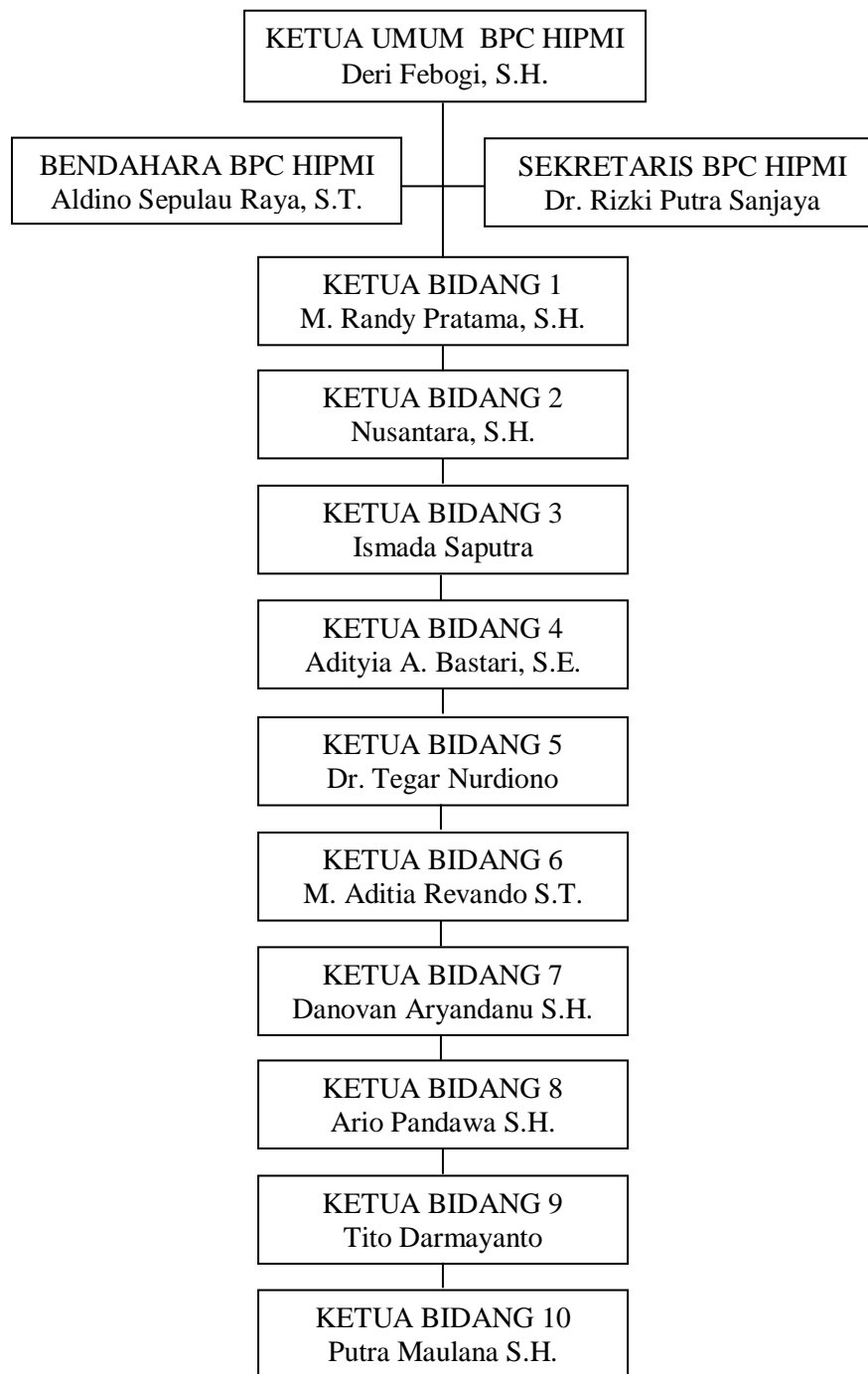
Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) didirikan pada 10 Juni 1972. Pendirian organisasi ini dilandasi semangat untuk menumbuhkan wirausaha di kalangan pemuda, karena pada saat itu tidak banyak kaum muda yang bercita-cita menjadi pengusaha. Perkembangan HIPMI dari masa ke masa, tidak banyak anak muda yang mempunyai impian menjadi pengusaha di waktu itu. Pada masa itu, anak muda mempunyai impian menjadi tentara dan setelah itu beralih mimpinya menjadi pegawai negeri sipil (PNS)

Seiring dengan berjalannya waktu banyak perubahan yang terjadi, perkembangan teknologi yang pesat ditambah dengan meningkatnya populasi manusia di Indonesia dan dunia pada umumnya memaksa manusia sebagai makhluk sosial harus berubah pula. Sumber daya alam (SDA) yang kian menipis memaksa kita melakukan inovasi untuk tetap dapat bertahan (survive). Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan secara berulang-ulang untuk bersikap hati-hati kepada semua pengusaha muda. Hati-hati terhadap perubahan besar dan cepat di sektor konsumsi yang disebut sebagai Revolusi Konsumen.

Sebanyak 141 juta penduduk Indonesia diperkirakan akan masuk dalam masyarakat kelas menengah pada 2020 ini. Angka tersebut meningkat hingga 100 persen dibandingkan pada lima tahun yang lalu, yang hanya sebanyak 70 juta masyarakat yang masuk dalam kelas menengah. Selain mengalami kenaikan jumlah, sebaran geografis konsumen pun juga semakin merata. Lima tahun lalu, sebanyak 25 kabupaten/kota yang hanya memiliki konsumen kelas menengah hingga lebih dari 500 ribu. Kendati demikian, ke depan, jumlah masyarakat kelas menengah tersebut diperkirakan akan tersebar hingga 54 kabupaten/kota. Dalam kata lain Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kota Bandar Lampung dalam hal ini juga sering melakukan kegiatan untuk mewujudkan UMKM yang lebih baik dengan bekerja sama dengan pemerintah Kota Bandar Lampung.

Struktur Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kota Bandar Lampung

Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kota Bandar Lampung memiliki struktur organisasi yang menjalankan program yang telah ditentukan untuk mewujudkan UMKM yang lebih baik dan mengelola segala kegiatan yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan dengan bekerja sama antar UMKM dan pemerintah Kota Bandar Lampung.



Gambar 13. Struktur Organisasi Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kota Bandar Lampung

Sumber: Diolah Oleh Peneliti 2021

Himpunan pengusaha muda Indonesia sudah memiliki lambang tersendiri, Yang mana dari setiap simbol merprentasikan arti dari organisasi masyarakat itu sendiri .



Gambar 14. Lambang Himpunan Pengusaha Muda Indonesia

Sumber: hipmi.org.id

Makna Lambang HIPMI :

1. Mendorong kader-kader HIPMI untuk dapat beradaptasi terhadap perubahan zaman.
2. Menggenjot sinergitas antara pengusaha dan pemerintah dalam membangun daerah.
3. Berkomitmen membuat aturan tertulis dan mempertahankan komunikasi.
4. Memperjelas dan mengomunikasikan misi, memperjelas misi dan ideologi.
5. Menjamin keadilan organisasi, memiliki prosedur penyampaian keluhan yang komprehensif dan menyediakan komunikasi dua arah yang ekstensif.
6. Menekankan kerjasama, saling mendukung, dan kerja tim.
7. Kesiediaan untuk bekerja keras sebagai bagian dari organisasi.
8. Kesiediaan untuk mengusahakan yang terbaik bagi organisasi

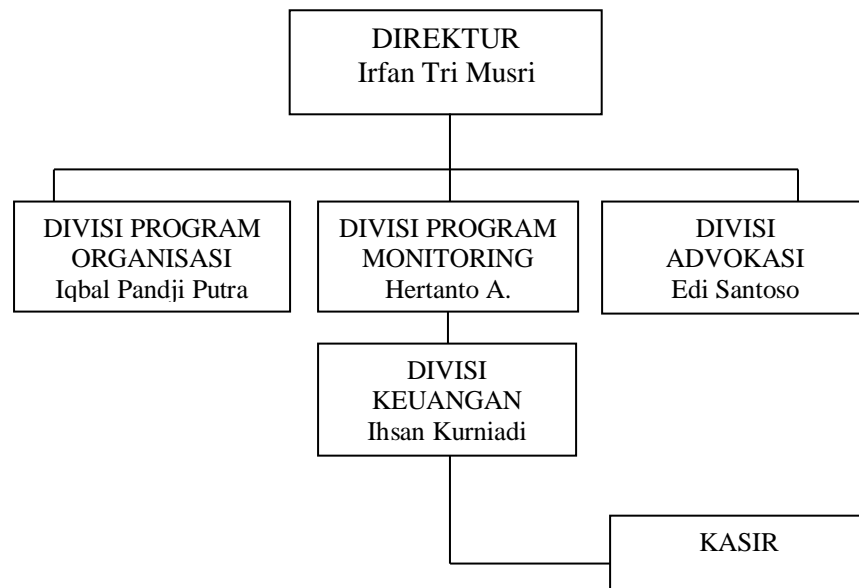
4.3.7 Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Provinsi Lampung

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) merupakan sebuah organisasi gerakan lingkungan hidup terbesar di Indonesia, dengan jumlah anggota sebanyak 498 organisasi dari unsur organisasi non pemerintah dan organisasi pencinta alam, serta 203 anggota individu yang tersebar di 28 propinsi di Indonesia. Sejak tahun 1980 hingga saat ini, WALHI secara aktif mendorong upaya-upaya penyelamatan dan pemulihan lingkungan hidup di Indonesia. WALHI bekerja untuk terus mendorong terwujudnya pengakuan hak atas lingkungan hidup, dilindungi serta dipenuhinya hak asasi manusia sebagai bentuk tanggung jawab Negara atas pemunahan sumber-sumber kehidupan rakyat.

Cikal bakal berdirinya walhi lampung sejak 15 Oktober 1991, saat ini memiliki 15 Lembaga anggota dan 4 anggota individu. WALHI Lampung merupakan organisasi publik yang mandiri dan tidak berorientasi laba. WALHI Lampung membuka keanggotaan baik yang berasal dari organisasi maupun individu. WALHI Lampung juga membuka diri bagi setiap orang untuk bergabung menjadi sahabat WALHI untuk bersama-sama melakukan pembelaan dan penyelamatan lingkungan hidup

Gerakan WALHI pertama kali di Lampung ditandai dengan keikutsertaan kelompok pecinta alam dalam acara “Sarasehan Lingkungan Hidup antar-LSM, Perguruan Tinggi, Pencinta Alam dan Pemerintah se-Sumatera,” pada tahun 1987, Kelompok Pencinta alam yang mewakili lampung adalah Pencinta Alam Watala, dan Putra Rimba (Edi Karizal Watala,Sentot Puri) yang diselenggarakan bersama oleh Gemapala Wigwam, Impalm, Kemasda, Sekretariat WALHI, dan PPLH UNSRI di Palembang Sumatera Selatan.

Kegiatan tersebut menjadi momentum baru gerakan WALHI Lampung dengan adanya pertemuan-pertemuan rutin kelompok pencinta alam Lampung yang di pelopori oleh Watala, Wanacala, Putra Rimba dengan membahas kegiatan tentang kasus-kasus lingkungan yang ada di provinsi Lampung. Walhi Lampung ini pun mengesahkan beberapa anggota forum dari kalangan LSM dan Pencinta Alam penambahan anggota forum menjadikan jumlah anggota forum menjadi 10 yaitu : Watala, Wanacala, PKBI, Putra Rimba, Mitra Bentala, Yasadhana, Mapala Unila, Masapala AKL, Matala UTB dan Mainaka.



Gambar 15. Struktur Organisasi WALHI Lampung

Sumber: walhilampung.or.id

Wahana Lingkungan Hidup memiliki lambing tersendiri, Yang mana dari setiap simbol merprentasikan arti dari organisasi masyarakat itu sendiri.



Wahana Lingkungan Hidup Indonesia

Gambar 16. Lambang Wahana Lingkungan Hidup Indonesia

Sumber: walhilampung.or.id

Dalam makna tulisan tersebut ada visi dan misi tersendiri dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia yaitu sebagai berikut ;

Visi : Terwujudnya suatu tatanan sosial, ekonomi dan politik yang adil dan demokratis yang dapat menjamin hak-hak rakyat atas sumber-sumber kehidupan dan lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan.

Misi : Mengembangkan potensi kekuatan dan ketahanan rakyat, mengembalikan mandat negara untuk menegakkan dan melindungi kedaulatan rakyat, mendekonstruksikan tatanan ekonomi kapitalistik global yang menindas dan eksploitatif menuju ke arah ekonomi kerakyatan, membangun alternatif tata ekonomi dunia baru, mendesakkan kebijakan pengelolaan sumber-sumber kehidupan rakyat yang adil dan berkelanjutan

4.3.8 Aliansi Jurnalis Independen

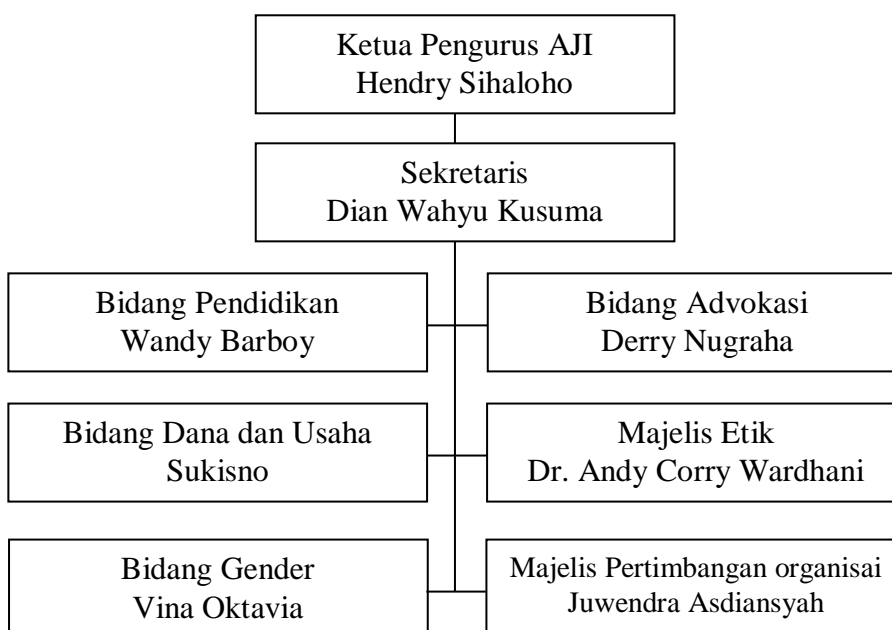
Aliansi Jurnalis Independen atau AJI adalah organisasi profesi jurnalis, yang didirikan oleh para wartawan muda Indonesia pada 7 Agustus 1994 di Bogor, Jawa Barat, melalui penandatanganan suatu deklarasi yang disebut "Deklarasi Sirnagalih". Organisasi ini didirikan sejak pembredelan tiga media Detik, Tempo, Editor pada 21 Juni 1994 dan didirikan sebagai upaya untuk membuat

organisasi jurnalis alternatif di luar PWI karena saat itu PWI dianggap menjadi alat kepentingan pemerintah Soeharto dan tidak betul-betul memperjuangkan kepentingan jurnalis.

Sekitar tahun 1991, jauh sebelum pembredelan tiga media, terjadi pertemuan informal belasan jurnalis di Taman Ismail Marzuki (TIM), Menteng, Jakarta Pusat. Dalam pertemuan tersebut, dibicarakan berbagai hal yang menyangkut kondisi pers Indonesia. Dalam pertemuan itulah, tercetus ide tentang perlunya membentuk organisasi jurnalis alternatif yang independen di luar PWI. Ada juga keinginan untuk membikin media sendiri. Sayangnya, pembicaraan itu tidak berlanjut menjadi aksi konkret. Di berbagai kota, sebelum berdirinya Aliansi Jurnalis Independen [AJI], sudah ada komunitas dan kelompok-kelompok diskusi jurnalis. Seperti, SPC atau Surabaya Press Club (Surabaya), FOWI atau Forum Wartawan Independen (Bandung), Forum Diskusi Wartawan Yogya atau FDWY (Yogyakarta), dan SJI (Solidaritas Jurnalis Independen) di Jakarta sendiri.

Kemudian para aktivis jurnalis dari sejumlah komunitas inilah yang kemudian ikut bergabung membentuk AJI, lewat Deklarasi Sirnagalih. Untuk menghormati dan mengakui keberadaan komunitas-komunitas inilah, maka pada diskusi di Sirnagalih waktu itu dipilih nama "aliansi" untuk AJI, dan bukan "persatuan" seperti PWI. AJI adalah organisasi jurnalis alternatif. Kata "alternatif" perlu ditekankan, untuk membedakan dari sebutan "tandingan." Istilah "tandingan" bermakna reaktif. Jika AJI sekadar tandingan dari PWI, maka eksistensi keberadaan AJI akan tergantung pada PWI. Jika PWI bubar, AJI juga harus bubar, karena kelahirannya hanyalah sebagai tandingan atau reaksi dari keberadaan PWI. Itulah sebabnya, sejak awal AJI tak pernah menyebut diri sebagai "tandingan PWI.

AJI Indonesia berkantor pusat di Jakarta, Jl. Kembang Raya No. 6, Kwitang, Senen, Jakarta Pusat. Organisasi AJI Indonesia dibantu pengurus AJI Kota di 38 daerah. Pengurus AJI Indonesia periode 2017-2020 adalah Ketua Umum Abdul Manan (Tempo) dan Sekjen Revolusi Riza (CNN Indonesia). Di Kota Bandar Lampung AJI merupakan aliansi jurnalis independen yang dimana semua anggota harus bersifat independen dan tidak berpihak kepada siapapun.



Gambar 17. Struktur Aliansi Jurnalis Independen

Sumber : Diolah Oleh Peneliti 2021

Alian Jurnalis Independen memiliki lambing tersendiri, Yang mana dari setiap simbol merprentasikan arti dari organisasi masyarakat itu sendiri



Gambar 18. Lambang Alian Jurnalis Independen

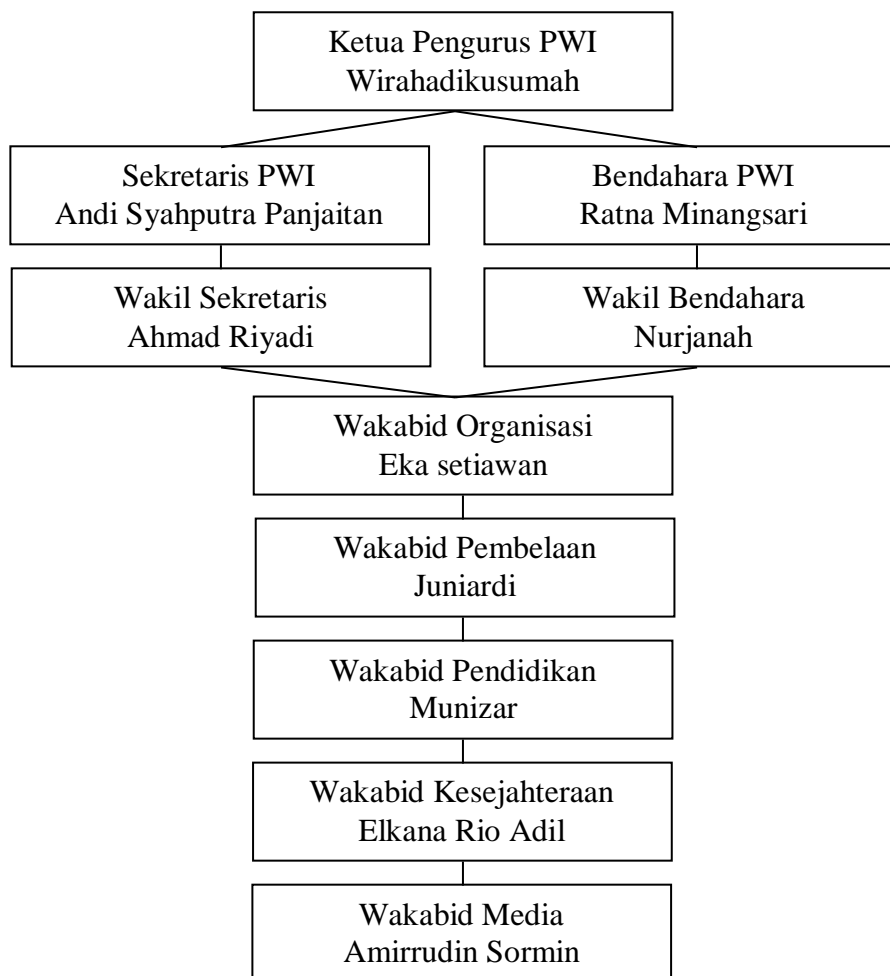
Makna logo ini merefleksikan cita-cita AJI ketika didirikan pada 1994, untuk tetap teguh memperjuangkan kebebasan pers dan mendorong profesionalisme jurnalis,” kata Abdul Manan, Ketua AJI Indonesia. menonjolkan dua unsur: pena dan burung. Pena diletakkan lebih tegak, bermakna filosofis bahwa profesi jurnalis harus independen. Sedangkan burung berarti keleluasaan berekspresi dan berorganisasi.

4.3.9 Persatuan Wartawan Indonesia

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) adalah organisasi wartawan pertama di Indonesia. PWI berdiri pada 9 Februari 1946 di Surakarta. Tanggal tersebut juga disebut sebagai Hari Pers Nasional. Dengan lahirnya PWI, wartawan Indonesia menjadi tangguh untuk tampil sebagai ujung tombak perjuangan Indonesia dalam menentang kembalinya kolonialisme dan negara lain yang ingin meruntuhkan RI. Organisasi PWI lahir mendahului SPS (Serikat Penerbit Surat kabar). Aspirasi perjuangan kewartawanan Indonesia yang melahirkan PWI juga yang melahirkan SPS, empat bulan kemudian yakni pada Juni 1946.

PWI menjadi wadah para wartawan untuk memperjuangkan bangsa lewat tulisan. Sejauh ini, sebagaimana para jurnalis Indonesia di masa penggalangan kesadaran bangsa, para wartawan dari generasi 1945 yang masih aktif tetap menjalankan profesinya dengan semangat mengutamakan perjuangan bangsa, kendati ada kendala menghadang kiprahnya. PWI sendiri mempunyai keanggotaan yang berasal dari seluruh Indonesia. Visi Menjadikan PWI organisasi profesional dan bermartabat di era transformasi lanskap media dengan spirit kebangsaan, kebebasan, dan kreativitas digital dan misi menjadikan PWI organisasi profesional dan bermartabat di era transformasi lanskap media dengan spirit kebangsaan, kebebasan, dan kreativitas digital.

Pengurus wartawan Indonesia di Lampung, merupakan prasarana masyarakat untuk mengetahui berita tentang apa saja yang terjadi di Provinsi Lampung, secara langsung masyarakat akan mendapatkan info-info aktual yang membuat masyarakat dapat menggali informasi dari media sosial dan modern saat ini.



Gambar 19. Struktur Persatuan Wartawan Indonesia

Sumber : Diolah Oleh Peneliti 2021

Alian Jurnalis Independen memiliki lambang tersendiri, Yang mana dari setiap simbol merprentasikan arti dari organisasi masyarakat itu sendiri.



Gambar 20. Lambang Persatuan Wartawan Indonesia

Sumber : pwi.or.id/

Makna Lambang Persatuan wartawan Indonesia sebagai berikut :

1. Dasar bentuk warna hitam: segi lima melambangkan rangka yang menjadi dasar landasan idiil ialah Pancasila.
2. Dasar bentuk bagian luar warna biru: rangkaian kapas dan padi melambangkan kesejahteraan, keadilan dan kemakmuran yang diperjuangkan oleh organisasi.
3. Dasar bentuk bagian dalam :
 - a. lidah api semangat merah
 - b. pena mas kuning mas
 - c. lensa kristal hitamputih
 - d. inisial PWI putih diwujudkan dalam bentuk pohon beringin, yang melambangkan pengayoman bagi kehidupan pers umumnya dan karyawan pers khususnya. Huruf lingkaran Persatuan Wartawan ditempatkan di atas, sebagai atap pelindung. Huruf lingkaran Indonesia ditempatkan dibagian bawah, sebagai tempat berpijak, dimana PWI berada.
4. Jumlah bulir kapas – 17 buah, jumlah lidah api – 8 buah, jumlah bulir padi 45 buah, yang melambangkan pegangan teguh pada angka-angka proklamasi 17-8-1945.

4.3.10. Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat

Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat atau disingkat JPPR merupakan jaringan 38 lembaga yang terdiri dari organisasi kemasyarakatan di bawah Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, LSM, lembaga pendidikan, lembaga antar iman, lembaga kemahasiswaan dan radio. Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) mendaftar menjadi pemantau pemilu 2019 ke Badan Pengawas Pemilu. Program ini bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan pada tiap tahapan Pemilu dengan menggunakan teknologi informasi (SMS, Phone, dll) dan Media Sosial.

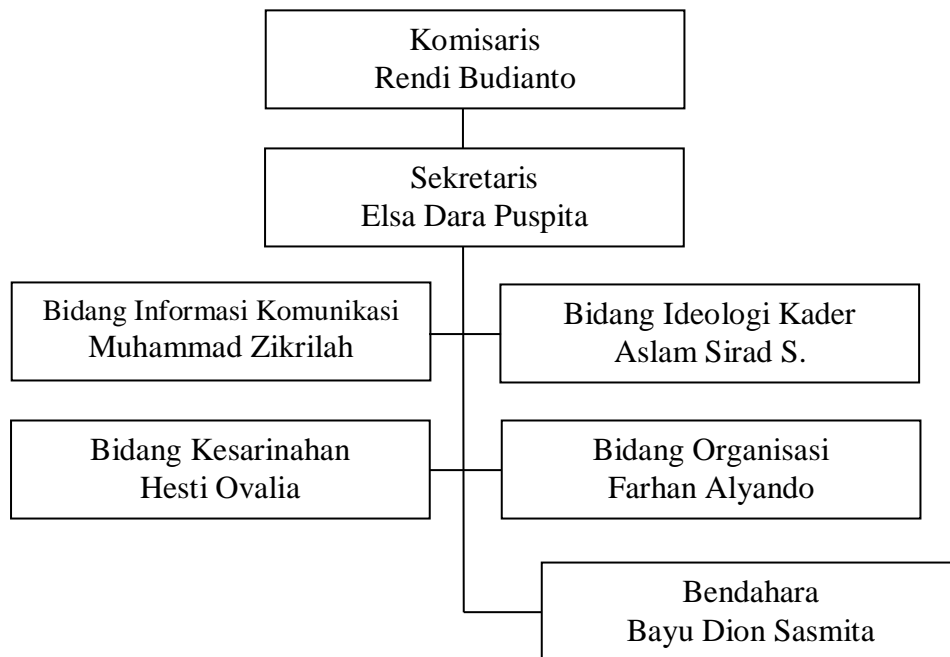
JPPR di tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa merupakan jaringan lembaga atau organisasi anggota JPPR yang bekerja di wilayah geografis tertentu, yang bertindak untuk mengimplementasikan program JPPR di tingkat nasional. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam program ini dengan melaporkan temuan pelanggaran Pemilu, hasil foto dan dokumentasi lainnya melalui akun Facebook Seknas JPPR.

4.3.11. Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia

Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) adalah salah satu organisasi mahasiswa ekstrakampus yang terdapat hampir di seluruh Indonesia, terutama kota atau kabupaten yang memiliki perguruan tinggi. GMNI berdiri pada 23 Maret 1954 di Surabaya (gagasannya lahir di Jakarta). GMNI merupakan organisasi hasil dari penggabungan atau peleburan (fusi) dari tiga organisasi mahasiswa yang telah berdiri sebelumnya yakni; Gerakan Mahasiswa Marhaen (berbasis di Yogyakarta), Gerakan Mahasiswa Merdeka (berbasis di Surabaya), dan Gerakan Mahasiswa Demokrat Indonesia.

Gagasan untuk melakukan peleburan muncul pertama kali dari ketua Gerakan Mahasiswa Demokrat Indonesia, S.M. Hadiprabowo pada September 1953. Didasari keinginan untuk menyatukan organisasi-organisasi mahasiswa nasionalis, S. M Hadiprabowo kemudian mengatur pertemuan dengan pimpinan dua organisasi lainnya. Hadiprabowo kemudian bertemu dengan Slamet Djajawidjaja, Slamet Rahardjo, dan Haruman dari Gerakan Mahasiswa Merdeka. Ia kemudian bertemu Wahyu Widodo, Subagio Masrukin, dan Sri Sumantri dari Gerakan Mahasiswa Marhaenis. Pada 23 Maret 1954, Kongres I GMNI diadakan dengan restu langsung dari Presiden Soekarno. Kongres I menetapkan S.M Hadiprabowo sebagai ketua pertama GMNI. Tanggal tersebut juga dipatenkan sebagai hari lahir GMNI dan diperingati sebagai dies natalis atau hari kelahiran GMNI.

Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia di Kota Bandar Lampung merupakan sebuah gagasan untuk mahasiswa memberikan akses untuk melakukan interaksi sosial di lingkungan organisasi dan sebagai wadah dalam menimba ilmu dari organisasi. Hal tersebut menjadikan GMNI Kota Bandar Lampung Sebagai lembaga atau organisasi kepemudaan yang berkiprah dirana kepemudaan dan kemahasiswaan yang ada di Kota Bandar Lampung.



Gambar 21. Struktur Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Kota Bandar Lampung

Sumber : Diolah Oleh Peneliti 2021

Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia memiliki lambing tersendiri, Yang mana dari setiap simbol merprentasikan arti dari organisasi masyarakat itu sendiri sebagai berikut.



Gambar 22. Lambang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia

Sumber : dppgmni.org/

Makna Lambang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia merupakan Warna merah dan putih merupakan representasi dari Bendera Merah Putih, merah berarti berani dan putih berarti suci, sementara hitam berarti keteguhan. Bintang melambangkan keluhuran cita-cita. Banteng adalah simbol dari rakyat marhaen, yang berarti GMNI ada untuk membela kaum marhaen.

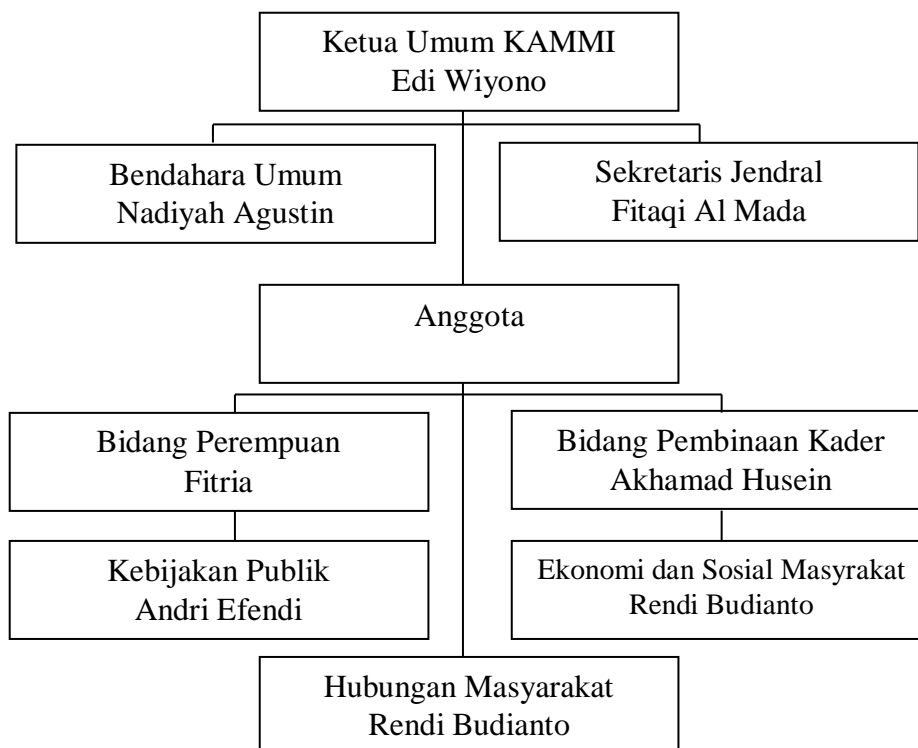
4.3.12. Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia

KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia) adalah sebuah organisasi mahasiswa muslim yang lahir di era reformasi yaitu tepatnya tanggal 29 Maret 1998 di Malang. Anggotanya tersebar di hampir seluruh PTN di Indonesia. KAMMI muncul sebagai salah satu kekuatan alternatif Mahasiswa yang berbasis mahasiswa Muslim dengan mengambil momentum pada pelaksanaan Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus se-Indonesia yang diselenggarakan di Universitas Muhammadiyah Malang KAMMI lahir pada ahad tanggal 29 Maret 1998 PK.13.00 wib atau bertepatan dengan tanggal 1 Dzulhijah 1418 H yang dituangkan dalam naskah Deklarasi Malang.

KAMMI lahir didasari sebuah keprihatinan yang mendalam terhadap krisis nasional tahun 1998 yang melanda Indonesia. Krisis kepercayaan terutama pada sektor kepemimpinan telah membangkitkan kepekaan para pimpinan aktivis dakwah kampus di seluruh Indonesia yang saat itu. KAMMI adalah organisasi ekstra kampus yang menghimpun mahasiswa muslim seluruh Indonesia secara lintas sektoral, suku, ras dan golongan. KAMMI menghimpun segenap mahasiswa muslim Indonesia yang bersedia bekerja sama membangun negara dan bangsa Indonesia. KAMMI berperan sebagai wadah dan mitra bagi mahasiswa Indonesia yang ingin menegakkan keadilan dan kebenaran dalam wadah negara

hukum Indonesia melalui tahapan pembangunan nasional yang sehat dan bertanggung jawab. KAMMI mengambil peran sebagai mitra bagi masyarakat dalam upaya-upaya pembangunan masyarakat sipil, demokratisasi dan pembangunan kesatuan/persaudaraan ummat dan bangsa melalui pendampingan /advokasi sosial, kritisi/ konstruktif terhadap kebijakan negara yang memarginalisasi masyarakat.

KAMMI Kota Bandar Lampung merupakan wadah mahasiswa sebagai tempat untuk menganalisa permasalahan publik yang terjadi di Kota Bandar Lampung. KAMMI juga sebagian besar lading mahasiswa untuk melakukan interaksi sosial antar sesama masyarakat dalam mengambil pembelajaran dan tingkat ilmu yang setara untuk kemajuan peran mitra bagi masyarakat dan pembangunan sipil di Kota Bandar Lampung.



**Gambar 23. Struktur Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim
Indonesia PD Kota Bandar Lampung**

Sumber : Diolah Oleh Peneliti 2021

Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia memiliki lambing tersendiri, Yang mana dari setiap simbol merprentasikan arti dari organisasi masyarakat itu sendiri sebagai berikut.



Gambar 24. Lambang Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia

Sumber : kammi.id/

Makna Tafsir lambang KAMMI pertama kali di bahas di Mukhtamar Lampung tepatnya oleh Komisi C. Pembuat draft tafsir lambang KAMMI adalah Yuli Widy Astono yang ketika itu masih menjabat ketua KAMMI Bogor.

1. Warna Dasar Putih melambangkan kesucian.
2. Globe Warna Biru Laut melambangkan da'wah universal yang mencakup bumi Allah di manapun kita berada.
3. Tangan Kanan yang Mengangkat Globe melambangkan da'wah KAMMI menggunakan kekuatan dalam mengemban da'wah ini.
4. Lima Bunga Mawar Warna Merah yang Mengelilingi Tangan melambangkan kelembutan dalam berda'wah dan jumlah Lima Kuntum Bunga Mawar melambangkan Rukun Islam.
5. Gradasi Warna Hijau melambangkan tahapan – tahapan da'wah KAMMI dalam membumikan ajaran Islam di Bumi Allah.

4.3.13. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) merupakan salah satu elemen mahasiswa yang terus bercita-cita mewujudkan Indonesia ke depan menjadi lebih baik. PMII berdiri tanggal 17 April 1960 dengan latar belakang situasi politik tahun 1960-an yang mengharuskan mahasiswa turut andil dalam mewarnai kehidupan sosial politik di Indonesia. Pendirian PMII dimotori oleh kalangan muda NU (meskipun di kemudian hari dengan dicetuskannya Deklarasi Murnajati 14 Juli 1972, PMII menyatakan sikap independen dari lembaga NU). Di antara pendirinya adalah Mahbub Djunaidi dan Subhan ZE (seorang jurnalis sekaligus politikus legendaris).

Ide dasar berdirinya Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) bermula dari adanya hasrat kuat para mahasiswa Nahdliyin untuk membentuk suatu wadah (organisasi) mahasiswa yang berideologi Ahlussunnah Wal Jama'ah. Sebelum berdirinya PMII, sudah ada organisasi mahasiswa Nahdliyin, namun masih bersifat lokal. Organisasi itu diantaranya ikatan mahasiswa nahdlatul ulama berdiri pada Desember 1955 di Jakarta. Di Surakarta dirikan keluarga mahasiswa nahdlatul ulama pada tahun yang sama. Kemudian berdiri juga persatuan mahasiswa nahdlatul ulama di Bandung. Selain organisasi tersebut, ada pula mahasiswa Nahdliyin yang tergabung pada ikatan pelajar nahdlatul ulama yang terwadahi pada departemen perguruan tinggi.

saat didirikan pada tahun 1960, PMII merupakan Badan Otonom (Banom) dari NU sebagai induk organisasi. Perjalanan PMII sebagai underbow NU bertahan hingga tahun 1972. Pada tahun itu PMII menyatakan diri sebagai organisasi independen yaitu tidak berafiliasi dengan organisasi manapun. Deklarasi Independensi

PMII dicetuskan pada tanggal 14 Juli 1972 di Murnajati Lawang Malang Jawa Timur. Deklarasi itu kemudian dikenal dengan “Deklarasi Murnajati”.

Dari namanya PMII disusun dari empat kata yaitu “Pergerakan”, “Mahasiswa”, “Islam”, dan “Indonesia”. Makna “Pergerakan” yang dikandung dalam PMII adalah dinamika dari hamba (makhluk) yang senantiasa bergerak menuju tujuan idealnya memberikan kontribusi positif pada alam sekitarnya. “Pergerakan” dalam hubungannya dengan organisasi mahasiswa menuntut upaya sadar untuk membina dan mengembangkan potensi ketuhanan dan kemanusiaan agar gerak dinamika menuju tujuannya selalu berada di dalam kualitas kekhalfahannya.

Pengertian “Mahasiswa” adalah golongan generasi muda yang menuntut ilmu di perguruan tinggi yang mempunyai identitas diri. Identitas diri mahasiswa terbangun oleh citra diri sebagai insan religius, insan dinamis, insan sosial, dan insan mandiri. “Islam” yang terkandung dalam PMII adalah Islam sebagai agama yang dipahami dengan haluan/paradigma *ahlussunah wal jama'ah* yaitu konsep pendekatan terhadap ajaran agama Islam secara proporsional antara iman, islam, dan ikhsan yang di dalam pola pikir, pola sikap, dan pola perilakunya tercermin sikap-sikap selektif, akomodatif, dan integratif.



**Gambar 25. Struktur Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia
Kota Bandar Lampung**

Sumber : Diolah Oleh Peneliti 2021

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia memiliki lambing tersendiri, Yang mana dari setiap simbol merprentasikan arti dari organisasi masyarakat itu sendiri sebagai berikut



Gambar 26. Lambang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia

Sumber : kammi.id/

Makna lambang PMII dalam setiap berikut

Bentuk :

- a. Perisai berarti ketahanan dan kemampuan mahasiswa Islam terhadap berbagai tantangan dan pengaruh dari luar.
- b. Bintang adalah perlambang ketinggian dan semangat cita-cita yang selalu memancar. (lima) bintang sebelah atas melambangkan Rasulullah dengan empat sahabat terkemuka (khulafaurrasyidin).
- c. 4 (empat) bintang sebelah bawah menggambarkan empat mazhab yang berhadluan Ahlussunah Wal Jama'ah.
- d. 9 (sembilan) bintang secara keseluruhan dapat berarti :

Rasulullah dengan empat orang sahabatnya serta empat orang imam mazhab itu laksana bintang yang selalu bersinar cemerlang, mempunyai kedudukan yang tinggi dan penerang umat manusia.

Sembilan bintang juga menggambarkan sembilan orang pemuka penyebar agama islam di Indonesia yang disebut dengan Wali Song

Warna:

- a. Biru, sebagaimana tulisan PMII, berarti kedalaman ilmu pengetahuan yang harus dimiliki dan harus digali oleh warga pergerakan, biru juga menggambarkan lautan Indonesia dan merupakan kesatuan Wawasan Nusantara
- b. Biru muda, sebagaimana dasar perisai sebelah bawah berarti ketinggian ilmu pengetahuan, budi pekerti dan taqwa.
- c. Kuning, sebagaimana perisai sebelah atas berarti identitas mahasiswa yang menjadi sifat dasar pergerakan, lambang kebesaran dan semangat yang selalu menyala serta penuh harapan menyongsong masa depan

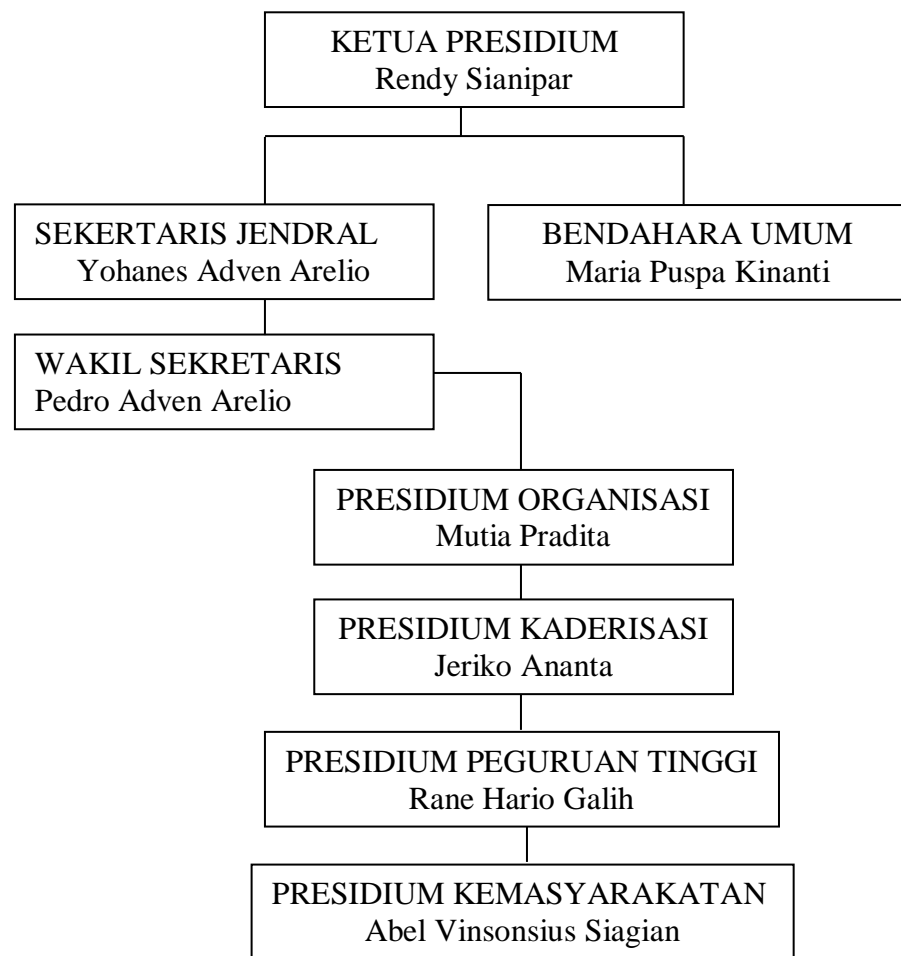
4.3.14 Pergerakan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia

Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia disingkat (PMKRI) merupakan Organisasi Kepemudaan (OKP) Katolik yang berfungsi sebagai organisasi pengkaderan, pembinaan dan organisasi perjuangan mahasiswa Katolik (juga bukan Katolik) yang berasaskan Pancasila, dijiwai nilai-nilai kekatolikan, dan disemangati semangat kemahasiswaan. Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) pada awalnya merupakan hasil fusi Federasi KSV (Katholieke Studenten Vereniging) dan Perserikatan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Yogyakarta. Federasi KSV yang ada saat itu meliputi KSV St. Bellarminus Batavia (berdiri di Jakarta, 10 November 1928), KSV St. Thomas Aquinas Bandung (berdiri 14 Desember 1947), dan KSV St. Lucas Surabaya (berdiri 12 Desember 1948).

Federasi KSV yang berdiri tahun 1949 tersebut diketuai oleh Gan Keng Soei (KS Gani) dan Ouw Jong Peng Koen (PK Ojong). Adapun PMKRI Yogyakarta yang pertama kali diketuai oleh St. Munadjat Danusaputro, didirikan pada tanggal 25 Mei 1947. Penentuan tanggal 25 Mei 1947 yang bertepatan sebagai hari Pantekosta, sebagai hari lahirnya PMKRI, tidak bisa dilepaskan dari jasa Mgr. Soegijapranata. Atas saran beliau tanggal itu dipilih dan akhirnya disepakati para pendiri PMKRI, setelah sejak Desember 1946 proses penentuan tanggal kelahiran belum menemui hasil. Alasan beliau menetapkan tanggal tersebut adalah sebagai simbol turunnya roh ketiga dari Tri Tunggal Maha Kudus yaitu Roh Kudus kepada para mahasiswa katolik untuk berkumpul dan berjuang dengan landasan ajaran agama Katolik, membela, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia.

Pergerakan mahasiswa katolik Republik Indonesia kota Bandar Lampung merupakan salah satu wadah mahasiswa katolik dalam

melakukan segala aktifitas sebagai mahasiswa yang aktif dalam menjalankan tugasnya sebagai mahasiswa, dan juga Pergerakan Mahasiswa Katolik saat ini masih dalam bentuk diam karena mungkin diambang minoritas disebagian daerah Kota Bandar Lampung, namun mahasiswa katolik tidak menjadi hambatan mereka untuk selalu menjalankan perannya dalam sebagai mahasiswa yang dituntut dalam menjalankan tugas untuk memberi monitoring dalam bentuk, politik, sosial dan ekonomi.



Gambar 27. Struktur Organisasi Pergerakan Mahasiswa Katolik

Sumber: Dewan Pimpinan Cabang PMKRI

Pergerakan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia memiliki lambing tersendiri, Yang mana dari setiap simbol merprentasikan arti dari organisasi masyarakat itu sendiri.



Gambar 28. Lambang Pergerakan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia

Sumber: Lambang Pergerakan Mahasiswa katolik

Makna Lambang PMKRI memiliki arti dalam setiap bagian nya :

1. TULISAN PMKRI
 - a. Simbol : singkatan nama organisasi.
 - b. Warna : putih
 - c. Arti warna : kesucian
 - d. Makna : Perjuangan dan Pembinaan PMKRI untuk menebus Ampera merupakan perjuangan yang luhur, suci, dan mulia.
2. LINGKARAN
 - a. Simbol : dunia
 - b. Warna : merah
 - c. Arti warna : keberanian
 - d. Makna : PMKRI hidup didunia yang penuh dengan tantangan, dan masalah yang harus dihadapi dengan keberanian guna mewujudkan tujuan perhimpunan.
3. API OBOR
 - a. Simbol : terang dan semangat

- b. Warna : kuning
 - c. Arti warna : kekhatolikan
 - d. Makna : PMKRI hendaknya dapat menjadi jalan terang ditengah kegelapan/kebatilan dunia dan untuk mewujudkannya diperlukan semangat yang menyala-nyala yang merupakan bentuk penghayatan spiritualitas kekhatolikan.
4. LIMA LIDAH API
- a. Simbol : Pancasila
 - b. Warna : kuning
 - c. Arti warna : keadilan dan kemakmuran
 - d. Makna : Pancasila sebagai dasar negara menjadi acuan PMKRI dalam hidup berbangsa dan bernegara untuk mewujudkan cita-cita keadilan dan kemakmuran.
5. BUKU
- a. Simbol : Intelektualitas
 - b. Warna : putih
 - c. Arti warna : kebenaran
 - d. Makna : Dalam berkarya PMKRI harus menjunjung tinggi dan mendasarkan intelektualitas dalam mewujudkan kebenaran di tengah-tengah dinamika kemasyarakatan
6. SALIB
- a. Simbol : pengorbanan
 - b. Warna : putih
 - c. Arti warna : ketulusan
 - d. Makna : Berkarya dalam pengabdian di PMKRI membutuhkan pengorbanan yang besar dan membutuhkan ketulusan hati atas pengorbanan tersebut.
7. DUA TANGKAI TUJUH BELAS KUNTUM PADI
- a. Simbol : Proklamasi 17 Agustus 1945
 - b. Warna : kuning

- c. Arti warna : semangat
- d. Makna : PMKRI harus turut berperan aktif dalam mewujudkan semangat dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.

4.3.15 Tokoh Adat Lampung Saibatin

“Saibatin” bermakna satu batin atau memiliki satu junjungan. Hal ini sesuai dengan tatanan sosial dalam Suku Saibatin, hanya ada satu raja adat dalam setiap generasi kepemimpinan. Budaya Suku Saibatin cenderung bersifat aristokratis karena kedudukan adat hanya dapat diwariskan melalui garis keturunan. Tidak seperti Suku Pepadun, tidak ada upacara tertentu yang dapat mengubah status sosial seseorang dalam masyarakat. Masyarakat Adat Lampung Saibatin mendiami wilayah adat: Labuhan Maringgai, Pugung, Jabung, Way Jepara, Kalianda, Raja Basa, Teluk Betung, Padang Cermin, Cukuh Balak, Way Lima, Talang Padang, Kota Agung, Semaka, Suoh, Sekincau, Batu Brak, Belalau, Liwa, Pesisir Krui, Ranau, Martapura, Muara Dua, Kayu Agung, empat kota ini ada di Provinsi Sumatera Selatan, Cikoneng di Pantai Banten dan bahkan Merpas di Selatan Bengkulu.

Ciri lain dari Suku Saibatin dapat dilihat dari perangkat yang digunakan dalam ritual adat. Salah satunya adalah bentuk siger (sigekh) atau mahkota pengantin Suku Saibatin yang memiliki tujuh lekuk/pucuk (sigokh lekuk pitu). Tujuh pucuk ini melambangkan tujuh adoq, yaitu suntan, raja jukuan/depati, batin, radin, minak, kimas, dan mas. Selain itu, ada pula yang disebut awan gemisir (awan gemisikh) yang diduga digunakan sebagai bagian dari arak-arakan adat, diantaranya dalam prosesi pernikahan.

Gelar dalam adat lampung merupakan kedudukan yang dengannya dapat membedakan baik hak maupun kewajiban. Kedudukan dari masing-masing gelar mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda. Misalnya, seseorang yang bergelar suntan dalam adat saibatin memiliki kursi tahta tertinggi, orang yang menerimanya adalah seorang putra dari penyimbang adat/saibatin yang telah berkeluarga. Gelar suntan memiliki hak dan kewajiban, dimana haknya adalah sebagai pewaris kedudukan orang tua, dan kewajibannya adalah memberikan arahan kepada adikadiknya dalam kehidupan dikeluarga maupun masyarakat.

Seseorang yang memiliki gelar mempunyai peran dan tanggung jawab yang besar dengan menyandang gelar dari adat istiadat tersebut, untuk mengayomi yang berada di sekelilingnya, memeperhatikan masyarakat dibawah tanggung jawabnya, serta masih banyak lagi peran-peran yang di pegang oleh seorang yang memeiliki gelar, baik itu suntan yang tertinggi, sampai dengan mas pada tingkatan terendah, adapun tingkatan tersebut bukan menunjukkan gengsi yang dipegan dalam adat melainkan seberapa besar perannya dan tanggung jawabnya dalam lingkungan adat tersebut. Karena peran seorang suntan lebih besar dari pada yang dibawahnya, baik itu perhatian, waktu, atau pun yang lainnya terhadap masyarakat dalam lingkungan adat tersebut.



Gambar 29. Lambang Siger Lampung Saibatin
Sumber: Asal Usul Siger Sebagai Perhiasan Khas Lampung

Makna dari Siger Saibatin adalah Siger pada Suku Lampung yang beradatkan Saibatin memiliki lekuk berjumlah tujuh dengan hiasan batang atau pohon sekala di masing-masing lekuknya, menggambarkan makna ada tujuh *adok* atau gelar pada masyarakat pesisir yaitu *Suttan* atau *Dalom*, Raja jukuan atau dipati, Batin, Radin, Minak, Kimas dan Mas atau inton. Gelar ini hanya dapat digunakan oleh keturunan lurus saja, dengan kata lain masih kental dengan nuansa kerajaan. Dilihat dari bentuknya Siger Saibatin ini mirip dengan Rumah Gadang di Minangkabau, Provinsi Sumatera Barat. Karena dahulunya adat budaya Lampung Saibatin mendapat pengaruh besar dari kerajaan yang bernama Pagaruyung.

4.3.16 Tokoh Adat Lampung Pepadun

Masyarakat adat Lampung Pepadun adalah salah satu dari dua kelompok adat besar dalam masyarakat Lampung. Masyarakat ini mendiami daerah pedalaman atau daerah dataran tinggi Lampung. Berdasarkan sejarah perkembangannya, masyarakat Pepadun awalnya berkembang di daerah Abung, Way Kanan, dan Way Seputih (Pubian). Kelompok adat ini memiliki kekhasan dalam hal tatanan masyarakat dan tradisi yang berlangsung dalam masyarakat secara turun temurun. Nama “Pepadun” berasal dari perangkat adat yang digunakan dalam prosesi Cakak Pepadun. “Pepadun” adalah bangku atau singgasana kayu yang merupakan simbol status sosial tertentu dalam keluarga. Prosesi pemberian gelar adat (“Juluk Adok”) dilakukan di atas singgasana ini.

Dalam upacara tersebut, anggota masyarakat yang ingin menaikkan statusnya harus membayarkan sejumlah uang (“*Dau*”) dan memotong sejumlah kerbau. Prosesi Cakak Pepadun ini

diselenggarakan di “Rumah Sessat” dan dipimpin oleh seorang Penyimbang atau pimpinan adat yang posisinya paling tinggi. Masyarakat Pepadun menganut sistem kekerabatan patrilineal yang mengikuti garis keturunan bapak. Dalam suatu keluarga, kedudukan adat tertinggi berada pada anak laki-laki tertua dari keturunan tertua, yang disebut “Penyimbang”. Gelar Penyimbang ini sangat dihormati dalam adat Pepadun karena menjadi penentu dalam proses pengambilan keputusan. Status kepemimpinan adat ini akan diturunkan kepada anak laki-laki tertua dari Penyimbang, dan seperti itu seterusnya.

Berbeda dengan Saibatin yang memiliki budaya kebangsawanan yang kuat, Pepadun cenderung berkembang lebih egaliter dan demokratis. Status sosial dalam masyarakat Pepadun tidak semata-mata ditentukan oleh garis keturunan. Setiap orang memiliki peluang untuk memiliki status sosial tertentu, selama orang tersebut dapat menyelenggarakan upacara adat Cakak Pepadun. Gelar atau status sosial yang dapat diperoleh melalui Cakak Pepadun diantaranya gelar Suttan, Raja, Pangeran, dan Dalam.



Gambar 30 . Lambang Siger Lampung Pepadun

Sumber: Asal Usul Siger Sebagai Perhiasan Khas Lampung

Siger Pepadun adalah siger yang memiliki lekuk sembilan yang berartikan ada Sembilan Marga yang bersatu

membentuk *Abung Siwo Megou*. Tapi bentuk dari Siger Pepadun sangat mirip dengan buah sekala, hal ini dikarenakan Kerajaan Sekala Bekhak merupakan cikal bakal ulun Lampung, dan proses terbentuknya *abung siwo megou* merupakan penyebaran orang Lampung dari dataran tinggi Sekala Bekhak di Gunung Pesagi.

VI. SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan

Dalam kontestasinya persepsi masyarakat kepada partai politik sangat berpengaruh penting untuk modal dasar dan kekuatan yang harus diperbaiki oleh partai politik. Persepsi ketidakpercayaan masyarakat kepada partai politik merupakan suatu tindakan sikap dan perilaku dalam memberikan nilai kepada partai politik. Selain itu untuk mendapatkan simpatik dukungan dari masyarakat, partai politik seharusnya mampu menjalin komunikasi dan berusaha selalu berinteraksi dengan masyarakat dalam memberikan edukasi seperti informasi tentang politik kepada masyarakat.

Pengetahuan tokoh pada partai politik di Kota Bandar Lampung merupakan salah satu tolak ukur bagi pembahasan penelitian, yang dimana saat ini partai politik sebagai acuan dari masyarakat untuk dapat melihat bagaimana kepercayaan masyarakat kepada partai politik. Sejauh ini pengetahuan tokoh masyarakat kepada partai politik menjadi pengamatan yang sangat penting dalam berjalannya penilaian partai politik dari masyarakat. Secara langsung bahwa melihat fenomena ketidakpercayaan masyarakat kepada partai politik tokoh masyarakat yang mewakili masyarakat memberikan monitoring kepada partai politik guna partai politik dapat mengevaluasi bagaimana keadaan masyarakat kepada partai politik saat ini.

Melihat sikap tokoh masyarakat kepada partai politik yaitu tokoh masyarakat menilai bahwa rata-rata partai politik saat ini memiliki sikap pragmatis kepada masyarakat, yang dimana masyarakat dianggap mudah dan praktis oleh partai politik terutama oleh para kader-kader partai politik. Sifat seperti

yang membuat masyarakat terkadang ragu dengan partai politik untuk dapat bekerja sama memberikan aspirasinya, apalagi saat ini masyarakat merasa bahwa partai politik masih saja ada yang tidak memiliki kepedulian dengan masyarakat. Adapun faktor penyebab dari ketidakpercayaan tokoh masyarakat kepada partai politik sampai saat ini yang dilandasi oleh masyarakat, dimana pada saat pemilihan umum terjadi masih saja sering terjadinya golongan putih sebagai hal tersebut dipacu oleh faktor-faktor sebagai berikut :

- 1 Masyarakat semakin melek politik dan juga peran dari media publik yang modern saat ini, menjadi bahan dasar penilaian masyarakat kepada partai politik.
- 2 Banyaknya kader-kader partai yang terjerat kasus politik yang terjadi salah satunya faktor utama yaitu kasus korupsi yang sering terjadi.
- 3 Sikap dan perilaku partai politik terutama kader partai politik yang tidak mementingkan kepentingan masyarakat.
- 4 Kegagalan partai politik dan politisi itu kurangnya penepatan janji yang misalnya saja gagal dalam pemenuhan janji untuk kesejahteraan.
- 5 Parpol tidak selalu mencalonkan kader lama, namun lebih sering mencalonkan kader baru bahkan sebelumnya bukan kader sebagai calon pemimpin daerah. Pilihan ini atas dasar seberapa besar kekayaan yang dimiliki oleh kandidat tersebut, akhirnya oligarki merebut ruang partisipasi publik.

6.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka ada beberapa pernyataan peneliti dalam memberikan saran sebagai berikut :

1. Pada persepsi kepercayaan peneliti memberikan saran bahwa sebaiknya partai politik bersama kader-kader partai politik untuk selalu memberikan bimbingan kepada masyarakat dalam bentuk edukasi

politik agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana keadaan partai politik saat ini, hal ini dapat menjaga komunikasi baik interaksi sosial maupun interaksi politik dengan masyarakat. Dengan adanya edukasi dari partai politik masyarakat tidak akan mengalami kepasifan kepada partai politik.

2. Selanjutnya pada indikator sikap partai politik sebaiknya partai politik memberikan sikap terbaik kepada masyarakat untuk menjaga kepercayaan masyarakat kepada partai politik, karena partai politik bisa dikatakan sebagai pedoman masyarakat dalam menentukan aspirasi suaranya kepada partai politik, jika partai politik tidak bisa memberikan sikap terbaiknya kepada masyarakat maka bisa saja masyarakat akan bersikap sama kepada partai politik dan terus-menerus tidak mempercayai partai politik.
3. Sedangkan pada indikator perilaku partai politik ini berkaitan dengan sikap partai politik seharusnya berperilaku kepada masyarakat dengan cara sebaik-baiknya dengan menepati janji-janji para kader partai yang telah terpilih pada saat kampanye terjadi, dan tidak berpikiran bahwa masyarakat dibutuhkan pada saat pemilihan umum berlangsung, jika pola-pola perilaku tersebut bisa diubah secara langsung maupun tidak langsung masyarakat pasti akan mengikuti contoh yang terbaik dari partai politik, dan merasa bangga dengan adanya kehadiran partai politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwidjaja, I., & Sriharjono, B. (2014). Strategi Kampanye Partai Politik Dalam Usaha Pemulihan Kepercayaan Masyarakat Pada Pemilu Legislatif 2014. *Reformasi*, 4(2), 84–90.
- Akhrani, L. (2013). Kajian Religiusitas terhadap Sikap Korupsi Anggota Partai Politik. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Amanda, L., Yanuar, F., & Devianto, D. (2019). Uji Validitas dan Reliabilitas Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Kota Padang. *Jurnal Matematika UNAND*, 8(1), 179.
- Arya, A., Wijaya, M., Doli, L., Studi, P., Pemerintahan, I., & Buton, U. M. (2020). Meningkatkan Partisipasi Pemilih Melalui Komunikasi Politik. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 9(2), 90–97.
- Delvia, C., & Sari, P. (2017). *Kota Semarang Terhadap Partai Politik Tahun 2016-2017 Skripsi*.
- Effendi, M. R., & Syafrudin, I. (2020). Pertalian Agama Pada Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 19(02), 12–27.
- Filus, M., Endang Sri Indrawati, D., & Ratri SPsi, D. D. (n.d.). *Description Of Communication In The Family In Adolescenteating Drink Alcohol*. 1–12.
- Hakim, L. (2012). Internalisasi Nilai-Nilai Agama Islam Dalam Pembentukan Sikap Dan Perilaku Siswa Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Muttaqin Kota Tasikmalaya. *Internalisasi Nilai-Nilai Agama Islam Dalam Pembentukan Sikap Dan Perilaku Siswa Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Muttaqin Kota Tasikmalaya*, 10(1), 67–77.
- Hendrik, D. (2010). Variabel-variabel yang Mempengaruhi Rendahnya Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2008. *Jurnal Demokrasi*, 9, 137–148.
- Hertanto, H., & Sulaiman, N. A. (2013). Koalisi Transaksional Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Lampung. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 12(2), 8-29.

- Irwansyah, Dodi., Fitri, Handayani., & Johaidah, Mi. (2021). Profil Tingkat Kebugaran Jasmani Pada Lansia Di Puskesmas Alue Pineung Langsa Timur. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 4(1), 2013–2015.
- Kholmi, M. (2013). Persepsi Pengurus Partai terhadap Akuntabilitas Keuangan Partai Politik. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 3(1), 363–371.
- Liando, D. M. (2016). Pemilu dan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Pada Pemilihan Anggota Legislatif Dan Pemilihan Presiden Dan Calon Wakil Presiden Di Kabupaten Minahasa Tahun 2014). *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, 3(2), 14–28.
- Musafiri, M. R. Al. (2017). Analisis Persepsi Dan Sikap Terhadap Perilaku Konsumen Dalam Pemilihan Tabungan Berbasis Syariah di Iaida Blokagung Tegalsari Banyuangi. *Jurnal Istiqro*, 5(2), 88–104.
- Nugroho, Kris. (2021). *Partai Semu : antara Kesisteman dan Dominasi Jaringan Calon*. Surabaya. Airlangga University Press.
- Rohati., Agung, Febrianto., & K. (2015). *Desain Media Komik Matematika Dengan Menggunakan Model Problem Based Learning (Pbl) Pada Materi \ Aritmetika Sosial Di Kelasvii Smp Xaverius 2 Kota Jambi*. 05, 1–8.
- Syafrudin, I. (2021). Peran anggota badan legislatif perempuan dalam perspektif gender (study perilaku politik 2 anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Solidaritas Indonesia). *CIVICS: Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 6(1), 160–165.
- Warjio. (2019). *Tata Kelola Partai : Bagaimana Partai Politik Bekerja Dalam Gelombang Demokrasi*. Medan. Gerhana Media Kreasi.
- Wisasa, I. G. P., Setiyono, B., & Utomo, S. (2014). Peranan Modal Sosial Dalam Kemenangan Satono Dari Jalur Independen Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2010. *Journal of Politic and Government Studies*, 3(3), 366–375.
- Yuliono, A. (2013). Kepercayaan Masyarakat Pada Partai Politik. *Jurnal Administrasi Publik*, 11(1), 173–184.
- Zar, S. (2014). Integrasi Islam Dan Sains. *Jurnal Islam Dan Demokrasi*, 1(3), 1–106.

Sumber Internet :

<http://malahayati.ac.id/?p=18131>. Diakses pada 20 desember 2021

<https://aceproject.org/>. Diakses pada 18 januari 2022

<https://ajikotamandar.or.id/>. Diakses pada 17 januari 2022

<https://ciptakarya.pu.go.id/>. Diakses pada 15 desember 2021

<https://dppgmni.org/>. Diakses pada 19 januari 2022

<https://gmki.or.id/>. Diakses pada 17 desember 2021

<https://jdih.kpu.go.id/lampung/bandarlampung/>. Diakses pada 15 desember 2021

<https://kabar24.bisnis.com/read//tingkat-partisipasi-pemilu-2019-naik-positif-atau-negatif>. Diakses pada 20 mei 2021

<https://kammi.id/>. Diakses pada 25 januari 2022

<https://kpu-bandarlampungkota.go.id/>. Diakses pada 10 Mei 2021

<https://muhammadiyah.or.id/>. Diakses pada 13 desember 2021

<https://nasional.tempo.co/read//survei-lsi-soal-kepercayaan-publik-dpr-dan-parpol-urutan-paling-buncit>. Diakses pada 16 april 2021

<https://pbhmi.info/>. Diakses pada 15 desember 2021

<https://peraturan.bpk.go.id/>. Diakses pada 13 desember 2021

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/114606/perda-kota-bandar-lampung-no-10-tahun-2011>. Diakses pada 13 desember 2021

<https://pmii.id/>. Diakses pada 25 januari 2022

<https://www.hipmi.org/>. Diakses pada 17 desember 2021

<https://www.nu.or.id/>. Diakses pada 16 desember 2021

<https://www.pwi.or.id/>. Diakses pada 19 januari 2022

<https://www.walhilampung.or.id/>. Diakses pada 16 desember 2021